

**ASEAN REGIONAL FORUM (ARF)
SEBAGAI MEKANISME DIPLOMASI PREVENTIF
DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK LAUT
CINA SELATAN (LCS)**

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

LUTHFIAH ANOM SARI

NIM. 970910101011

Pembimbing :

Drs. Asrial Aziz

Asal:

Hadiah

Klass

~~Pembelian~~

327.16

Terima Tel : 24 JUN 2002

SAR

No. Induk : 1045

a

KLASIR / PENYALIV :

c. 1

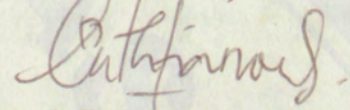
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

PERNYATAAN

Guna menyatakan bahwa skripsi ini adalah
hasil karya asli saya sendiri dan
semua bahan yang digunakan adalah
berasal dari sumber yang sah dan diketahui

Penulis,



Luthfiah Anom Sari

MOTTO

اغْتُمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ
وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقِيمِكَ وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ
وَشَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ

(رواه الحاكم وأحمد والبيهقي)

Pergunakanlah kesempatan lima (5) perkara sebelum datangnya lima perkara berikutnya: (1) Hidupmu sebelum datang matimu, (2) Sehatmu sebelum datang sakitmu, (3) Waktu senggangmu sebelum datang kesibukanmu, (4) masa mudamu sebelum datang masa tuamu dan (5) saat kayamu sebelum datang masa kepapaanmu

(HR. Al Hakim dan Ahmad dan Baihaqy)*

"First of all the stress of preventive diplomacy in our region should be put on the consolidation of the positive achievement of regional security in the post cold war"

(Shi Chunlai)

* Abujamin Roham, *Sindroma Pensiun dan Masa Mamula*, 1998

**Shi Chunlai. *Preventive Diplomacy And The Asia Pacific Region* Dikutip dari Desmond Ball & Amitav Acharya, *Preventive Diplomacy And The Security Cooperation*, 1999)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda Drs. Ansor Anom Dihadjo dan Ibunda Sri Hartati, BA aliran kasih sayangmu melumuri ananda dalam setiap langkah, aku bangga menjadi puterimu.

Eyang Anom Dihadjo (Alm), Eyang Kasiran (Alm), dan Eyang puteri Rr.

Samirin, aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini.

Yuniati "Tatiel" Puspaningtyas dan Farida Permanasari "Ida" dengan kalian kumengerti arti tanggung jawab.

Ronny Eko Susanto, S.Sos dengan segala pemikiran dalam diskusi-diskusi panjangku.

Almamaterku Universitas Jember

Tanah Airku Indonesia.

PENGESAHAN

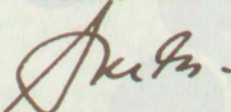
Diterima dan Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 25 April 2002
Jam : 09.00 WIB

Panitia Penguji

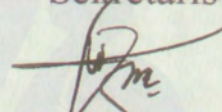
Ketua



Drs. Sjoekronsyah, SU

NIP. 130325930

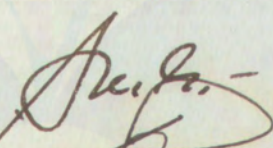
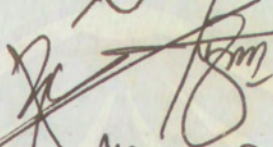
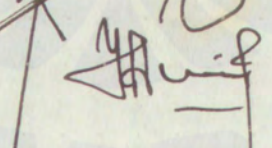
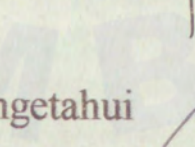
Sekretaris



Drs. Asrial Aziz

NIP. 130355413

Anggota Tim Penguji

- | | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 1. Drs. Sjoekronsyah, SU |  | (Ketua) |
| 2. Drs. Asrial Aziz |  | (Sekretaris) |
| 3. Drs. A. Habibullah, Msi |  | (Anggota) |
| 4. Dra. Sri Yuniati, Msi |  | (Anggota) |

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan



Drs. H. M. Toerki

NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Asean Regional Forum (ARF) sebagai Mekanisme Diplomasi Preventif Dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan”

Perkembangan situasi keamanan di Asia Pasifik pasca perang dingin menimbulkan perubahan sikap negara-negara di kawasan dalam memandang konflik, yang dapat mengancam kestabilan kawasan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut adalah membentuk forum multilateral yang menangani masalah politik dan keamanan yaitu Asean Regional Forum (ARF).

Relevansi Asean Regional Forum (ARF) dapat dilihat melalui langkah-langkah yang diupayakan oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam menangani konflik laut Cina Selatan dengan peningkatan rasa saling percaya atau Confidence Building Measure (CBMs) dan Diplomasi Preventif.

Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa untuk mencapai tujuan ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Asrial Aziz selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing serta mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sjoekronsyah, SU selaku Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan dorongan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4. Bapak Drs. Ahmad Habibullah, MSi selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan bimbingan selama penulis belajar.
6. Segenap civitas akademika FISIP Universitas Jember.
7. Temen-temenku Bangka tiga, Atik, Meilian, Yasin, Aini, Naning, Agus, Nunuk, Koko, Deniar, Hafid, Miftah, Maun, Andik, Rahmad serta semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses dan terima kasih atas hari-harinya menemani penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Temen-temen Kostku bangka II/19 Amrul, Nunung, Siti, Vivi'98, Vivi'99, Indah serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dalam kelancaran proses pembuatan skripsi ini.
9. Temen-temenku Ilmu Hubungan Internasional '97 Linda, Rina, Lia, Elly, Ninit dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih atas motivasi dan masukan selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adikku Ratna, Luluk, Evin, Mamad, Asmuni, Anang, Dimas, Rizki, Dewi, Aning, Diana, Vonny, Icha dan semua yang telah memberikan motivasi dan hari-hari indah selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Jember, Maret 2002.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
1.3 Permasalahan.....	10
1.4 Kerangka.....	10
1.5 Hipotesis.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Pendekatan	18
BAB II ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) SEBAGAI FORUM MULTILATERAL MASALAH POLITIK DAN KEAMANAN KAWASAN.....	
20	
2.1 Peran dan Fungsi Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Forum Dialog Multilateral Masalah Keamanan	20
2.2 Instrumen Dasar Asean Regional Forum.....	25
2.2.1 Pengembangan <i>confidence building measures</i> (CBMs).....	25
2.2.2 Pengembangan Diplomasi Preventif.....	28
2.2.3 Instrumen Penyelesaian Konflik (<i>conflict resolution</i>).....	32
2.3 Konflik Laut Cina Selatan (LCS).....	33

BAB IV IMPLEMENTASI ASEAN REGIONAL FORUM SEBAGAI MEKANISME DIPLOMASI PREVENTIF DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN (LCS)	95
4.1 Hasil-hasil yang Dicapai Oleh Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Mekanisme Diplomasi Preventif Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan (LCS)	95
4.2 Rekomendasi Bagi Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Mekanisme Diplomasi Preventif Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan (LCS).....	113
BAB V KESIMPULAN	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : The Asean Regional Paper : A Concept Paper
- 2 : Seventh Asean Regional Forum Ministerial Meeting
- 3 : Asean Declaration on The South China Sea
- 4 : Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
- 5 : United Nation Convention on The Law of the Sea – Part XV
- 6 : United Nation Convention on The Law of the Sea – Part XI
Section 5
- 7 : Spratly Island Disputes
- 8 : Daftar nama-nama pulau di gugusan Kepulauan Spratly

BAB I
PENDAHULUAN



I.1. Alasan Pemilihan Judul

Perang dingin yang terjadi antara dua negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet mempengaruhi hampir seluruh kawasan di dunia. Salah satu kawasan yang menikmati ketegangan yang terjadi antara dua negara tersebut adalah Asia Pasifik, karena ketika terjadi perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba berebut wilayah pengaruh sekaligus menjaga wilayah pengaruh yang sudah diperolehnya, maka dengan demikian negara-negara di kawasan Asia Pasifik menikmati kestabilan kawasan yang relatif.

Namun sejak berakhirnya perang dingin kestabilan kawasan menjadi agak terganggu. Ada beberapa kondisi atau faktor yang mengkhawatirkan kawasan. "Berakhirnya era perang dingin di kawasan tersebut telah memberi peluang bagi munculnya ketidakpastian dan kekhawatiran akan ketidakstabilan-ketidakstabilan baru".¹ Berkurangnya kehadiran Amerika Serikat yang dinilai oleh banyak pihak telah menciptakan *regional vacuum*. Pengurangan ini ditandai dengan penutupan pangkalan Amerika Serikat di Subic Bay dan Clark Airfield di Filipina, sebelumnya Uni Soviet telah menutup pangkalan militernya di Cam Rahn Bay, Vietnam. Hal ini semakin memperkuat adanya *regional vacuum* di kawasan ini yang memberikan peluang bagi kepemimpinan yang baru oleh negara-negara di kawasan ini, seperti Cina, Jepang, Korea Utara, dan lainnya.

Perkembangan Republik Rakyat Cina (RRC) juga menimbulkan kekhawatiran, dikarenakan ada indikasi RRC semakin memantapkan *military capacity*-nya dengan tentara terbesar di dunia sekitar tiga juta personil, baru-baru ini RRC dikabarkan telah membeli pesawat tempur Mig-29 dan Sukoi-27 buatan Rusia, juga penguatan armada angkatan lautnya. Langkah-langkah Beijing ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan regional hal ini semakin diperkuat

¹ Archarya. Dikutip dari Bantarto Bandoro, *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 1

Negara-negara harus mulai bersikap mandiri dalam hal menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya, sehingga kondisi pasca perang dingin yang justru menimbulkan ketidakpastian masalah keamanan di kawasan, diantaranya kondisi saling mencurigai dan kekhawatiran akan adanya hegemoni Cina juga pengembangan reaktor nuklir Korea Utara, direspon oleh negara-negara dengan meningkatkan pembelian senjata dalam rangka keamanan nasionalnya.

Kondisi yang saling mencurigai ini terutama terjadi di kawasan Asia Timur, dimana belum terdapat organisasi regional seperti seperti ASEAN yang selama ini dianggap mampu dalam mengelola konflik diantara anggota-anggotanya. Bila selama perang dingin masalah-masalah yang menyangkut geostrategi relatif terabaikan maka pada pasca perang dingin persoalan geostrategi ini mencuat kembali, yang terkemuka diantara persoalan-persoalan tersebut adalah tumpang tindih klaim wilayah perbatasan yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu negara-negara ASEAN dan di luar ASEAN. Klaim tumpang tindih tersebut sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara Asia Pasifik karena bisa meningkat ke arah tindakan provokasi militer.

Potensi konflik yang demikian besar di Asia Pasifik memerlukan suatu mekanisme pengaturan keamanan untuk membendung terjadinya konflik atau provokasi militer dan mencegah meluasnya konflik ketika konflik tersebut telah terjadi. Dalam menyingkapi perubahan tata keamanan regional di Asia Pasifik, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan ini yang dipandang mampu meredam konflik diantara anggotanya meskipun tidak optimal, merasa harus mengambil bagian dalam penataan keamanan di kawasan ini. Sebagai suatu organisasi regional yang paling berhasil setelah Uni Eropa, "ASEAN telah mengambil inisiatif untuk mengantisipasi masalah ini".³

Keikutsertaan ASEAN dalam penataan keamanan kawasan didasarkan pada adanya kemungkinan politik hegemonisme yang dilakukan oleh negara-negara besar di kawasan ini seperti Cina, Jepang, Rusia, dan India, pasca perang dingin. Selain itu hal ini dikarenakan ASEAN dihadapkan pada suatu dilema,

³ Dewi Fortuna Anwar, *Isu-Isu Strategis Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*, PPW-LIPI, Jakarta, 1997, h.20

1. Kepentingan nasional negara-negara anggotanya lebih terakomodasi
2. Proliferasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transportasi lebih merata
3. Tingkat keamanan lebih terjamin
4. Dapat melestarikan nilai-nilai budaya di kawasan itu⁶.

Kecenderungan untuk menguatnya regionalisme di Asia Pasifik pasca perang dingin terutama didasarkan pada motivasi untuk mengatur keamanan kawasan yang tidak bisa lagi mengandalkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet secara berlebihan. Dalam rangka mengantisipasi kondisi keamanan yang tidak stabil pasca perang dingin ASEAN dituntut untuk lebih responsif dan aktif, oleh karena itu ASEAN merubah pandangan dari *inward looking* yang sangat mengutamakan konsolidasi ke dalam atau sangat mengutamakan kepentingan negara-negara anggotanya dan aplikasi prinsip *non intervensi* secara ketat, tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, menjadi organisasi yang berpandangan *outward looking*, di samping berorientasi ke dalam atau intra ASEAN juga turut aktif dalam penataan keamanan kawasan. Perubahan pandangan ASEAN untuk secara aktif merespon persoalan-persoalan keamanan kawasan melatarbelakangi pemikiran untuk membentuk suatu wadah yang secara khusus menangani persoalan-persoalan politik dan keamanan kawasan.

Berbagai usul mengenai penataan keamanan di Asia Pasifik sudah dilakukan semenjak berakhirnya perang dingin seperti usulan untuk membentuk forum semacam CSCE seperti yang terdapat di Eropa sampai dengan usul untuk menggunakan pertemuan ASEAN-PMC (pertemuan tahunan ASEAN dengan mitra dialognya) sebagai forum untuk membahas masalah-masalah keamanan kawasan, tapi inisiatif Menteri Luar Negeri Jepang Taro Nakayama ini ditolak, karena dikhawatirkan forum tersebut digunakan untuk membahas masalah investasi dan perdagangan di kawasan sub Pasifik.

⁶ *Ibid.*, h.39

Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Manila 1992,”... masalah keamanan pertama kali dicantumkan dalam agenda pertemuan tersebut⁷.

pertemuan tersebut para Menlu ASEAN mengatakan bahwa:

1. ASEAN perlu meningkatkan dialog internal dan eksternal dalam masalah politik dan keamanan untuk menciptakan keamanan yang komprehensif di Asia Pasifik.
2. Perlunya membicarakan secara formal masalah pengaturan keamanan
3. Mencari penyelesaian damai terhadap konflik di Laut Cina Selatan.⁸

Dicantumkannya masalah keamanan untuk pertama kali dalam agenda AMM merupakan pengakuan ASEAN bahwa faktor keamanan menentukan stabilitas dan masa depan kawasan. Dengan dasar itulah ASEAN mengambil inisiatif untuk membentuk Asean Regional Forum (ARF) pada tahun 1993 di Singapura. Asean Regional Forum (ARF) dapat memainkan dua Peran umum yaitu :

1. Sebagai forum mengenai mana agenda-agenda yang bersifat regional dapat dirumuskan
2. Sebagai forum untuk menampung aspirasi regional negara-negara di kawasan dan sebagai forum dimana komitmen untuk menata kembali kawasan dapat diterima.⁹

Dalam aktivitasnya Asean Regional Forum (ARF) akan melalui tiga tahapan yaitu pembentukan rasa saling percaya (*confidence building measures /CBMs*), pembangunan diplomasi preventif (*preventive diplomacy*), dan mekanisme penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Tiga tahapan tersebut merupakan jenjang aktivitas ARF sebagai lembaga multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dan keamanan yang dapat mengganggu kestabilan kawasan. Ada beberapa titik rawan pasca perang dingin yang menyangkut sengketa teritorial dan klaim yang tumpang tindih terhadap suatu wilayah , salah satu konflik yang mengkhawatirkan adalah konflik Laut Cina Selatan (LCS). Seperti yang digambarkan oleh Yann Huei Song:

⁷ Bantarto Bandoro. *Isu Keamanan Asia Pasifik : Rekomendasi Untuk ASEAN Dan Indonesia* Dikutip dari *Analisis CSIS* Tahun XXII No.4, Jakarta, 1993, h.311

⁸ *loc.cit.*

⁹ Bantarto Bandoro, *Agenda...Op.cit.*, h.2

*However, it is believed that the dispute over ownership of the Spratly island in the South China Sea, along with North Korea suspected nuclear weapon program, The People's Republic of China (PRC) possible use of force againsts Taiwan and the situation in Myanmar (Burma)/Kambodia, are the most important security issues affecting peace and security in the Asia Pacific region in the post-cold era.*¹⁰

(Bagaimanapun, dipercayai bahwa persengketaan tentang kepemilikan kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, sama dengan kecurigaan terhadap program nuklir Korea Utara, kemungkinan penggunaan kekerasan oleh Cina terhadap Taiwan, situasi di Myanmar (Burma)/Kambodia, adalah isu keamanan penting yang mempengaruhi kedamaian dan keamanan di Asia Pasifik pasca perang dingin).

Konflik Laut Cina Selatan mempunyai potensi untuk meningkat menjadi konflik bersenjata mengingat masing-masing negara bersikeras untuk memasukkan Spratly maupun pulau-pulau lain di Laut Cina Selatan (LCS) dalam kedaulatan wilayahnya. Asean regional Forum (ARF) tidak mempunyai pilihan lain selain ikut mengambil bagian mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

1. Tujuan dibentuknya Asean Regional Forum (ARF) adalah sebagai forum untuk menangani masalah-masalah politik dan keamanan. Seperti dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, "...Agar tetap relevan dan punya kemampuan untuk menanggapi tantangan akibat perubahan politik dan keamanan yang cepat di kawasan ini, ARF harus menggerakkan gagasan dan aktivitasnya ke depan."¹¹
2. Diantara tiga konflik yang mengkhawatirkan (konflik Semenanjung Korea, konflik Laut Cina Selatan, dan konflik Cina-Taiwan), konflik Laut Cina Selatan (LCS) merupakan konflik yang paling mungkin ditangani oleh Asean Regional Forum (ARF). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Cina mulai membuka diri untuk melakukan berbagai perundingan baik secara bilateral maupun multilateral, perundingan secara bilateral dilakukan oleh Cina dengan negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan lainnya. Asisten Menteri Luar Negeri Cina, Chen Jiang menyatakan bahwa, "Beijing menyetujui pembicaraan

¹⁰ Yann Huei Song, *The US Policy on the Spratly Island and the South China Sea* Dikutip dari *Jurnal Ilmu Politik* Vol.XXV No.3, Jakarta, 1997, h.31

¹¹ *Media Indonesia*. 26 Juli 1999

multilateral mengenai pertikaian maritim, dan Cina juga ASEAN dapat melanjutkan pandangan mengenai bagaimana mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional di Kuala Lumpur pekan depan.¹²

Cina juga memberikan respon yang baik ketika dilakukan berbagai upaya untuk mengelola potensi konflik di Laut Cina selatan (LCS) menjadi kerjasama, sejak lokakarya yang pertama mengenai pengelolaan konflik di Laut Cina Selatan (LCS) Cina mendukung diadakannya lokakarya serupa secara berkala dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan.

Keterbukaan Cina meskipun terbatas terhadap keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS) merupakan angin segar bagi Asean Regional Forum (ARF) untuk mengusahakan langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengketa ini. Asean Regional Forum (ARF) harus menerima tanggung jawab ini sebagai upaya untuk memantapkan posisinya sebagai forum dialog multilateral masalah politik dan keamanan kawasan sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara anggotanya, bahwa mereka bisa mengandalkan Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi.

Langkah-langkah yang diambil oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam proses penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS) berhubungan dengan peningkatan substansi kerjasama ARF dari *confidence building measures* (CBMs) ke tahap diplomasi preventif. Peningkatan substansi kerjasama ini disepakati dalam pertemuan ARF keempat, dimana disetujui untuk memasuki tahapan diplomasi pencegahan (diplomasi preventif). Salah satu fungsi diplomasi preventif adalah mencegah dan mengelola sengketa Laut Cina Selatan (LCS) sedemikian rupa sehingga tidak berkembang menjadi konflik bersenjata yang lebih besar yang membahayakan kestabilan kawasan. Respon Asean Regional Forum (ARF) terhadap sengketa Laut Cina Selatan (LCS) menentukan efektifitas Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog multilateral masalah politik dan keamanan yang representatif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.

¹² Kompas. 12 Desember 1997

Thailand pada tanggal 27 Juli 2000. Batasan waktu tidak mengikat, data-data yang relevan tapi di luar batasan waktu dapat di masukkan, sebagai upaya untuk memberikan penjelasan yang mendalam pada penulisan ilmiah ini.

I.3 Permasalahan

Sebuah penelitian bersumber dari adanya permasalahan. Dengan adanya permasalahan peneliti dapat lebih terarah dalam melakukan penelitian. Menurut The Liang Gie, permasalahan adalah, "...kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja melainkan kita ingin menyatakan dengan lebih dalam".¹⁴

Dengan definisi diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah langkah-langkah Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme diplomasi preventif dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ?

I.4. Kerangka Dasar Teori

Suatu permasalahan membutuhkan sebuah solusi, untuk mencari solusi diperlukan suatu teori maupun konsep yang bisa mendukung hipotesis yang diajukan. Mc Cain dan Segal dalam buku Mohtar Mas' oed menjelaskan teori sebagai:

Serangkaian *statemen* yang saling berkaitan ... (yang terdiri dari): 1. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu, 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain, 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa *statemen* teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (Hipotesa).¹⁵

Atau secara sederhana Mohtar Mas' oed menjelaskan berteori "...sebagai pekerjaan mendiskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin

¹⁴ The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, kedudukan, Lingkup, dan Metodologi*, Yogyakarta, FISIP UGM, h.49

¹⁵ Mohtar Ms' oed, *Il mu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990. h. 187

juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan”.¹⁶ Sedangkan menurut Mohtar Mas'oe'd bahwa yang dimaksud dengan “konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau fenomena tertentu”.¹⁷ Jadi teori menggabungkan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.

Konsep yang digunakan untuk menjelaskan Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah konsep *confidence building measures/CBMs* dan diplomasi preventif. Menurut Raph A. Cossa peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs* adalah “...Upaya-upaya yang dilakukan baik formal, informal, unilateral, bilateral maupun multilateral yang ditujukan untuk mencegah atau menyelesaikan ketidakpastian antar negara, termasuk di bidang politik dan ekonomi”.¹⁸

Menurut lembar tambahan A (*Annex A*) prinsip-prinsip dalam *confidence building measures/CBMs*, “...Pengembangan seperangkat prinsip-prinsip untuk mendorong suatu pengertian bersama dan pendekatan hubungan antara negara, Adopsi pendekatan keamanan komprehensif”.¹⁹ Pendekatan keamanan komprehensif adalah konsep keamanan yang diterapkan ditingkat domestik, regional, dan global. Penekanannya kepada penggunaan kekuatan militer secara minimal tapi memprioritaskan pada isu-isu dasar, seperti politik, ekonomi, dan sosial dalam agenda-agenda keamanan.

Dalam pengembangannya *confidence building measures/CBMs* akan melalui empat tingkat sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, h. 185

¹⁷ *Ibid.*, h. 93

¹⁸ Raph A.Cossa Dikutip dari Soedjati Djiwandono. *Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy: A South East Asian Perspective* Dalam Jusuf Wanandi, *Regional Security Arrangement: Indonesian and Canadian Views*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 85

¹⁹ Hadi Soesastro & Anthony Bergin, *The Role of Security and Economic Cooperations Structures in The Asia Pacific: Indonesian and Australia Views*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 103

1. *Develop interaction in defendse and security fields to bring out mutual understanding in the strategic views and concepts of each country in the region*
2. *To promote a homogenous transparancy in the region. In the state the readiness for exchange of information should be reinforced*
3. *To develop limited operational cooperation, especially in coordination to face any type of low level threats. There is no doubt that exchange of students from various educational institution is an important part for orderly implementation*
4. *Developing extended operational cooperation. In this stage the establish cooperation can be used to settle international disputes. Since cooperation matur it maybe used to solve matters like logistical communnality, interoperability.*²⁰

(Mengembangkan interaksi di bidang pertahanan keamanan, 2. Mempromosikan transparansi di kawasan ini, 3. Mengembangkan kerjasama yang terbatas, 4. Pengembangan Perluasan kerjasama)

Dalam Asean Regional Forum (ARF) peningkatan *confidence building measures/CBMs* akan melalui dua jalur yaitu, jalur pertama (*track one*) oleh pejabat-pejabat senior dalam Asean Regional Forum (ARF). Untuk membantu pengembangan *confidence building measures* dibentuk dua badan pembantu Asean Regional Forum (ARF) yaitu *Intersessional Group on Confidence building measures* (ISG CBMs). Pengembangan *confidence building measures/CBMs* juga melalui *Intersessional Meeting* (ISM mengenai SAR, penanggulangan bencana, dan pemeliharaan perdamaian). Sedangkan upaya secara informal melalui jalur kedua (*track two*) yaitu lembaga atau pusat studi antar negara yang tergabung dalam CSCAP (*Conference on Security Cooperation in Asia Pacific*). Melalui CSCAP *confidence building measures/CBMs* yang perlu dikembangkan adalah:

1. Pengembangan suatu pendekatan komprehensif terhadap keamanan
2. Konsolidasi dari kerjasama yng sudah berjalan (latihan militer bersama secara bilateral dan pada tingkat tertentu, trilateral pertukaran kunjungan dan program latihan
3. Perluasan kegiatan kerjasama (terutama di bidang militer)
4. Memperbesar bantuan kepada berbagai proses dialog yang sudah ada
5. Peningkatan pertukaran prosedur dan informasi untuk memperbesar transparansi

²⁰ R.M.Sunardi. *Regional Security Cooperation And The Future of The Asean Regional Forum*
Dikutip dari *Ibid*, h. 109

6. Pengembangan mekanisme tertentu bagi aksi bersama²¹

Menurut Inis Claude Jr. diplomasi preventif adalah, "...Ia merupakan fungsi penetral, untuk dijalankan sejauh mungkin oleh negara-negara yang sikap tidak memihaknya dalam perang dingin diimbangi oleh komitmen untuk membuat PBB sebagai penyeimbang hubungan internasional yang efektif dalam era perang dingin".²²

Sekalipun konsep diplomasi preventif dilihat sebagai bagian dari sistem PBB, diplomasi preventif itu sendiri sebenarnya dapat dijalankan oleh aktor lain termasuk organisasi regional.

Menurut Bantarto Bandoro bahwa diplomasi preventif diarahkan pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. "Dalam jangka pendek diplomasi preventif bertujuan menyelesaikan suatu sengketa yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi konfrontasi militer, sedangkan tujuan jangka panjang bertujuan mencegah penggunaan senjata sebagai alat untuk menyelesaikan suatu sengketa".²³ Instrumen diplomasi preventif dikelompokkan menjadi dua, yaitu langkah-langkah pada masa damai dan respon pada masa krisis.

Langkah-langkah pada masa damai adalah :

1. *Confidence Building* (pembangunan rasa saling percaya)
2. *Institution Building* (pembangunan institusi/mekanisme)
3. *Early Warning* (peringatan awal)

Langkah-langkah pada waktu krisis adalah :

1. *Fact Finding* (eksplorasi fakta)
2. *Good Offices* (lembaga yang kredibel)
3. *Crisis Management* (manajemen krisis)
4. *Preventive Deployment* (pengurangan penggunaan senjata)²⁴

Menurut pertemuan para menteri ARF ketujuh (27 Juli 2000) di Bangkok Thailand, definisi diplomasi preventif adalah :

1. *To Help prevent disputes and conflicts from arising between states that could potentially pose a threat to regional peace and stability*
2. *To help prevent such disputes and conflicts from escalating into armed confrontation*

²¹ CPF. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta, 1997, h. 296

²² SL.Roy, *Diplomasi*, Terjemahan Herwanto dan Mirsawati. Rajawali Press, Jakarta, 1981. h.162

²³ Bantarto Bandoro, *Asean dan Diplomasi Preventif di Asia Pasifik* Dikutip dari *Analisis CSIS* ...*Op.cit.*, h. 510

²⁴ *Loc.cit.*

3. *To help minimize the impact of such disputes and conflict on the region.*²⁵

- (1. Diplomasi preventif berusaha menjaga agar konflik yang terjadi antara dua negara tidak menjadi ancaman bagi kestabilan kawasan,
2. Menjaga agar konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik bersenjata, 3. Memimalisasi konflik yang serupa di kawasan.)

Menurut Simon S.C. Tay ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan dalam diplomasi preventif adalah:

1. *International appeals or pressures directed on violators*
2. *Fact Finding missions, on site-monitoring*
3. *Bilateral discussion or negotiation between parties*
4. *Third-party informal diplomatic consultation*
5. *Track two diplomacy by non-official, non-govermental individuals or organizations*
6. *Good offices of a third party*
7. *Commission of inquiry*
8. *Economic or political assistance or incentives*²⁶.

(Tekanan yang diarahkan pada pihak-pihak yang bertikai, Pencarian fakta sejak awal dan menyeluruh, Perundingan secara bilateral antara pihak yang terlibat pertikaian, Melibatkan pertimbangan dari pihak ketiga, Memanfaatkan lembaga-lembaga selain pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi preventif, Pihak ketiga yang mempunyai kredibilitas, Komisi pemeriksaan, kondisi ekonomi dan politik yang baik)

Metode-metode dalam diplomasi preventif adalah :

1. *Confidence Building Effort, effort to build mutual trust and confidence between states*
2. *Norms Buildings, nurturing of accepted codes or norms of behavior guiding the relationships among states in the Asia -Pacific region*
3. *Enhancing Channels of Communication : open, easy and direct communication or channels among ARF participants which serve to promote transparency with a view to avoid misperception or misunderstanding*
4. *Role of the ARF Chair, The ARF Chair could play a role as determined by ARF members.*²⁷

(Adanya rasa saling percaya, nilai-nilai dan norma-norma, komunikasi yang terbuka guna menghindari salah persepsi dan salah pengertian, komitmen yang disepakati oleh anggota-anggota Asean Regional

²⁵ *Seventh Asean Regional Forum Ministerial Meeting 27 Juli 2000, Dalam <http://www.aseansec.org>, Diakses tanggal 27 Desember 2001*

²⁶ *Simon SC.Tay, Preventive Diplomacy And The Asean Regional Forum:Principles and Possibility* Dikutip dari Desmond Ball & Amitav Archarya, *The Next Stage...Op.cit.*, h.174

²⁷ *Ibid.*, h.175

Forum (ARF), 4. Peran yang dimainkan Asean Regional Forum/ARF)

Tiga tahapan yang harus dilakukan oleh Asean Regional Forum adalah *confidence building measures/CBMs* (Pembangunan Rasa Saling Percaya), *Preventive Diplomacy* (Diplomasi Preventif), *Conflict Resolution* (Pendekatan Penyelesaian Konflik) merupakan instrumen-instrumen untuk mencapai kestabilan kawasan. Saat ini Asean Regional Forum (ARF) memasuki tahap diplomasi preventif sambil terus menjalankan CBMs. Sebenarnya *confidence building measures / CBMs* mengalami *overlap*/ tumpang tindih dengan diplomasi preventif, hal ini disebabkan CBM merupakan salah satu upaya dari kegiatan diplomasi preventif.

Terbentuknya rasa saling percaya diantara anggota-anggota ARF akan mendorong setiap usaha diplomasi untuk mencegah timbulnya konflik dan mengeliminasi meluasnya konflik yang membahayakan bagi kestabilan kawasan. Berubahnya tahapan ARF dari CBMs menjadi diplomasi preventif ditegaskan dalam pertemuan Asean Regional Forum (ARF) keempat tanggal 27 Juli 1997 di Petaling Jaya Malaysia. Para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Asean Regional Forum sepakat untuk meningkatkan substansi pertemuan Asean Regional Forum (ARF) dari CBMs menjadi diplomasi preventif dengan tetap menekankan pendekatan konsensus dan Asean tetap menjadi *primary driving force* (kekuatan pendorong utama) dalam Asean Regional Forum (ARF).

Pengalaman ASEAN selama lebih dari 20 tahun dalam melaksanakan diplomasi preventif dapat diadopsi secara terbatas oleh Asean Regional Forum(ARF). Ada beberapa langkah yang bisa dilihat dalam diplomasi preventif yang telah dilaksanakan oleh ASEAN, yaitu tidak menggunakan instrumen kekerasan atau militer dalam hubungan antar negara terutama dalam mengelola konflik yang terjadi di Pasifik, tidak campur tangan dalam persoalan internal negara lain, menggunakan mekanisme dialog atau konsultasi dan akomodasi untuk mempererat hubungan dalam ASEAN, dan lebih mengutamakan dialog-dialog secara informal dan lebih fleksibel. Cara-cara ASEAN ini dituangkan

dalam *the Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan diplomasi preventif di ASEAN itu sendiri.

Pengembangan *confidence building measures/CBMs* di Laut Cina Selatan akan dilakukan dengan pelaksanaan berbagai kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral antara negara-negara yang bersengketa untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah ini dan juga kerjasama di bidang-bidang lain yang diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara yang bersengketa dan negara-negara pengguna Laut Cina Selatan (LCS). Sedangkan pelaksanaan diplomasi preventif dengan terus mengupayakan pengembangan *confidence building measures/CBMs*, juga pengembangan *code of conduct* di Laut Cina Selatan dalam rangka mencegah terjadinya konfrontasi bersenjata.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Menurut Winarno Surachmad, hipotesis adalah, "Suatu jawaban duga yang dianggap benar, kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar, bila dengan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hipotesa itu benar, dicapailah konklusi dan pada saat itu hipotesa berhenti menjadi hipotesa".²⁸

Dalam hubungannya dengan permasalahan atau problematika yang penulis ajukan untuk mengkaji langkah-langkah yang diupayakan Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme diplomasi preventif dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS), penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

Asean Regional Forum (ARF) dalam proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) melakukan langkah-langkah peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs* yang dilakukan dengan pembahasan kerjasama di bidang maritim, SAR, penanggulangan bencana, dan pemeliharaan perdamaian diantara negara-negara anggota Asean Regional Forum (ARF). Sedangkan Pelaksanaan diplomasi preventif atau

diplomasi pra krisis yang dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam proses penyelesaian sengketa laut Cina Selatan (LCS) adalah mendukung pengembangan pedoman tata sikap regional (*code of conduct*), pembentukan pusat penelitian dan informasi regional dan pendaftaran para ahli diplomasi preventif

I.6. Metode Penelitian dan Pendekatan

I.6.1 Metode Penelitian

Pengertian metode menurut The Liang Gie adalah,

Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran yang dibuat menjadi gejala tersebut.²⁹

Metode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data

I.6.1.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur / *library Research*. Pengumpulan data sedang dan telah dilakukan penulis di perpustakaan dan lembaga terkait :

1. Centre for Strategic of International Studies (CSIS) di Jakarta,
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember di Jember,
3. Perpustakaan FISIPOL Universitas Jember,
4. Situs-situs di Internet.

I.6.1.3 Metode Analisis Data

Dari data-data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga akan mendapatkan gambaran dan penjelasan yang memadai tentang obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan penjelasan dan kesimpulan yang baik, penulis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif yang dikenal dengan cara berfikir reflektif.

²⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito. Bandung, 1994, h.68

²⁹ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, h.83

Menurut Prof. Dr. Sutrisno Hadi, cara berfikir reflektif adalah :

Berfikir reflektif mulai dengan induksi untuk menunjukkan persoalan atau menetapkan hipotesis, kemudian diikuti deduksi guna meletakkan kerangka atau jalan untuk pembuktian hipotesis yang dibuatnya itu. Selanjutnya hipotesis itu perlu dibuktikan kebenarannya dengan induksi sehingga diperlukan pemecahan dan konklusi.³⁰

Secara ringkas pengertian masing-masing sebagai berikut :

Metode Induksi adalah berangkat dari fakta atau peristiwa khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan berfikir deduktif adalah kebalikan dari metode induksi yaitu berangkat dari generalisasi yang bersifat umum kemudian ditarik ke arah fakta atau peristiwa khusus. Sehingga cara berfikir reflektif adalah berusaha menggabungkan antara metode induksi dan deduksi dengan jalan, mula-mula memandang persoalan ke arah induksi, kemudian menuju ke deduksi, setelah itu untuk menjamin kebenarannya kembali ke arah induksi.

Penggunaan metode induksi dimulai dengan melihat sengketa yang terjadi antara enam negara, yaitu empat negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam) dan dua negar non ASEAN yaitu Cina dan Taiwan dalam memperebutkan pulau-pulau yang ada di laut Cina Selatan. Sedangkan metode deduksi digunakan dengan melihat Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum multilateral yang menangani masalah politik dan keamanan kawasan melalui tiga tahapan yang dilaluinya, yaitu pengembangan *confidence building measures*/CBMs atau pengembangan rasa saling percaya.

Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan diplomasi preventif, yang ditujukan agar sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) tidak meningkat menjadi konflik bersenjata. Untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh Asean regional Forum sebagai forum multilateral masalah-masalah keamanan, diketahui melalui kontribusi yang diberikan oleh forum ini dalam proses penyelesaian sengketa laut Cina Selatan (LCS) sesuai dengan tahapan yang sedang dilaksanakan yaitu pengembangan *confidence building measures*/CBMs dan pelaksanaan diplomasi preventif.

I.6.2 Pendekatan

Pendekatan (*Approach*) diperlukan dalam sebuah karya ilmiah. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa pendekatan sejarah diperlukan karena merupakan alat yang paling penting bagi politik³¹. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan sejarah (*Historical Approach*), karena kenyataan hidup yang terjadi saat ini merupakan hasil pengalaman masa lalu. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan sejarah dimaksudkan untuk melihat perubahan pandangan ASEAN pasca perang dingin terutama dalam menyingkapi isu-isu regional yang berpotensi mengganggu kestabilan keamanan kawasan, dengan membentuk Asean Regional Forum (ARF) sebagai suatu wadah untuk membahas persoalan-persoalan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat langkah-langkah yang diupayakan ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme diplomasi preventif dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS) sejak perubahan substansi kerja sama dari *confidence building measures* (CBMs) ke arah *preventive diplomacy* (diplomasi preventif).

Penulis juga menggunakan pendekatan *Political Geography*, pendekatan ini menekankan pada aspek-aspek geostrategi dalam menjelaskan fenomena-fenomena politis. Pendekatan ini mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, strategi di masa perang atau damai, serta politik luar negeri suatu negara.

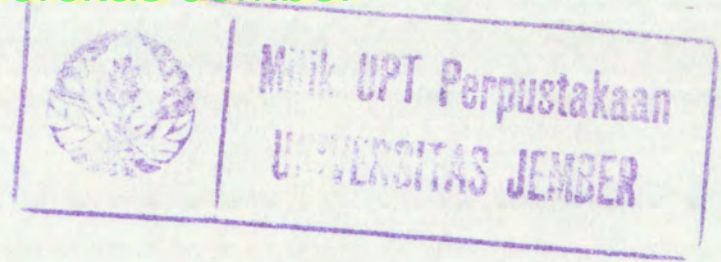
Hal ini ditegaskan oleh Willard Miller sebagai “...*Political geography now plays a vital role in the art of government and the science of strategy in peace and war. The modern world is now an integrated system*”.³²

Dalam kasus Laut Cina Selatan (LCS) pendekatan geografi politik digunakan sebagai alat untuk memahami kebijakan negara-negara pengklaim yaitu empat negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam)

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980. h.38

³¹ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, h. 30

³² The Liang Gie, ... *Op.cit.*, h.83



BAB II

Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Forum Multilateral masalah Politik Dan Keamanan Kawasan

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1991 yang diawali dengan pecahnya Uni Soviet (USSR) menjadi negara-negara kecil yang merdeka juga berakhirnya persaingan ideologis antara dua negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi sebagian besar kawasan di dunia. Pola dunia yang semula bipolar, dimana negara-negara terbagi dalam dua titik ekstrim yang berlawanan yaitu antara blok barat (Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya) berhadapan dengan blok timur (Uni Soviet dan sekutu-sekutunya), menjadi pola yang lebih cair yaitu multipolar. Pada kondisi yang multipolar, keseimbangan kekuatan juga berubah, runtuhnya Uni Soviet menjadi negara-negara kecil, memberikan peluang bagi Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia.

2.1 Peran dan Fungsi Asean Regional Forum (ARF) sebagai Forum Dialog Multilateral Masalah Keamanan

Pasca perang dingin juga mengubah mental negara-negara dalam menyusun konsep keamanannya, jika pada saat perang dingin negara-negara bisa memanfaatkan ketegangan persaingan ideologis dua negara adikuasa tersebut atau dengan kata lain menikmati kestabilan yang relatif maka hal tersebut berubah seiring berakhirnya perang dingin. Pengaruh ini juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ada beberapa kecenderungan ketidakstabilan yang menguat dan dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan keamanan kawasan. Menurut Shi Chunlai ada beberapa masalah keamanan yang dihadapi oleh kawasan ini yaitu :

1. *The impact of the cold war mentality.... However, the influence of the cold war mentality and the old security concept still lingers on*
2. *Our region confronted with teritorial disputes left over by history, and disputes over maritime rights and interest arising with the development modern maritime concept*

3. *Some multilateral issues like the proliferation of weapons of mass destructions (WMD), international terrorism, international smuggling, drug abuse, immigration, and the protection of the ecological environment, should also be taken into consideration in regional security.*¹

(1. sikap mental negara-negara terhadap keamanan nasional dan kawasan masih dipengaruhi atau masih seperti pada saat perang dingin,

2. kawasan ini menghadapi konflik teritorial atau perbatasan wilayah yang dulu diabaikan, konflik tentang hak kelautan dan bermunculannya keinginan-keinginan untuk mengembangkan konsep kelautan yang modern

3. beberapa isu multilateral seperti perkembangan persenjataan penghancur massa (WMD), teroris internasional, penyelundupan, narkoba dan obat-obatan, imigrasi, dan perlindungan, merupakan masalah-masalah keamanan regional)

Beberapa isu tersebut merupakan tantangan bagi keamanan regional sekaligus membuka peluang bagi terciptanya kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan ini yang dianggap mampu mengelola konflik diantara negara-negara anggotanya mengambil inisiatif untuk membentuk Asean Regional Forum (ARF) pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting) pada bulan Juli 1994 di Singapura. Forum ini merupakan forum dialog multilateral untuk membicarakan masalah-masalah politik dan keamanan kawasan. Seperti dikatakan oleh Shi Chunlai, "...*The ARF, as the only track one multilateral forum for security affairs, has gradually developed such as approaches and principles as making decision by consensus, seeking common ground while putting aside differences and making gradual and incremental progress*".² (ARF sebagai jalur pertama dari forum multilateral untuk masalah-masalah keamanan, harus mengembangkan beberapa pendekatan dan prinsip untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus, mencari pengertian bersama di samping tetap menerima perbedaan-perbedaan dan membuat kemajuan yang berarti secara bertahap).

¹ Shi Chunlai. *Preventive Diplomacy and The Asia Pacific Region* Dikutip dari Desmond Ball & Amitav Archarya, *The Next Stage: Preventive Diplomacy & Security Cooperation in The Asia Pacific Region*, Canberra Papers on Strategy & Defence No.131, Canberra, 1999, hal 174 -175

² *Ibid.*, h.180

ARF merupakan forum multilateral untuk mendiskusikan berbagai isu yang mengkhawatirkan bagi kestabilan kawasan, namun saat ini Asean Regional Forum (ARF) belum ditujukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa, hal tersebut akan dilakukan oleh Asean regional Forum (ARF) dalam jangka panjang, karena tahap yang dilalui oleh Asean Regional Forum saat ini adalah peningkatan *confidence building measures/CBMs* dan diplomasi preventif, sehingga penanganan sengketa masih menggunakan dua instrumen tersebut.

Dalam pertemuan Asean Regional Forum (ARF) pertama di Bangkok, Thailand pada tanggal 25 Juli 1994 dikatakan bahwa pengembangan forum dialog tersebut dimaksudkan untuk "... membangun sebuah pola konstruktif yang lebih bisa diprediksi dalam tata hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik".³ Asean Regional Forum (ARF) berfungsi sebagai "alternatif dasar pertahanan keamanan yang strategis dan rasional yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengupayakan pengembangan *confidence building measures/CBMs* dan diplomasi preventif di kawasan Asia Pasifik".⁴

Dalam rangka memberikan kontribusi dalam mewujudkan stabilitas keamanan kawasan, ARF melalui tiga langkah penting yaitu, "berupaya menciptakan transparansi mengenai persepsi keamanan dan strategi, membangun kepercayaan yang saling menguntungkan yang didasarkan pada kemampuan militer dan pengurangannya, mengembangkan "kebiasaan" bekerjasama yang akan mendorong resolusi konflik secara damai".⁵ Dalam pertemuan ketiga ARF (*Third Asean Regional Forum Ministerial Meeting*) yang menyepakati *Asean Regional Forum: A concept paper* yang menyetujui ARF akan melalui tiga tahapan yaitu, "tahap pertama mengembangkan *Confidence Building Measures* (CBMs), tahap kedua mengembangkan mekanisme diplomasi preventif, dan tahap ketiga adalah mengembangkan mekanisme pendekatan konflik".⁶

³ *Chairman Statement The first ARF* Bangkok 25 Juli. 1994, Dikutip dari *Asean Regional Forum Document Series 1994 – 1998, Asean Secretariat*, Jakarta. 1999, h. 3

⁴ Amitav Archarya. *Regional Security in The Asia Pasific Region : Trends and Prospect*, Dikutip dari Jusuf Wanandi (ed), *Regional Security Arrangement: Indonesians and Canadian Views*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 23

⁵ *Ibid.*, h. 24

⁶ *The Asean Regional Forum: A Concept Paper*. Dikutip dalam *Asean ...Op.cit.*, h. 14

Dengan adanya tiga tahapan tersebut memberikan kerangka kerja bagi Asean Regional Forum (ARF) dalam melakukan kegiatannya sebagai forum dialog multilateral masalah-masalah politik dan keamanan di Asia Pasifik.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Asean Regional Forum (ARF) bertujuan untuk mengupayakan adanya persepsi keamanan dan pertahanan diantara anggota-anggotanya dalam pengertian yang luas, membuat agar perilaku *major actor* lebih dapat diprediksi, dan dalam jangka panjang menyediakan sebuah mekanisme untuk membicarakan penyelesaian konflik.⁷

Dalam mewujudkan kawasan Asia pasifik yang stabil, Asean Regional Forum (ARF) akan menghadapi tiga tantangan kunci, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (dan hal ini terjadi di kawasan Asia Pasifik), biasanya diikuti oleh pergeseran secara signifikan hubungan antara kekuatan yang kemudian bisa memicu konflik. Asean Regional Forum (ARF) harus hati-hati menghadapi pergeseran tersebut
2. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat beragam, baik dari segi sistem politik, budaya, sosial, dan sebagainya, oleh karena itu Asean Regional Forum (ARF) harus menyadari dan menerima perbedaan pendekatan dalam mewujudkan kedamaian dan keamanan juga mencoba membiasakan pendekatan konsensus dalam menangani isu-isu keamanan
3. Kawasan ini menyimpan benih-benih serta sisa-sisa konflik yang belum terselesaikan, hal ini bisa memicu meletusnya konflik baru yang lebih hebat, oleh karena itu Asean Regional Forum (ARF) harus bertindak secara gradual dalam menghadapi segala permasalahan.

Menjawab tantangan tersebut Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog politik dan keamanan sangat memerlukan tindakan dan perilaku yang kondusif dari seluruh partisipan Asean Regional Forum (ARF).

⁷ Peter Jennings. *Regional Security Cooperation and the Future Development of The Asean Regional Forum* Dikutip dalam Hadi Soesastro & Anthony Bergin (eds), *The Role of Security and Economic Cooperations Structures in the Asia Pasific Region*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 94

Saat ini anggota ARF berjumlah 21 negara, yaitu, seluruh anggota ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, sepuluh negara mitra dialog ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Eropa, Rusia, Cina, India, dan empat negara berstatus peninjau, Laos, Kamboja, Papua Niugini, Myanmar).⁸

Beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh partisipan ARF, antara lain:

1. Bekerja lebih keras untuk menjamin dan memelihara lingkungan yang damai, makmur, dan stabil di kawasan Asia Pasifik.
2. ARF harus menjadi sebuah forum dialog yang terbuka dan konsultasi untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan keamanan juga rekonsiliasi pandangan yang berbeda diantara anggota-anggotanya dalam rangka mengurangi resiko keamanan
3. Anggota-anggota ARF harus menyadari bahwasanya konsep keamanan komprehensif tidak hanya, melibatkan aspek militer namun aspek politik, sosial, budaya, dan aspek-aspek yang lainnya.⁹

Sebagai organisasi yang relatif baru dan belum mempunyai pedoman dalam penanganan sengketa yang terjadi, maka posisi ASEAN sebagai *primary driving force* (kekuatan pendorong utama) diperlukan, dengan kata lain beberapa pendekatan ASEAN dapat dilakukan secara terbatas. Hal ini didasarkan pada reputasi ASEAN yang cukup bagus dan diakui oleh negara-negara non ASEAN dalam mengelola konflik intra ASEAN, Dewi Fortuna Anwar menegaskan bahwa “ASEAN merupakan organisasi paling berhasil setelah Uni Eropa”.¹⁰

Dengan salah satu alasan tersebut maka dalam pertemuan kedua ARF di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada 1 Agustus 1995 dinyatakan bahwa ASEAN mempunyai posisi yang dapat membantu merumuskan pedoman-pedoman penanganan sengketa yang dihadapi oleh Asean regional Forum (ARF). ASEAN mempunyai reputasi yang bagus dalam mengembangkan kerjasama di wilayah yang banyak mempunyai perbedaan di sub wilayah Asia Pasifik yaitu Asia Tenggara.

⁸ F.Andrea. *Peran Keamanan Asean Regional Forum* Dikutip dalam Bantarto Bandoro, *Agenda... Op.cit.*, h. 76

⁹ *Asean Regional Forum... Op.cit.*, h.8

Meskipun keberadaan ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF) sangat mendukung dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor untuk mewujudkan tujuan ARF, faktor yang tidak kalah penting adalah tindakan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota ARF.

2.2 Instrumen Dasar Asean Regional Forum (ARF)

Tujuan Asean Regional Forum (ARF) untuk menciptakan lingkungan keamanan yang kondusif dan stabil di Asia Pasifik memerlukan suatu kerangka kerja yang pasti dan bertahap, oleh karena itu pada pertemuan ARF kedua di Bandar Sri Begawan, Brunei Darrussalam yang menyepakati *the Asean Regional Forum: A concept paper* ditegaskan bahwa ARF akan melalui tiga tahap, yaitu

2.2.1 Pengembangan *Confidence Building Measures* (CBMs)

Konsep CBMs yang dipahami di Eropa (CSCE) lebih bernuansa militer, "...dimana harus ada pemberitahuan pendahuluan dari manuver-manuver dan aktivitas militer utama, pertukaran pengamat, juga undangan gelar militer dari suatu negara dalam suatu kondisi yang menguntungkan".¹¹ Sedangkan bagi kawasan Asia Pasifik, *confidence building measures/CBMs* merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman karena adanya ketidakpastian yang melanda kawasan ini pasca perang dingin.

Pada dasarnya *confidence building measures/ CBMs* bertujuan untuk menciptakan saling kepercayaan antar negara, diharapkan dengan adanya kondisi saling percaya dan persepsi keamanan yang sama akan mengurangi saling curiga antar negara yang berdampak pada penurunan potensi konflik bersenjata yang dapat mengganggu kestabilan kawasan, atau *confidence building measures/ CBMs* ditujukan untuk menurunkan kemungkinan konflik bersenjata yang tidak diinginkan dan hal ini dimungkinkan karena negara menjadi lebih sadar akan perspektif strategis negara tetangganya atau lawan potensialnya.

¹⁰ Dewi Fortuna Anwar. "Dinamika Politik dan Keamanan Internasional: Fokus Asia Pasifik" Dalam *Isu-Isu Strategis Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*. PPW-LIPI. Jakarta. 1997. h.20

¹¹ Soedjati Djiwandono. *Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy*. Dalam Jusuf Wanandi. *Regional...Op.cit.*, h.85

Sasaran *confidence building measures/ CBMs* adalah mengurangi ketegangan dan kecurigaan, mengurangi resiko konflik bersenjata, baik sebagai akibat dari suatu kecelakaan, maupun sebagai salah perhitungan, mengembangkan komunikasi dan kerjasama untuk mengurangi penggunaan kekuatan militer; meningkatkan saling pengertian tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan masing-masing pihak, serta mengembangkan pengertian *strategic confidence* di kawasan Asia Pasifik¹².

Asean Regional Forum (ARF) diproyeksikan sebagai instrumen *confidence building measures/CBMs* dan diplomasi preventif, oleh karena itu Asean Regional Forum (ARF) harus melakukan langkah-langkah:

1) pembangunan kepercayaan dengan melakukan kerjasama di bidang *peacekeeping*, termasuk pusat pelatihan *peace keeping*, pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Laut dan diplomasi preventif; 2) membuat konsep keamanan yang komprehensif yang mencakup aspek ekonomi dan sosial; 3) membuat norma dan prinsip yang berkaitan dengan kerjasama regional dan internasional.¹³

Dalam mengembangkan *confidence building measures/CBMs*, Asean Regional Forum (ARF) melalui dua pendekatan yaitu, pendekatan pertama dari pengalaman ASEAN, dimana nilai-nilai tersebut dapat digunakan secara terbatas sebagai pedoman oleh Asean Regional Forum (ARF).

Nilai-nilai ASEAN tersebut antara lain, penerapan kebiasaan konsultasi dan konsensus (musyawarah dan mufakat) yang didukung pula dengan saling mengunjungi secara rutin antar pejabat tinggi antara negara-negara ASEAN, pola kunjungan ini efektif dalam mengembangkan diplomasi preventif, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) sebagai norma dan nilai untuk mengatur hubungan antar negara di Asia tenggara bisa diadopsi oleh anggota-anggota Asean Regional Forum (ARF).¹⁴

Dalam pertemuan pertama di Bangkok, Thailand pada tanggal 25 Juli 1994 yang menyetujui prinsip dan tujuan dari TAC sebagai pedoman dalam hubungan antar negara dan sebagai alat untuk mengembangkan *confidence building measures/CBMs*, diplomasi preventif, juga kerjasama politik dan keamanan. Beberapa kebaikan dalam nilai-nilai ASEAN dalam mengembangkan *confidence*

¹² CPF.Luhulima. *Masa Depan Asean Regional Forum (ARF)* Dikutip dalam Bantarto Bandoro (ed), *Agenda...Op.cit.*, h.93

¹³ CPF.Luhulima, *CBM Menuju Masa Depan*, CSIS, Jakarta, 1996, h.295

¹⁴ *Asean Regional Forum... Op.cit.*, h. 15

building measures (CBMs) dapat digunakan secara terbatas oleh Asean Regional Forum (ARF) sebagai instrumen *confidence building measures*/CBMs dan diplomasi preventif. Pendekatan kedua adalah implementasi *confidence building measures*/CBMs secara konkrit.

Pertemuan kedua di Bandar Sri Begawan, Brunei Darrussalam, disahkan dua proposal *confidence building measures*/CBMs yaitu *annex A* (lembaran tambahan A) berisi kriteria yang harus diimplementasikan oleh ARF dalam jangka pendek, serta *annex B* (lembaran tambahan B) untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Usulan-usulan mengenai implementasi *confidence building measures*/CBMs akan melalui dua jalur yaitu jalur pertama (*track one*) dengan membentuk beberapa badan antar pemerintah, antara lain:

1. *Intersessional Support Group* (ISG) *on confidence building measures*/CBMs yang mencakup bidang dialog tentang persepsi keamanan dan makalah-makalah kebijakan pertahanan
2. *Intersessional Meeting* (ISM) yang mencakup masalah-masalah, *Search and Rescue* (SAR), *relief disaster* (pemulihan bencana alam), *peacekeeping operation* (operasi pasukan pemelihara perdamaian).¹⁵

Jalur kedua melalui lembaga penelitian strategi dan lembaga non pemerintah yang terkait dari semua negara anggota ARF, lembaga non pemerintah yang mendukung proses ARF adalah ASEAN-ISIS (ASEAN- *Institute of Strategic and International Initiatives*) dan CSCAP (*Conference on Security and Cooperation in Asia and the Pacific*).

Implementasi *confidence building measures*/CBMs dalam jangka pendek antara lain:

- 1) mengembangkan seperangkat prinsip dasar untuk meningkatkan pengertian bersama dalam hubungan antar negara di kawasan; 2) mengadopsi pendekatan keamanan komprehensif; 3) membicarakan mengenai persepsi keamanan termasuk kebijakan keamanan masing-masing negara; 4) pemberitahuan kebijakan keamanan, seperti penerbitan kertas putih pertahanan atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk

¹⁵ CPF.Luhulima. *Masa Depan Asean Regional Forum (ARF)* Dikutip dalam Bantarto Bandoro (ed), *Agenda dan Penataan... Op.cit.*, h.90

pemerintah yang bersangkutan; 5) berpartisipasi dalam pendaftaran persenjataan konvensional pada UN *Conventional Arms Register* (komisi persenjataan PBB); 6) meningkatkan interaksi dengan saling mengunjungi antara pejabat tinggi negara-negara anggota ARF; 7) pertukaran dan pelatihan antara pejabat tinggi militer negara-negara anggota 8) peninjauan latihan militer; 9) seminar rutin mengenai pertahanan dan isu-isu keamanan regional dan internasional.¹⁶

Implementasi CBMs jangka menengah dan jangka panjang adalah:

1) peningkatan lebih lanjut pendaftaran senjata konvensional; 2) pembentukan pusat kajian keamanan regional; 3) pusat informasi kelautan; 4) kerjasama mengenai jalur komunikasi laut, dimulai dengan pertukaran informasi dan mengadakan pelatihan SAR, kontrol terhadap pembajakan, dan penyelundupan obat-obatan; 5) membuat sebuah mekanisme bantuan bila terjadi bencana alam; 6) memantapkan daerah kerjasama seperti di wilayah Laut Cina Selatan 7) sistem pemberitahuan pendahuluan dalam pengurangan kapasitas militer; 8) mengembangkan kebiasaan untuk memberitahukan tujuan produksi dan penjualan persenjataan dari suatu negara.¹⁷

Urutan kerja yang jelas tentang implementasi *confidence building measures/* CBMs akan membuat langkah-langkah yang akan dilakukan ARF terarah dan sistematis dalam mewujudkan *confidence building measures/* CBMs yang mampu mengendalikan perilaku negara-negara dalam menjalin hubungan, agar tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa yang dapat mengancam kestabilan kawasan.

2.2.2 Pembangunan Diplomasi Preventif

Pada saat perang dingin diplomasi preventif adalah sebuah sarana yang penting bagi PBB untuk mengelola persaingan ideologis yang terjadi antara blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet) agar konflik tersebut tidak mengarah pada konfrontasi bersenjata yang terbuka. Diplomasi preventif pada masa perang dingin dipandang sebagai kebijakan pembendungan internasional, agar konflik tersebut tidak meluas.

Konsep diplomasi preventif pertama kalinya diartikulasikan oleh sekretaris jenderal PBB Dag Hammarskjold yang melihat diplomasi preventif sebagai cara

¹⁶ *Asean Regional Forum... Op.cit.*, h.19

¹⁷ *Ibid.*, h.21

mengisolasikan konflik regional dari persaingan antara negara-negara adidaya. Hal tersebut berkaitan dengan dengan peran PBB untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Tujuan utama diplomasi preventif pada masa perang dingin adalah, "...Mencegah timbulnya sengketa dan konflik di dalam dan antar negara, mencegah eskalasi sengketa dan konflik menjadi konfrontasi bersenjata yang terbuka, membatasi intensitas kekerasan yang berasal dari suatu konflik dan mencegah meluasnya kekerasan itu".¹⁸

Berakhirnya perang dingin membuat konsep diplomasi preventif harus direvisi. Diplomasi preventif saat ini bukan semata-mata monopoli dari fungsi PBB dalam mengatasi dan mengelola konflik internasional dan regional, namun diplomasi preventif bisa dijalankan oleh aktor lain seperti organisasi regional dalam menangani konflik di kawasannya yang mulai mencuat semenjak berakhirnya konfrontasi ideologis antara barat dan timur.

Boutros-Boutros Ghali mendefinisikan diplomasi preventif sebagai suatu "Tindakan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik antar negara atau wilayah, menjaga agar konflik yang terjadi tidak meningkat menjadi konflik bersenjata, dan membatasi meluasnya konflik ketika konflik tersebut telah terjadi".¹⁹

Aplikasi dari diplomasi preventif lebih mengutamakan tindakan non kekerasan (*non coercive*) seperti yang terdapat pada pasal 33 piagam PBB. Tindakan-tindakan dalam diplomasi preventif melalui "...Perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri".²⁰

Dalam pertemuan kedua Asean Regional Forum (ARF) di Bandar Sri Begawan, Brunei Darrussalam, tahun 1995, tahap kedua yang harus dilalui oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam mewujudkan kestabilan kawasan adalah mengembangkan diplomasi preventif. Kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan yang

¹⁸ Bantarto Bandoro. *ASEAN dan Diplomasi Preventif di Asia Pasifik* Dikutip dari *Analisis CSIS ...Op.cit.*, Jakarta, 1996, h. 509

¹⁹ Simon SC Tay, *Preventive Diplomacy and The Asean Regional Forum : Principles and Possibility*, Dikutip dari Desmond Ball & Amitav Archarya, *The Next Stage ...Op.cit.*, h.120

²⁰ Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional*, Jakarta, h.20

majemuk, berkembangnya beberapa negara di kawasan ini, terutama kapabilitas militernya, sengketa wilayah perbatasan yang diklaim oleh beberapa negara cukup mengkhawatirkan bagi terjadinya konflik terbuka di kawasan ini. Munculnya Asean Regional Forum (ARF) diharapkan bisa menjadi instrumen diplomasi preventif untuk membicarakan masalah-masalah politik dan keamanan kawasan.

Pada pertemuan Asean Regional Forum (ARF) keempat tanggal 27 Juli 1997 di Subang Jaya, Malaysia, disepakati bahwa "ARF akan meningkatkan substansi kegiatannya dari *confidence building measures/CBMs* menjadi diplomasi preventif".²¹ Peningkatan substansi kerjasama dari *confidence building measures/CBMs* ke diplomasi preventif bukan merupakan tahapan yang terpisah, melainkan keduanya akan tumpang tindih (*overlapp*). Dimulainya implementasi diplomasi preventif akan selalu diikuti oleh upaya-upaya transparansi dalam rangka meningkatkan kepercayaan antar negara, tingkat kepercayaan yang tinggi melalui implementasi *confidence building measures/CBMs* akan mendukung suksesnya pelaksanaan diplomasi preventif.

Dalam rangka pelaksanaan diplomasi preventif, Asean Regional Forum (ARF) memerlukan *code of conduct* yang merupakan pedoman dalam mengatur perilaku dan hubungan antar negara.

Dalam penyusunan ke arah *code of conduct* tersebut maka pada pertemuan ARF I diabsahkan tujuan dan prinsip Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*ASEAN Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*) sebagai *code of conduct* bagi pengembangan hubungan antar negara anggota ARF dan sebagai instrumen diplomasi preventif serta kerjasama di bidang politik dan keamanan regional dan diplomasi preventif.²²

²¹ *Asean Regional Forum...Op.cit.*, h.67

²² CPF.Luhulima. *Masa Depan Asean Regional Forum (ARF)* Dikutip dari Bantarto Bando (ed), *Agenda Dan Penataan... Op.cit.*, h.88

Dalam TAC itu sendiri terdapat beberapa nilai-nilai ASEAN, antara lain,

1) penghargaan timbal balik terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial; 2) hak setiap negara untuk membebaskan dirinya dari campur tangan asing, subversi, koersi; 3) non intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara; 4) penyelesaian perbedaan dan sengketa secara damai; 5) penolakan ancaman penggunaan kekuatan²³.

Penggunaan TAC yang sarat dengan nilai-nilai ASEAN menimbulkan pro dan kontra, namun di lain pihak nilai-nilai ASEAN yang notabene beranggotakan negara-negara kecil dan menengah relatif bisa diterima oleh negara-negara besar di kawasan seperti, Cina, lain halnya jika inisiatif tersebut berasal dari negara-negara besar yang terlibat di kawasan ini, misalnya Amerika Serikat, maka akan timbul kecurigaan tentang adanya hegemoni baru. Disepakatinya ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama (*primary driving force*) secara terbatas dalam Asean Regional Forum (ARF) meminimalisasi kecurigaan tersebut. Langkah-langkah implementasi diplomasi preventif dijabarkan dalam *Annex A* dan *Annex B*.

Implementasi diplomasi preventif dalam jangka pendek (*Annex A*) adalah:

1. Mengembangkan seperangkat prinsip penyelesaian konflik secara damai, berdasarkan piagam PBB dan TAC
2. Mempromosikan dan mengakui prinsip-prinsip dan tujuan yang ada dalam TAC mengenai penyelesaian persengketaan secara damai seperti yang terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) pada 9 Desember 1992
3. Mendukung deklarasi ASEAN tentang konflik Laut Cina Selatan dalam rangka memberikan dukungan secara moral dan politik.²⁴

Implementasi diplomasi preventif dalam jangka menengah dan jangka panjang (*annex B*) yaitu:

1. Mengeksplorasi langkah-langkah untuk mencegah konflik
2. Mengeksplorasi ide untuk menunjuk perwakilan khusus, dalam rangka dialog dengan anggota-anggota ARF untuk mencari

²³ Bantarto Bandoro. *ASEAN dan Diplomasi Preventif Di Asia pasifik*. Dikutip dari *Analisis CSIS* ... *Op.cit.*, h.512

²⁴ *Asean Regional Forum Document Series*... *Op.cit.*, h.

informasi yang terjadi, sesuai dengan permintaan negara-negara yang terlibat sengketa

3. Memantapkan lembaga-lembaga untuk mencegah dan mengelola konflik seperti yang direkomendasikan dalam Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA), misalnya, pusat pertukaran informasi.²⁵

Rencana jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang yang telah ditetapkan oleh para anggota Asean Regional Forum (ARF) dimaksudkan agar upaya-upaya diplomasi preventif menjadi lebih terarah dan jelas dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

2.2.3 Instrumen Penyelesaian Konflik (*Conflict Resolution*)

Tahap ketiga atau tahap terakhir dari Asean Regional Forum (ARF) adalah mekanisme penyelesaian konflik. Tahap ini merupakan tahap yang sulit karena harus bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Untuk menjadikan Asean Regional Forum (ARF) relevan sebagai forum dialog multilateral masalah politik dan keamanan, maka ARF harus merumuskan mekanisme penyelesaian konflik yang benar-benar bisa diterima oleh semua anggota Asean Regional Forum (ARF). Kebutuhan Asean Regional Forum (ARF) akan adanya suatu *code of conduct* dalam menyelesaikan konflik telah direspon oleh ASEAN-ISIS.”...yang telah menyusun suatu dokumen yang berusaha merumuskan norma dan prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam kerjasama politik dan keamanan di kawasan ini, dokumen yang disampaikan ini disebut *Pacific Concord*.²⁶

Usulan-usulan mengenai mekanisme penyelesaian konflik harus konsisten dengan norma dan prinsip dalam piagam PBB juga sedapat mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Jika perluasan mekanisme penyelesaian konflik ASEAN tidak disetujui, dikarenakan diterapkannya prinsip *non intervensi* secara ketat, maka Asean Regional Forum (ARF) harus merumuskan sendiri mekanisme penyelesaian konfliknya.

Sampai saat ini Asean Regional Forum (ARF) belum memasuki pada tahap yang ketiga yaitu pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, karena

²⁵Bantarto Bandoro, *Op.cit.*, h.

²⁶ CPF.Luhulima. *Masa Depan Asean Regional Forum (ARF)* Dikutip dari *Ibid.*, h.102

aktivitas Asean Regional Forum (ARF) masih mengusahakan pengembangan *confidence building measures/ CBMs* dan diplomasi preventif. Diharapkan dengan adanya tingkat kepercayaan dan transparansi yang cukup tinggi juga pelaksanaan diplomasi preventif yang mantap dan berkesinambungan, dalam arti negara-negara ARF sudah bisa mengimplementasikan program kerjanya yang terdapat dalam *annex A* maupun *annex B* tentang *confidence building measures /CBMs* dan diplomasi preventif, maka akan semakin mudah untuk merumuskan mekanisme penyelesaian konflik atau tahap ketiga.

2.3 Konflik Laut Cina Selatan (LCS)

Berbagai potensi konflik yang menguat kembali pasca perang dingin mengkhawatirkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, selain konflik di semenanjung Korea, konflik Laut Cina Selatan juga berpeluang untuk meningkat menjadi konflik terbuka atau konflik bersenjata, kekhawatiran ini didasarkan pada alasan karena konflik ini melibatkan banyak negara pengklaim yaitu beberapa negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Brunei Darrussalam, Vietnam) dan negara-negara non ASEAN yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan.

Masuknya Cina sebagai salah satu negara pengklaim dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik bersenjata, dikarenakan kemampuan militer Cina yang cukup besar, disamping itu keraguan Cina untuk membahas sengketa ini dalam forum multilateral adalah bentuk tindakan Cina yang sulit untuk dikontrol. Perebutan kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan disebabkan di wilayah ini disinyalir terdapat kekayaan alam yang melimpah yang dapat diolah, wilayah ini juga merupakan jalur perhubungan laut yang sangat potensial. Sehingga pengelolaan sengketa di Laut Cina Selatan mutlak diperlukan agar tidak menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan kawasan.

2.3.1 Arti Penting Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan jalur komunikasi laut yang sangat penting, di samping letaknya yang cukup strategis, yang menghubungkan antara samudra Hindia dan samudra Pasifik. Wilayah yang strategis dan berdekatan dengan

beberapa negara menyebabkan klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Kawasan ini akan selalu menjadi fokus perhatian baik dikalangan negara-negara kawasan maupun di luar kawasan, berdasarkan kepentingan masing-masing negara terhadap Laut Cina Selatan, "...Setidaknya ada delapan potensi konflik yang terdapat di laut Cina selatan."²⁷

Pertama, secara ideologis dan sejarah, kawasan ini dibatasi oleh negara-negara komunis dan non komunis yang memiliki sejarah permusuhan dan pertentangan, yaitu RRC dan negara-negara ASEAN. Meskipun perang dingin telah berakhir, permusuhan dan pertentangan antara ideologi komunis dan non komunis akan tetap terjadi bahkan antara negara-negara komunis itu sendiri, dalam kondisi yang demikian rasa curiga akan sulit dihilangkan diantara negara-negara tersebut.

Kedua, secara politis, ASEAN berusaha untuk mencegah terjadinya konflik militer secara terbuka antara Cina dan Vietnam pada tahun 1988 di kawasan ini melalui perundingan. "Padahal dalam perebutan kepulauan Spratly kedua negara ini justru saling berhadapan".²⁸ *Ketiga*, secara strategis, kawasan ini bisa menjadi tempat pangkalan militer dari negara-negara yang meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Keempat, secara ekonomis, Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber mineral, seperti, kobalt, tembaga, timah fosfat, nodul mangan, minyak, dan gas bumi. Di samping potensi mineral, wilayah Laut Cina Selatan juga merupakan potensi perikanan yang sangat besar. "Penangkapan ikan pada akhir dasawarsa 1970-an di wilayah perairan Laut Cina Selatan meliputi 5 juta ton per tahun, dan akan mengalami peningkatan sekitar 3 juta ton dalam satu tahun".²⁹

²⁷ Windratmo. *Penanganan Potensi Konflik Laut Cina Selatan:Harapan dan Perkembangannya*. Dikutip dari *Jurnal Caraka* Vol.I No.1, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1998, h.14

²⁸ *Loc.cit*

²⁹ Peter Polomka. *Ocean Politics in Southeast Asia* Dikutip dari Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, CSIS, Jakarta, 1997, h. 23

Kelima, secara lingkungan Laut Cina Selatan merupakan jalur lalu lintas bagi kapal-kapal, terutama kapal tanker raksasa yang memiliki potensi bagi kerusakan lingkungan. *Keenam*, secara yuridis, kawasan ini menyimpan beberapa potensi konflik, seperti kepemilikan sejumlah pulau atau penentuan garis perbatasan, penentuan batas-batas laut teritorial, zona-zona yang berdekatan (*contiguous zone*), serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.³⁰

Ketujuh, secara sosio kultural, laut Cina selatan baru-baru ini telah menjadi sumber dari masalah pengungsi, lalu lintas narkoba, dan tempat terjadinya perompakan. *Kedelapan*, secara geografis, wilayah laut Cina selatan terdapat 4 gugusan pulau dan karang-karang yaitu Spratly, Paracels, Macclesfield Bank dan Pratas, "...Pusat permasalahan banyak terjadi di Spratly yang merupakan gugusan pulau yang terbesar di Laut Cina Selatan".³¹

Wilayah laut Cina selatan memiliki 4 gugusan pulau yang cukup besar yaitu, 1) gugus kepulauan Paracels, yang terdiri dari dua kelompok pulau yaitu kelompok Amphirite dan kelompok Crescent; 2) gugus kepulauan Spratly yang terdiri dari lebih 100 pulau karang dan pasir dan terbagi dalam 12 kelompok; 3) kepulauan Pratas; 4) gugus kepulauan Macclesfield Bank yang seluruhnya berupa karang.³²

Dari keempat gugusan kepulauan tersebut, kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau yang cukup besar. Potensi yang dimiliki oleh kepulauan Spratly dapat dilihat dari dua hal.

Pertama, dari segi ekonomis, Spratly adalah kumpulan pulau kecil dan pulau karang juga atol yang diduga kaya akan minyak dan sumberdaya lainnya seperti gas bumi, tiram dan mutiara yang bernilai tinggi. Di samping itu Spratly juga merupakan jalur minyak dari Timur Tengah ke Timur Jauh serta merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan Afrika. *Kedua*, dari segi geopolitis, kepulauan ini terletak antara dua ideologi yang bertentangan, yaitu ideologi komunis dan liberal, sedangkan dari segi geostrategi, Kepulauan Spratly terletak diantara jalur silang antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, sehingga dengan posisi tersebut sangat cocok untuk membangun sebuah pangkalan militer.³³

Atas dasar potensi yang dimiliki oleh kepulauan ini, maka klaim yang dinyatakan oleh beberapa negara terhadap Spratly adalah sangat wajar. Klaim

³⁰ Windratmo. *Penanganan... Op.cit.*,h.

³¹ *Loc.cit.*

³² Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik... Op.cit.*,h.2-3

³³ *Pikiran Rakyat*, 11 Maret 1995

tumpang tindih yang menyebabkan persengketaan yang berkepanjangan itu ditujukan untuk meraih arti strategis dari kepulauan ini, adalah hal penting bagi setiap negara pengklaim Spratly untuk menguasainya, sebagai aset negara yang sangat berharga.

2.3.2 Klaim Tumpang Tindih Beberapa Negara Terhadap Kepulauan Spratly

Dalam persengketaan di Laut Cina Selatan, Spratly adalah fokus yang diperebutkan oleh beberapa negara, mengingat berbagai potensi yang dimiliki oleh kepulauan ini. Kepulauan Spratly sampai saat ini dipersengketakan oleh beberapa negara yaitu RRC, Taiwan dan empat negara ASEAN (Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam). Keenam negara tersebut sama-sama mengklaim Spratly sebagai bagian dari wilayahnya, dengan dasar sejarah, penemuan dan pendudukan menurut versi masing-masing negara pengklaim. Cina mendasarkan tututannya pada catatan sejarahnya.

Menurut versi Cina, sejak abad kedua, pada masa pemerintahan Wu Di, dinasti Han, orang-orang Cina sudah mulai berlayar di wilayah Laut Cina Selatan, selama pelayaran tersebut mereka menemukan kepulauan Xisha (saat ini disebut sebagai kepulauan Paracels) dan kepulauan Nansha (Spratly). Kepulauan Xisha dan Nansha terdiri atas banyak pulau kecil dan karang-karang yang mempunyai nama masing-masing.

Misalnya Jiurulozhou (sembilan pulau kecil), Shitang (karang-karang), Qianlishitang (seribu li karang berbatu), Wanlishitang (sepuluh ribu li karang berbatu), Changsa (tanah pasir), Qianlichangsa (seribu li tanah pasir), Wanlichangsa (sepuluh ribu li tanah pasir), dan nama-nama lain pada kedua kepulauan ini. Baru-baru ini di kepulauan Xisha (paracels) diketemukan reruntuhan bangunan, barang-barang tembikar atau barang-barang pecah belah, pisau besi, alat-alat memasak dari besi, dan alat-alat yang digunakan pada masa dinasti Tang dan Song, ditemukan juga adanya sumur-sumur, tempat pemujaan, makam dan relief lain dari dinasti Ming.³⁴

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa sejak dinasti Tang dan Song orang-orang Cina sudah mengolah dan memanfaatkan wilayah Xisha (Paracels)

³⁴ Tang Cheng Yuan. *The Legal Basis of China Sovereignty over the Xisha and Nansha Island*. Dikutip dari *Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea*, Litbang Departemen Luar Negeri, Bandung, 1991, h.243

dan Nansha (Spratly) dengan bermata pencaharian nelayan dan aktivitas produktif lainnya. Selama eksploitasi dan pengembangan kepulauan Xisha (Paracels) dan Nansha (Spratly) oleh orang-orang Cina, maka pemerintah pengganti di Cina memiliki yurisdiksi terhadap dua kepulauan tersebut. Cina juga merujuk pada perjanjian perbatasan antara Cina dan Perancis tahun 1887 (ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) dimana kepulauan Xisha (Paracels) dan Nansha (Spratly) diserahkan pada Cina, sampai paruh abad ke-20.

"...Cina berulang kali menegaskan kedaulatannya atas kepulauan Spratly".³⁵ Klaim berdasarkan catatan sejarah yang dilakukan oleh Cina untuk memberikan legalitas bagi segala tindakannya terhadap kepulauan Spratly di masa yang akan datang, diikuti pula oleh negara-negara pengklaim lainnya.

Taiwan mengajukan tuntutan atas kepulauan Paracels dan Spratly juga berdasarkan sejarah, "...Sejak pemerintahan dinasti Han (mulai sekitar 206 SM) di samping bukti-bukti dari dinasti Song (960-1279) dan Yuan (1282)".³⁶ Dasar klaim yang digunakan oleh Taiwan mempunyai kemiripan dengan dasar klaim Cina karena Taiwan masih mengacu pada kebijakan "satu Cina" yang menganggap bahwa Cina adalah Cina nasionalis yang berkuasa di Taiwan (*Republic of China*).

Sehingga klaim Cina juga merupakan klaim Taiwan, seperti yang dinyatakan oleh Steven Kuan-Tsyh-Yu, bahwa,

Meskipun mereka bersaing dalam politik internasional, dimana masing-masing mengklaim dirinya sebagai representasi Cina secara keseluruhan, dua rezim ini sama-sama menyatakan kedaulatan Cina atas kelompok kepulauan di laut Cina selatan termasuk kepulauan Paracels, sepertinya tidak ada sengketa teritorial diantara mereka.³⁷

Sama halnya dengan dasar klaim yang dinyatakan oleh Vietnam yang merujuk pada catatan sejarah yang dimilikinya. Sejak berabad-abad yang lalu

³⁵ Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik...Op.cit.*, h.4

³⁶ *Ibid.*, h.6

³⁷ Steven-Kuan Tsyh Yu. *Who Own the Paracels and Spratly? An Evaluation of The Nature and Legal Basis of The Conflicting teritorial Claims* Dikutip dari *Workshop on Managing Potential...Op.cit.*, h. 262

tanah bebas yang meliputi, 33 pulau, kanal, tanah berpasir, karang-karang, dan pantai di kepulauan Spratly”.⁴⁰

Malaysia menjatuhkan klaimnya tidak berdasarkan pada catatan sejarah yang dimilikinya namun didasarkan pada hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE), Malaysia mengklaim kepulauan Spratly”... Dengan memasukkan Terumbu Layang-layang (Swallow Reef), dan Ubi (Dallas Reef)”.⁴¹ Klaim Malaysia juga didasarkan pada penjajahan Inggris yang telah menguasai kepulauan tersebut sebagai bagian dari Sabah dan serawak pada abad-18, sehingga klaimnya meluas menjadi ”... Ambiona Cay, Marivelas Reef, Commodore Reef, Southwest Shoal, Ardasier Breakers, Gloucester Breakers, Barque Canada Reef, Lizzie Weber Reef, Northeast Shoal, Glasgow Shoal, dan North Viper Shoal”.⁴²

Sedangkan Brunei Darussalam belum menduduki satu pulau pun, Brunei telah mengajukan tuntutan atas Louisa reef sebagai wilayah yang berada di landas kontinen dan ZEE nya, Brunei telah mengajukan protes terhadap peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Kuala Lumpur pada tahun 1979 yang memasukkan Louisa reef yang disebut sebagai Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia⁴³.

Beberapa klasifikasi dalam klaim tumpang tindih di dalam gugusan kepulauan Spratly.

Pertama, klaim atas semua pulau yang terdapat di kepulauan Spratly oleh Cina, Taiwan, dan Vietnam. *Kedua*, klaim atas pulau-pulau yang berdekatan dengan kepulauan Spratly seperti, Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang telah menduduki beberapa pulau di kepulauan Spratly yang tidak termasuk dalam kepulauan Spratly. *Ketiga*, klaim atas Louisa reefs di bagian paling selatan yang bukan termasuk dalam kepulauan Spratly oleh Malaysia dan Brunei Darussalam.⁴⁴

Semua klaim yang dilakukan oleh beberapa pulau di wilayah Laut Cina Selatan (LCS) paling banyak dimotivasi oleh kepentingan ekonomi, seperti

⁴⁰ *Workshop on Managing Potential..Op.cit.*, h.251

⁴¹ Asnani Usman&Rizai Sukma. *Konflik...Op.cit.* h.8

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Windratmo. *Penanganan...Op.cit.*, h.15

diketahui Laut Cina Selatan (LCS) terutama Spratly menyimpan begitu banyak potensi ekonomi yang sangat produktif bagi peningkatan ekonomi suatu negara, di samping alasan politik dan keamanan, mengingat letak Laut Cina Selatan (LCS) yang sangat strategis untuk membangun sebuah pangkalan militer dan dalam hal ini dapat mengancam keamanan negara yang berdekatan dengannya, jadi dapat dimengerti banyak negara yang ingin menguasai wilayah ini.

2.3.4. Perkembangan Konflik Laut Cina Selatan dan Posisi Asean Regional Forum (ARF)

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) mulai menghangat pada awal dasawarsa 1970-an, dimana beberapa negara mulai mengeluarkan klaimnya atas beberapa pulau di wilayah Laut Cina Selatan (LCS) terutama kepulauan Spratly, bahkan klaim tersebut meningkat tidak lagi hanya berupa pernyataan, namun sudah menjurus ke arah konfrontasi bersenjata dengan melakukan beberapa tindakan nyata, seperti pendudukan beberapa pulau, pembangunan benteng-benteng dan bangunan lain, pengibaran bendera, mengeluarkan undang-undang dan dokumen-dokumen lain yang memperkuat klaim yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan, sampai dengan penempatan pasukan militer di pulau-pulau yang telah diklaim.

Dari enam negara yang telah menyatakan klaimnya atas kepulauan Spratly, ada lima negara yang telah menempatkan pasukan militernya di pulau-pulau yang telah diklaimnya. Negara pertama yang memperkuat tuntutannya dengan mengirimkan pasukannya ke pulau-pulau Spratly adalah Vietnam Selatan yang dimulai pada tahun 1973. Vietnam Selatan mengumumkan secara resmi digabungkannya sebelas pulau di Spratly dengan propinsi Phuoc Tuy, namun pada tahun 1956 sebenarnya Vietnam Selatan telah mengirimkan armada lautnya ke pulau-pulau Spratly dan tetap tinggal di pulau-pulau tersebut sampai Hanoi menguasainya setelah Saigon jatuh pada tahun 1975.

Setelah Vietnam bersatu pada tahun 1976, Hanoi memperluas penguasaannya...dengan menduduki tujuh pulau Spratly lainnya, dan

membangun instalasi militer paling sedikit di lima pulau”.⁴⁵Tindakan Vietnam untuk memperkuat klaimnya dengan melakukan tindakan-tindakan nyata seakan-akan memberi contoh bagi negara pengklaim lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang serupa.

Filipina sejak tahun 1970-1971, telah menduduki tiga pulau, dan pada bulan Februari 1974 Filipina menduduki lagi lima pulau, yaitu Nanshan, Flat, West York, Northeast Cay dan Thitu, pada tahun 1978 Filipina, menduduki dua pulau, yaitu, Lankiam Cay dan pulau Loaita. Pendudukan ini diperkuat dengan tindakan yuridis, yaitu ketika tanggal 19 Juni 1978, presiden Marcos menandatangani Dekrit presiden yang menuntut atas kepemilikan kelompok kepulauan Kalayan.⁴⁶

Klaim Filipina atas kepulauan Kalayan tidak termasuk pulau Amboyna dan Spratly, kedua pulau ini telah diklaim dan diduduki oleh Vietnam, tetapi Malaysia menuntut Vietnam atas pendudukan pulau Amboyna, Malaysia juga menuntut Filipina atas pendudukan terumbu Laksamana (*Commodore reefs*) dimana keduanya diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh Malaysia tidak diikuti dengan penempatan pasukan militer di pulau Amboyna maupun terumbu Laksamana (*Commodore reefs*).

Di pihak lain, Taiwan⁷ telah membangun beberapa benteng di kepulauan Itu Aba (pulau terbesar di Spratly) sejak tahun 1971, Taiwan juga membenahi kekuatannya, sejak tahun 1992 telah membeli 60 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Perancis, 90 buah F-SE dari Amerika, dan pada bulan Agustus 1993, Taiwan sepakat untuk membeli sejumlah pesawat tempur milik Amerika Serikat sebesar 15 milyar dollar. Kegiatan Taiwan memicu tindakan serupa dari negara-negara pengklaim lainnya.⁴⁷

Pada tahun 1974, Cina telah menguasai Kepulauan Paracels, dan tampaknya belum mengarah pada pendudukan Kepulauan Spratly dengan pertimbangan akan mengganggu hubungan baiknya dengan ASEAN. Peningkatan kekuatan militer juga dilakukan oleh Cina, seperti yang dilaporkan oleh CIA, “...Sejak tahun 1988, anggaran militer Cina meningkat sampai dengan 60 %. Diperkirakan pula sebesar 16 Milyar Dollar digunakan untuk keperluan teritorial

⁴⁵Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik... Op.cit.*, h.10

⁴⁶*Pikiran Rakyat*, 6 April 1995

⁴⁷*Ibid.*

Laut Cina Selatan.⁴⁸ Dalam rangka memperkuat klaimnya, Pemerintah Beijing telah membangun landasan pacu di pulau Woody yang strategis. Peningkatan kapasitas militer yang dilakukan oleh beberapa negara semakin memicu kecurigaan antar negara.

Sementara itu, Malaysia berencana untuk memperbesar kekuatan militernya, oleh karena itu anggaran militernya akan ditingkatkan dari 2,5 % menjadi 6 % dari GNP. “Untuk memperkuat klaimnya, pemerintah Malaysia sejak tahun 1983 telah menempatkan kekuatan militernya di Spratly, Kuala Lumpur juga telah membangun landasan pesawat terbang sepanjang 1,5 kilometer di kepulauan tersebut”.⁴⁹ Negara-negara pengklaim sepertinya tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam memperkuat posisi di wilayah yang telah di klaimnya.

Pemerintah Vietnam juga telah membangun pangkalan udara di salah satu pulau yang tidak dikenal di sekitar Laut Cina Selatan. “...Demikian juga dengan pemerintah Filipina, secara terbuka telah mengangkat seorang walikota di Bongao (dalam jajaran Kepulauan Kalayaan) dalam gugus Kepulauan Spratly”.⁵⁰

Dampak dari klaim beberapa negara tersebut telah menimbulkan fenomena saling memprotes dan menjurus pada bentrokan bersenjata. Ketegangan dan bentrokan senjata antar negara mulai terjadi. Dimulai pada tahun 1974, angkatan perang Vietnam dan Cina seringkali terlibat dalam bentrokan senjata meskipun masih dalam skala kecil. Setelah beberapa kali insiden bersenjata terjadi, beberapa negara mulai berani menggelar pasukannya dalam skala yang lebih besar di pulau-pulau yang diklaim menjadi bagian dari wilayahnya. Pada tahun 1982, “...Filipina membangun instalasi militer di beberapa pulau dan menempatkan pasukan sebanyak 500 orang di pulau terbesar, yaitu kepulauan Pagasa, pada tahun 1983, Malaysia untuk pertama kalinya menempatkan pasukannya di Terumbu Layang-Layang”.⁵¹ Selain kedua negara tersebut negara

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik... Op.cit.*, h.12

pengklaim lainnya tidak melakukan penempatan pasukan dengan jumlah yang signifikan di pulau-pulau yang diklaimnya.

Namun pada tanggal 14 Maret 1988 antara Cina dan Vietnam, terjadi pertempuran yang cukup sengit yang "...Menyebabkan tiga tentara Vietnam tewas, 74 orang hilang, dan tiga kapal tempurnya tenggelam".⁵² Sedangkan Cina sering menggelar latihan armada-armadanya baik angkatan laut maupun angkatan udara di sekitar laut Cina selatan, untuk menunjukkan bahwa Cina mempunyai kekuatan melakukan pertempuran pantai dan daratan.

Pada tahun 1986, Cina meningkatkan armada lautnya dan amphibinya. Penempatan pasukan dengan jumlah besar akan dianggap ancaman oleh Cina, dan akan memancing Cina untuk bertindak lebih jauh yang justru akan membuat konflik ini menjadi semakin rumit. Meskipun demikian, pada pertengahan 1980-an, negara-negara pengklaim tidak mengambil kebijakan yang dapat memicu ketegangan di kawasan.

Bentrokan senjata antara Vietnam dan Cina mempunyai dampak psikologis bagi negara pengklaim lainnya, mereka semakin gencar untuk menduduki pulau-pulau yang ada di laut Cina selatan.

Malaysia, pada bulan November 1986, menduduki dan menempatkan pasukannya di pulau Matani dan Ubi, sedangkan pada bulan April 1987, Vietnam menduduki sebuah pulau baru yang disebut *Barque Canada Reefs (Thu Yen Chin)*, pada tahun yang sama, Cina juga membangun pangkalan tetap yang pertama di *Fiery Cross Reefs (Youphu)*.⁵³

Perselisihan juga terjadi antara Cina dan Filipina pada bulan Maret 1995, ketika Filipina menuduh Cina telah mengirimkan angkatan lautnya ke kepulauan Spratly dan mendirikan sebuah pangkalan di kepulauan *Mischief Reefs*, sebuah pulau yang diklaim sebagai bagian dari teritorial Filipina. Perselisihan ini berujung pada bentrokan senjata antara keduanya.

Selain pendudukan dan peningkatan kemampuan militer, negara-negara yang mengklaim kepulauan Spratly dan pulau-pulau lain di wilayah Laut Cina

⁵² *Pikiran Rakyat... Op.cit.*

⁵³ Asnani Usman & Rizal Sukma. *Konflik... Op.cit.*, h. 13

1) meningkatnya kecurigaan, yaitu adanya kewaspadaan yang tinggi terhadap maksud maupun motif pihak lawan, baik yang implisit maupun eksplisit; 2) peningkatan masalah, yaitu kecenderungan para pembuat kebijakan yang terlibat dalam krisis untuk membesar-besarkan masalah kepentingannya; 3) Perasaan urgensi, yaitu berkaitan dengan perasaan waktu yang tersedia sempit untuk bertindak, jika tidak cepat bertindak, kehancuran oleh musuh pun dapat menjadi kenyataan; 4) adanya pemikiran alternatif bertindak lebih sedikit daripada musuh, akibat ketidakpastian sekitar motif dan tindakan musuh, situasi demikian secara rasio akan membuat negara jatuh pada penggunaan kekuatan militer, meskipun solusi diplomasi masih terbuka; 5) Adanya pemikiran bahwa krisis ataupun konflik akan mengarah pada titik balik; 6) Adanya persepsi ancaman, sebuah negara akan mencoba melawan dengan cara-cara militer (meskipun disadari kekuatannya lebih lemah dan sulit bertahan dari gempuran musuh), bila ia merasa nilai-nilai fundamentalnya terancam.⁵⁵

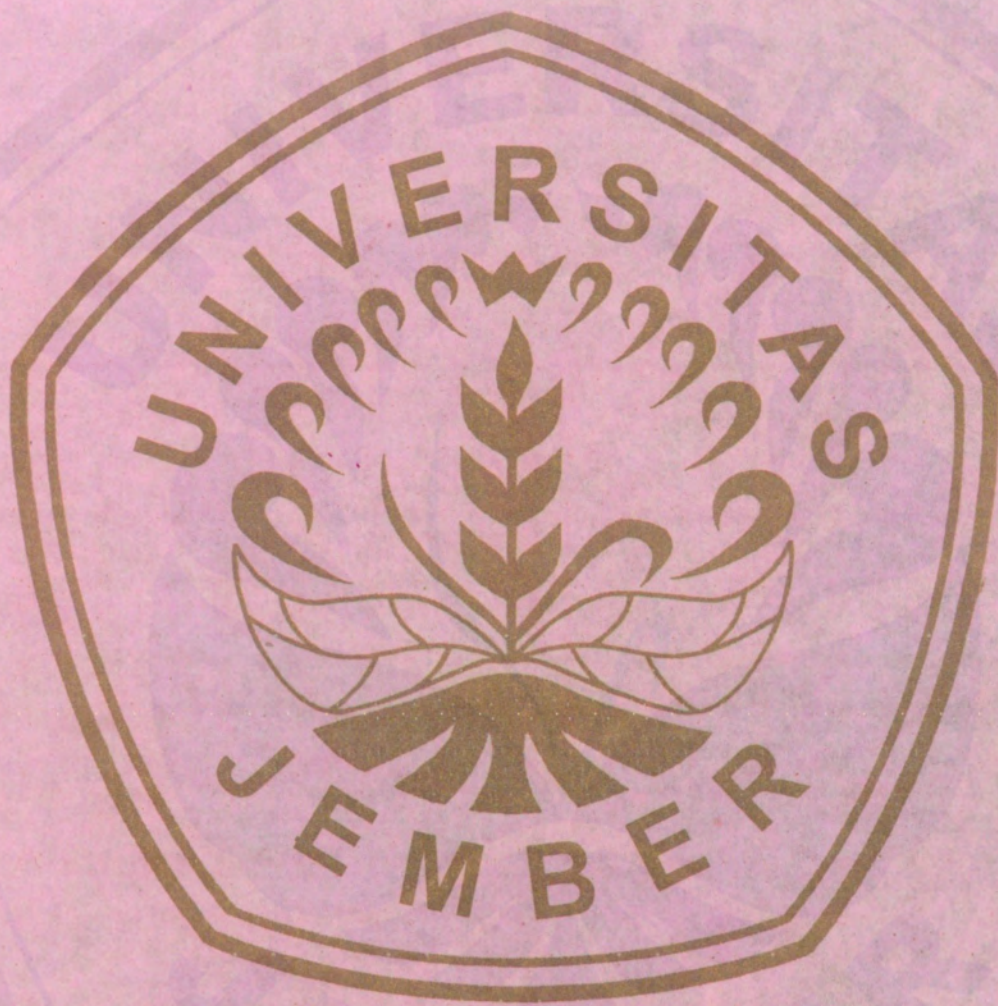
Segala tindakan yang telah dilakukan oleh negara-negara pengklaim mempunyai kemungkinan membuat konflik Laut Cina Selatan (LCS) meningkat menjadi krisis. Pembuktian kemampuan Asean Regional Forum (ARF) bisa ditentukan melalui respon dan inisiatif ARF dalam proses penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS).

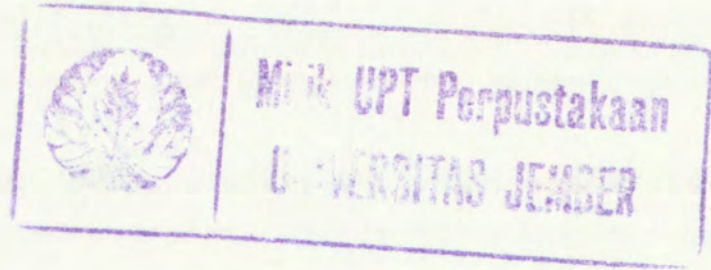
Sebagai forum yang menangani masalah-masalah keamanan kawasan, sudah saatnya dipertimbangkan untuk membicarakan masalah Spratly. Keterlibatan Cina dalam ARF sangat mendukung bagi proses diplomasi untuk menurunkan tensi ancaman di wilayah itu. "...Forum ini dipandang sangat efektif karena melibatkan dua pihak, yaitu, negara-negara pengklaim, juga melibatkan negara-negara pengguna kawasan ini seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia".⁵⁶

Situasi yang memanas di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara yang juga menggunakan Laut Cina Selatan (LCS). Pedoman kerja atau tahapan yang akan dijalankan oleh ARF yaitu *confidence building measures/CBMs* dan diplomasi preventif yang saat ini sedang diimplementasikan, diharapkan akan dapat membantu mencegah dan mengatasi perbedaan serta perselisihan antara negara yang mengklaim di wilayah Spratly ini.

⁵⁵ *Pikiran Rakyat... Op.cit.*

⁵⁶ *Suara Pembaruan*, 17 Mei 1995





BAB III

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) Tantangan Bagi Asean Regional Forum (ARF)

Salah satu potensi konflik yang mengkhawatirkan di Asia Pasifik adalah konflik Laut Cina Selatan (LCS), dimana terjadi tumpang tindih klaim antara beberapa negara mengenai kepemilikan kepulauan Spratly dan pulau-pulau yang ada di wilayah Laut Cina Selatan (LCS). Pada pasca perang dingin, konflik ini dikhawatirkan akan meningkat menjadi konflik bersenjata, akhir-akhir ini memang telah terjadi beberapa insiden bersenjata, misalnya antara Cina dan Vietnam (insiden Mischief Reefs tahun 1995). Peningkatan ketegangan di kawasan ini menuntut adanya suatu mekanisme pengelolaan dan penyelesaian, setidaknya-tidaknya mengurangi kecurigaan antara negara-negara pengklaim agar tidak menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan konflik ini, bahkan diharapkan adanya suatu upaya untuk mengubah konflik yang terjadi menjadi kerjasama terutama dikalangan negara-negara pengklaim sehingga kondisi yang saling mencurigai menjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

3.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Langkah-langkah Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Mekanisme Diplomasi Preventif Dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan (LCS)

Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog masalah politik dan keamanan di Asia Pasifik, mempunyai kewajiban untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS) ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya:

3.1.1 Perluasan Substansi Kerjasama ASEAN Terhadap Masalah-Masalah Keamanan Kawasan

tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN, baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, negara-negara ASEAN dihadapkan pada tugas penting untuk menata kehidupan nasional masing-masing (misalnya keamanan rezim dan kerawanan domestik) ke luar, perkembangan regional berupa meluasnya konflik di Indocina³.

Di samping itu perkembangan pasca perang dingin dimana konflik-konflik antar negara Asia Pasifik terutama tumpang tindih klaim teritorial mulai bermunculan, menuntut perhatian ASEAN. Dampak perkembangan regional pasca perang dingin akan membuat ASEAN harus memformulasikan kembali fungsinya.

Perkembangan regional pasca perang dingin di Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara, tidak bisa membuat ASEAN meneruskan strategi “*inward looking*”, sehingga posisi yang dimainkan terkesan ragu-ragu, hal ini disebabkan adanya dilema antara sensitivitas historis yang melandasi pembentukan ASEAN, yaitu untuk menjamin stabilitas dan keamanan Asia Tenggara khususnya melalui upaya masing-masing, bebas dari ikut campur pihak luar, ASEAN sangat mengutamakan prinsip non intervensi, saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, menjaga stabilitas masing-masing negara, dan ini diterapkan oleh ASEAN dengan menjaga jarak terhadap konflik-konflik regional yang menuntut keterlibatan ASEAN lebih jauh, misalnya konflik di Indocina dimana negara-negara besar terutama Amerika Serikat terlibat di dalamnya. Selain itu sikap ragu-ragu ASEAN juga disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara negara-negara anggotanya dalam memandang konflik-konflik yang terjadi dan mempersepsikan agenda penataan keamanan di Asia Pasifik.

Dua hal di atas menyebabkan ASEAN tidak bisa secara optimal dalam merealisasikan keikutsertaannya dalam penataan keamanan regional. Sikap enggan ASEAN untuk merumuskan peran keamanannya secara tegas sampai pada awal tahun 1990-an. Berbagai perubahan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik pasca perang dingin mendorong ASEAN untuk lebih mempertegas posisinya

³ Bantarto Bandoro. *Agenda....Opcit.* Hal 58-59

dalam penataan keamanan regional untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang stabil.

Konflik-konflik baru yang muncul pasca perang dingin, seperti konflik Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mengancam kestabilan kawasan. ASEAN mengalami tantangan dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai komunitas diplomatik, dimana fungsinya sebagai : 1) kemampuan untuk menghindari dan mengelola konflik-konflik intra ASEAN, 2) sebagai sarana pengelolaan tatanan regional (*management of regional order*), 3) kemampuan untuk mengambil posisi bersama dan mengartikulasikan fungsi itu secara lancar (*fluently*) dan tegas (*vigour*)⁴.

Fungsi ASEAN sebagai komunitas diplomatik dihadapkan pada ketidakpastian situasi keamanan pasca perang dingin yang membutuhkan sikap ASEAN secara lebih nyata dan tegas. Sebagai respon ketidakpastian masa depan keamanan di kawasan, ASEAN kemudian memutuskan untuk lebih terbuka dalam mempertegas posisi dalam keamanan regional, hal tersebut dinyatakan dalam KTT ASEAN di Singapura tahun 1992⁵. Pada KTT ini untuk pertama kalinya masalah keamanan menjadi agenda pembicaraan resmi, pada KTT tersebut negara-negara ASEAN sepakat untuk mengambil inisiatif dalam membentuk forum dialog multilateral masalah politik dan keamanan.

Inisiatif pembentukan forum dialog masalah keamanan dimulai sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ASEAN di Jakarta tahun 1990. Berdasarkan pengalaman Eropa dengan CSCENya (*Conference on Security Cooperation in Europe*) Menteri Luar Negeri Kanada dan Menteri Luar Negeri Australia mengusulkan agar negara-negara di Asia Pasifik membentuk CSCA (*Conference on Security in Asia Pacific*), namun dengan pertimbangan bahwa kondisi di Asia Pasifik tidaklah sama dengan kondisi yang ada di Eropa maka usulan tersebut tidak dapat diterima⁶.

⁴ Bantarto Bandoro. *Agenda....Opcit.* Hal 58-59

⁵ *Ibid.* Hal 65

⁶ Bantarto Bandoro. *Agenda....Opcit.* hal 58-5

Usul mengenai pembentukan sebuah organisasi atau kerjasama secara multilateral juga pernah dikemukakan oleh Jepang di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Kuala Lumpur namun tidak bisa diterima pula, hal ini dikarenakan ada kekhawatiran bahwa forum yang diusulkan oleh Jepang tersebut akan menjadi arena dominasi bagi negara-negara besar mengingat hubungan yang begitu dekat antara Jepang dan Amerika Serikat.

Ketidakpastian situasi keamanan semakin tidak menentu, sehingga pada KTT ASEAN di Singapura tahun 1992 disetujui untuk menggunakan ASEAN-PMC (*ASEAN Post Ministerial Meeting Conference*) sebagai forum dialog masalah keamanan di Asia Pasifik sebelum ditemukannya forum yang lebih memadai⁷.

Keberadaan Cina sebagai negara besar dan tindakan-tindakan yang kurang bisa dikontrol terhadap sengketa-sengketa yang melibatkannya dengan negara lain, misalnya tindakan Cina yang sudah menjurus kearah provokasi militer di Laut Cina Selatan (LCS) terutama di kepulauan Spratly yang dipersengketakan oleh Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan, dan Cina cukup meresahkan negara-negara lainnya, oleh karena itu tidak tercakupnya Cina dan Rusia secara komprehensif di dalam ASEAN-PMC menyebabkan forum ini dianggap tidak akan bisa melakukan langkah-langkah secara optimal dalam mengatasi isu-isu keamanan.

Oleh karena itu dibentuk suatu forum baru yang dapat mencakup Cina dan Rusia secara komprehensif, sehingga kebijakan dan perilaku kedua negara tersebut dapat dikontrol baik secara langsung maupun tidak langsung. Forum tersebut bernama Asean Regional Forum (ARF) yang dibentuk di Singapura pada tahun 1993, Asean Regional Forum (ARF) merupakan pengembangan dari ASEAN-PMC⁸. Asean Regional Forum (ARF) adalah forum dialog multilateral pertama di Asia Pasifik yang membahas masalah-masalah keamanan di kawasan. Tiga tahapan yang akan dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) yaitu pembentukan rasa saling percaya (*confidence building measures/CBMs*),

⁷ *Ibid.* Hal 77

⁸ Bantarto Bandoro. *Agenda....Loc.cit.* hal 58-5

diplomasi preventif (*preventive diplomacy*) dan pendekatan penyelesaian konflik (*conflict resolution*) diarahkan agar negara-negara dapat bersikap lebih terbuka dalam merundingkan isu-isu keamanan regional⁹. Sekaligus mencari formulasi pendekatan-pendekatan dalam upaya penyelesaian konflik yang dapat mengancam kestabilan kawasan.

Pembentukan Asean Regional Forum (ARF) yang diprakarsai oleh ASEAN merupakan suatu bentuk kemauan dan kemampuan ASEAN dalam ikut serta mempertegas posisinya dalam pembentukan agenda keamanan kawasan. Dalam Asean Regional Forum (ARF) ASEAN mengambil posisi sebagai kekuatan pendorong utama (*primary driving force*) dalam arti sebagai organisasi regional yang memprakarsai terbentuknya Asean Regional Forum (ARF) maka keberadaan ASEAN tetap dimainkan agar forum tersebut tidak menjadi ajang persaingan dominasi bagi negara-negara besar di kawasan, di samping itu keberadaan ASEAN diharapkan tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dialog dan konsultasi tentang masalah politik dan keamanan regional.

Namun, demikian, kepemimpinan ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF) tidak bisa diterima seluruhnya oleh anggota-anggota Asean Regional Forum (ARF). Pola ASEAN yang sangat mengutamakan dialog dan konsultasi-konsultasi secara informal menyebabkan kadangkala Asean Regional Forum (ARF) tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas terhadap konflik yang berarti kekuatan pernyataan yang dikeluarkan tidak bisa digunakan sebagai "kekuatan pemaksa" dalam mengelola dan menangani sebuah konflik.

Ada kekhawatiran dari ASEAN terhadap perkembangan Asean Regional Forum (ARF) sebagai organisasi multilateral yang mengatasi masalah politik dan keamanan kawasan yang relatif, baru akan menjadi arena dominasi bagi negara-negara besar di kawasan. Di samping itu dengan adanya ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF) diharapkan akan menjadi penyeimbang kepentingan-kepentingan negara-negara besar dan negara-negara yang sedang berkembang yang terlibat dalam Asean Regional Forum (ARF), karena negara-negara barat atau negara-negara besar yang terlibat dalam Asean Regional Forum (ARF)

⁹⁹Bantarto Bandoro. *Agenda....Op.cit* . hal 78

menginginkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) dapat berlangsung dengan cepat sebaliknya negara-negara di kawasan Asia menginginkan Asean Regional Forum (ARF) tidak berjalan terlalu cepat.

Usia Asean Regional Forum (ARF) yang masih muda yang menangani masalah politik dan keamanan kawasan, menyebabkan belum adanya sebuah standar baku atau pedoman baku organisasi ini dalam menjalankan aktivitasnya, perbedaan-perbedaan dalam dialektika untuk merumuskan pedoman yang baku atau *code of conduct* bagi organisasi ini masih akan terus berkembang dan ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama (*primary driving force*) bagi Asean Regional Forum (ARF) mempunyai kewajiban lebih sebagai insiator gagasan-gagasan yang konstruktif bagi Asean Regional Forum (ARF) yang dapat diterima oleh semua pihak. Asean Regional Forum (ARF) diharapkan dapat berperan secara optimal sebagai forum yang tepat untuk membahas isu-isu strategis keamanan kawasan secara lebih terbuka dan mampu mencari solusi konkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan politik dan keamanan yang terjadi.

3.1.2 Realisasi Tujuan Dibentuknya Asean Regional Forum (ARF)

Sejak berakhirnya perang dingin, banyak hal yang menyebabkan ketidakpastian situasi keamanan di Asia Pasifik. Pasca perang dingin menimbulkan adanya kevakuman kekuatan, baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet karena pengurangan pasukan dan penutupan pangkalan militer keduanya di kawasan ini. Ketiadaan perimbangan kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menimbulkan rasa saling curiga diantara negara-negara, karena masing-masing negara mulai meningkatkan kemampuan militernya, sehubungan tidak adanya jaminan keamanan secara optimal dari kedua negara adikuasa yang dinikmati oleh negara-negara di kawasan selama perang dingin.

Kondisi ketidakpastian situasi keamanan di kawasan semakin bertambah dengan munculnya sengketa-sengketa tradisional yang selama konfrontasi ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet nyaris terlupakan.

Sengketa-sengketa tradisional tersebut diantaranya adalah sengketa teritorial dan perbatasan, dimana beberapa negara saling mengklaim wilayah-wilayah tertentu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Keprihatinan terbesar diarahkan pada konflik enam negara (Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam) yang terlibat dalam sengketa di kepulauan Spratly dan beberapa kepulauan lain di laut Cina Selatan (LCS)¹⁰. Dalam sepuluh tahun terakhir telah beberapa kali terjadi konflik bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai (antara Cina dan Filipina juga antara Cina dan Vietnam) dan puluhan kali provokasi yang menjurus pada konflik bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai.

Kekhawatiran akan meletusnya konflik bersenjata di wilayah Laut Cina selatan (LCS) adalah salah satu dasar yang mendorong ASEAN untuk membentuk Asean Regional Forum (ARF) tahun 1993 di Singapura. Salah satu tujuan dibentuknya Asean Regional Forum (ARF) adalah untuk menciptakan rasa saling percaya diantara anggota-anggota ARF melalui dialog yang terbuka dalam merundingkan masalah-masalah keamanan yang dapat mengganggu kestabilan kawasan¹¹.

Berkenaan dengan realisasi tujuan yang telah ditetapkan oleh Asean Regional Forum (ARF) maka konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan sebuah tantangan dan kewajiban bagi ARF untuk meresponnya dengan melakukan langkah-langkah yang konstruktif bagi terbentuknya sebuah mekanisme kompromi atau penyelesaian terhadap sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tahap-tahap yang akan dilalui oleh Asean Regional Forum (ARF) diarahkan pada pengelolaan konflik yang dapat mengancam kestabilan kawasan, dan sengketa yang akan ditangani adalah sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju penyelesaian sengketa ini.

Sehubungan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, maka Asean Regional Forum (ARF) dalam tahap *confidence building measures* (CBMs)

¹⁰ Kompas. 1 Agustus 1999

¹¹ Bantarto Bandoro *Agenda...Op.cit.* hal. 77

dikarenakan tumpang tindih klaim kepemilikan kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, pembelian senjata besar-besaran di negara-negara Asia Tenggara dalam konteks kecurigaan dan maksud-maksud peningkatan kapasitas militer yang tidak jelas, kebencian masa lalu yang tidak terselesaikan, khususnya di negara-negara Asia Timur, dan kemungkinan tumbuhnya hegemoni militer Cina sehubungan dengan kepentingan strategisnya¹².

Berbagai potensi konflik tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar tidak destruktif bagi penciptaan kawasan yang stabil dan tingkat kepercayaan antar negara yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Asean Regional Forum (ARF). Konflik yang dianggap paling mengkhawatirkan adalah konflik Semenanjung Korea dan tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan (LCS), namun konflik yang bisa dijangkau oleh Asean Regional Forum (ARF) pada saat ini adalah yang kedua, mengingat Korea sudah menyatakan sikapnya agar negara-negara di kawasan ini tidak ikut campur dalam konflik tersebut.

Berbeda dengan sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) negara-negara yang terlibat sengketa membuka diri untuk melakukan dialog dalam rangka penyelesaian sengketa baik secara bilateral maupun secara multilateral, Cina sebagai salah satu negara pengklaim juga menyatakan kesediannya untuk berunding. Disamping itu empat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) termasuk negara-negara yang mengklaim beberapa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) di sinilah ASEAN merasa berkepentingan untuk turut serta menyelesaikan sengketa ini, itikad ini diterima oleh negara-negara pengklaim. Bagi Asean Regional Forum (ARF) sengketa ini merupakan tantangan untuk membuktikan kemampuannya sebagai forum multilateral yang membahas masalah politik dan keamanan kawasan.

Dengan melibatkan Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) untuk ikut serta menata keamanan kawasan adalah suatu hal yang sangat penting. Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Ahmad Kamil Jaafar setelah pertemuan kedua Asean Regional Forum (ARF) di Brunei Darussalam menyatakan bahwa Asean Regional Forum (ARF) tidak akan ada gunanya jika

¹² *Contemporary Southeast Asia*. No1. 1999. Hal 25

Cina tidak ada di dalamnya¹³. Bagaimanapun Cina merupakan kekuatan besar di kawasan pasca perang dingin yang seringkali tindakan-tindakannya cukup mengkhawatirkan antara lain peningkatan kemampuan militer Cina yang ditandai dengan pembelanjaan militer yang terus meningkat setiap tahunnya.

Di samping kekuatan militer Cina yang cukup besar, klaim Cina yang cukup keras terhadap gugusan kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan (LCS) yang berbenturan dengan beberapa negara lain, mengharuskan tetap dilibatkannya Cina dalam agenda penataan keamanan di kawasan, karena dikhawatirkan tumpang tindih klaim tersebut dalam menjurus ke arah konfrontasi militer yang telah beberapa kali terjadi di antara negara-negara pengklaim tersebut.

Keteguhan Cina untuk terus berupaya memasukkan kepulauan Spratly ke dalam wilayah kedaulatannya dinyatakan pada 14 Juni 1994 bahwa Pemerintah Cina mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan atas kepulauan Spratly, klaim tersebut dinyatakan kepada Manila ketika Manila memberikan ijin kepada perusahaan Alcorn Petroleum dan Mineral Corporation serta mitranya di Amerika Serikat, Vaalco Energy Incorporation untuk memulai eksplorasi minyak di gugusan kepulauan Laut Cina Selatan (LCS), karena Filipina tidak menanggapi peringatan Cina tersebut hingga akhirnya Cina mengancam untuk mengangkat senjata¹⁴.

Bentrokan-bentrokan kecil yang melibatkan Cina dan beberapa negara pengklaim lainnya misalnya, bentrokan antara Angkatan Laut Cina dan Vietnam sejak tahun 1974 sudah seringkali terjadi. Dengan potensi terjadinya konfrontasi bersenjata yang tinggi maka sangat perlu untuk terus menggandeng Cina dalam setiap upaya pembentukan dan peningkatan *confidence building measures* (CBMs) dan diplomasi preventif di Laut Cina Selatan (LCS).

Relevansi Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog masalah politik dan keamanan kawasan dapat dilihat dengan terlibatnya Cina dalam forum ini, kesediaan Cina untuk membicarakan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) baik secara bilateral maupun multilateral meskipun secara terbatas merupakan upaya

¹³ Hiebert Dalam Hadi Soesastro and Anthony Bergin. *The Role...Opcit.* hal 93

¹⁴ Pikiran Rakyat. 11 Maret 1995

dikarenakan tumpang tindih klaim kepemilikan kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, pembelian senjata besar-besar di negara-negara Asia Tenggara dalam konteks kecurigaan dan maksud-maksud peningkatan kapasitas militer yang tidak jelas, kebencian masa lalu yang tidak terselesaikan, khususnya di negara-negara Asia Timur, dan kemungkinan tumbuhnya hegemoni militer Cina sehubungan dengan kepentingan strategisnya¹².

Berbagai potensi konflik tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar tidak destruktif bagi penciptaan kawasan yang stabil dan tingkat kepercayaan antar negara yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Asean Regional Forum (ARF). Konflik yang dianggap paling mengkhawatirkan adalah konflik Semenanjung Korea dan tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan (LCS), namun konflik yang bisa dijangkau oleh Asean Regional Forum (ARF) pada saat ini adalah yang kedua, mengingat Korea sudah menyatakan sikapnya agar negara-negara di kawasan ini tidak ikut campur dalam konflik tersebut.

Berbeda dengan sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) negara-negara yang terlibat sengketa membuka diri untuk melakukan dialog dalam rangka penyelesaian sengketa baik secara bilateral maupun secara multilateral, Cina sebagai salah satu negara pengklaim juga menyatakan kesediannya untuk berunding. Disamping itu empat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) termasuk negara-negara yang mengklaim beberapa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) di sinilah ASEAN merasa berkepentingan untuk turut serta menyelesaikan sengketa ini, itikad ini diterima oleh negara-negara pengklaim. Bagi Asean Regional Forum (ARF) sengketa ini merupakan tantangan untuk membuktikan kemampuannya sebagai forum multilateral yang membahas masalah politik dan keamanan kawasan.

Dengan melibatkan Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) untuk ikut serta menata keamanan kawasan adalah suatu hal yang sangat penting. Sekjen Kementrian Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Ahmad Kamil Jaafar setelah pertemuan kedua Asean Regional Forum (ARF) di Brunei Darussalam menyatakan bahwa Asean Regional Forum (ARF) tidak akan ada gunanya jika

¹² *Contemporary Southeast Asia*. No1. 1999. Hal 25

Cina tidak ada di dalamnya¹³. Bagaimanapun Cina merupakan kekuatan besar di kawasan pasca perang dingin yang seringkali tindakan-tindakannya cukup mengkhawatirkan antara lain peningkatan kemampuan militer Cina yang ditandai dengan pembelanjaan militer yang terus meningkat setiap tahunnya.

Di samping kekuatan militer Cina yang cukup besar, klaim Cina yang cukup keras terhadap gugusan kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan (LCS) yang berbenturan dengan beberapa negara lain, mengharuskan tetap dilibatkannya Cina dalam agenda penataan keamanan di kawasan, karena dikhawatirkan tumpang tindih klaim tersebut dalam menjurus ke arah konfrontasi militer yang telah beberapa kali terjadi di antara negara-negara pengklaim tersebut.

Keteguhan Cina untuk terus berupaya memasukkan kepulauan Spratly ke dalam wilayah kedaulatannya dinyatakan pada 14 Juni 1994 bahwa Pemerintah Cina mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan atas kepulauan Spratly, klaim tersebut dinyatakan kepada Manila ketika Manila memberikan ijin kepada perusahaan Alcorn Petroleum dan Mineral Corporation serta mitranya di Amerika Serikat, Vaalco Energy Incorporation untuk memulai eksplorasi minyak di gugusan kepulauan Laut Cina Selatan (LCS), karena Filipina tidak menanggapi peringatan Cina tersebut hingga akhirnya Cina mengancam untuk mengangkat senjata¹⁴.

Bentrokan-bentrokan kecil yang melibatkan Cina dan beberapa negara pengklaim lainnya misalnya, bentrokan antara Angkatan Laut Cina dan Vietnam sejak tahun 1974 sudah seringkali terjadi. Dengan potensi terjadinya konfrontasi bersenjata yang tinggi maka sangat perlu untuk terus menggandeng Cina dalam setiap upaya pembentukan dan peningkatan *confidence building measures* (CBMs) dan diplomasi preventif di Laut Cina Selatan (LCS).

Relevansi Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog masalah politik dan keamanan kawasan dapat dilihat dengan terlibatnya Cina dalam forum ini, kesediaan Cina untuk membicarakan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) baik secara bilateral maupun multilateral meskipun secara terbatas merupakan upaya

¹³ Hiebert Dalam Hadi Soesastro and Anthony Bergin. *The Role...Opcit.* hal 93

¹⁴ Pikiran Rakyat. 11 Maret 1995

Asean Regional Forum (ARF) untuk tetap meredam tindakan Cina agar tidak menjurus pada tindakan provokasi yang lebih jauh. Forum ini sangat efektif, karena selain mencakup negara-negara pengklaim juga terlibat negara-negara pengguna seperti Jepang, Amerika Serikat, Rusia yang mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan (LCS) sehingga secara tidak langsung mereka akan turut menjaga keamanan Laut Cina Selatan (LCS), karena ketidakstabilan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) diproyeksikan akan mengancam kepentingan nasionalnya¹⁵.

Asean Regional Forum (ARF) dapat membantu mencegah terjadinya konfrontasi bersenjata yang lebih jauh dan sebagai kekuatan penekan terutama bagi Cina untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa ini, minimal sebagai pertimbangan bagi Cina untuk tidak melangkah terlalu jauh bila tidak menginginkan hubungannya dengan negara-negara ASEAN memburuk, di samping kembalinya campur tangan Amerika Serikat, bila tindakan Cina dianggap mengancam kepentingan nasionalnya dan kestabilan Asia Pasifik

3.1.4 Strategi Untuk Melibatkan Dan “Menetralisir” Kebijakan Cina Di Laut Cina Selatan (LCS)

Pada pasca perang dingin, hegemoni dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet telah berakhir maka negara-negara besar di kawasan yang semula menjadi bagian dari dikotomi sistem dunia yaitu bipolar, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, Cina, dan lainnya, menjadi bebas, hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi kestabilan kawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasca perang dingin, konflik yang berkembang bukan lagi bersumber pada konflik ideologis namun konflik-konflik yang relatif “ternafikan” pada masa perang dingin, misalnya konflik di Semenanjung Korea, juga sengketa di Laut Cina Selatan (LCS), yaitu tumpang tindih klaim terhadap kepulauan Spratly dan beberapa wilayah lain di Laut Cina Selatan (LCS) yang disinyalir kaya akan sumber daya minyak dan mineral.

¹⁵ Suara Pembaruan. 17 Mei 1995

terulang kembali tahun 1988. Pada bulan Maret 1995 bentrokan yang melibatkan Cina dan Filipina kembali terjadi²⁴.

Semakin rumitnya sengketa Laut Cina Selatan (LCS) ditambah dengan sikap agresif Cina meskipun Cina seringkali menyatakan bahwa dirinya bersedia menyelesaikan masalah ini ke meja perundingan, namun tindakannya seringkali mengingkari keinginannya untuk membawa masalah ini ke meja perundingan, membuat negara-negara pengklaim lainnya maupun negara yang berkepentingan terhadap Laut Cina Selatan (LCS) merasa terancam justru melakukan tindakan-tindakan yang memperumit sengketa ini.

Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme pengaturan dan pengelolaan konflik yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan menjaga agar konflik ini tidak menjurus ke arah konfrontasi militer yang dapat membahayakan kestabilan kawasan.

Dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) sebenarnya sudah dilakukan beberapa upaya untuk mengelola sengketa ini agar tidak meningkat menjadi konfrontasi militer lebih jauh. Antara lain dilakukan oleh ASEAN yang telah mengeluarkan deklarasi tentang Laut Cina Selatan (LCS) yang ditandatangani oleh perwakilan negara-negara ASEAN di Manila, Filipina pada tahun 1992 yang berisi:

1. menilik kembali ikatan sejarah, budaya, dan sosial yang mengikat orang-orang menjadi negara-negara, yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan (LCS)
2. Mengembangkan persaudaraan, persahabatan yang harmonis diantara negara-negara yang sama dengan tradisi dan warisan bangsa-bangsa Asia
3. Mengembangkan tradisi yang kondusif untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi
4. Menyadari bahwa isu Laut Cina Selatan (LCS) melibatkan masalah kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan (LCS)

²⁴ Windratmo. *Potensi Konflik Laut Cina Selatan: Harapan....Opcit.* Hal 14

5. Menyadari bahwa setiap pembangunan yang bertentangan di Laut Cina Selatan (LCS) secara langsung akan berdampak pada kedamaian dan stabilitas di kawasan.

Dengan ini,

1. Menekankan perlunya menyelesaikan semua persoalan kedaulatan dan yurisdiksi berkenaan dengan Laut Cina Selatan (LCS) dengan cara-cara damai dan tanpa menggunakan kekerasan
2. mendesak semua pihak untuk berusaha menahan diri dan berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelesaian akhir sengketa
3. menyelesaikan tanpa menyudutkan kedaulatan dan yurisdiksi negara yang berkepentingan langsung dengan wilayah tersebut, membahas kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan (LCS) sehubungan dengan keamanan maritim dan komunikasi, perlindungan dari polusi di lingkungan laut, koordinasi SAR, usaha memberantas pembajakan dan perompakan bersenjata juga kampanye melawan lalu lintas perdagangan narkoba
4. Memerintahkan semua pihak untuk menerapkan prinsip yang ada dalam TAC sebagai dasar untuk memantapkan *code of conduct* tentang Laut Cina Selatan (LCS)
5. Mengundang semua pihak untuk ikut menyepakati prinsip-prinsip yang ada dalam deklarasi²⁵.

Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan komunike bersama para Menteri Luar Negeri (menlu) ASEAN ke 32 pada 23-24 juli 1999 di Singapura yang menyatakan keprihatinannya atas berbagai insiden di Laut Cina Selatan (LCS) yang terjadi akhir-akhir ini, untuk itu perlu segera dibuat kode etik regional yang memuat prinsip-prinsip umum yang telah disetujui, yaitu Deklarasi Manila 1992, kode etik tersebut juga menetapkan berbagai kegiatan pembangunan gedung atau instalasi permanen baru di Laut Cina Selatan (LCS) dan dilakukan atas kerjasama bilateral dan multilateral²⁶.

²⁵ *Political Document* Dalam www.aseansec.org Diakses tanggal 4 januari 2002

²⁶ *Analisis CSIS* No. 4. Jakarta. 1999. Hal.416

4. Pelayaran kapal-kapal penangkap ikan atau kapal-kapal komersial di sekitar wilayah yang dipersengketakan atau patroli yang dilakukan kapal-kapal militer dapat dengan mudah terjadi saling menembak, selanjutnya meningkat menjadi konfrontasi laut
5. Adanya konflik regional yang lain yang terjadi di antara negara-negara pengklaim dapat meningkatkan tensi, misalnya konflik antara Cina dan Taiwan
6. Ancaman terhadap jalur laut (SLOC's) di Laut Cina Selatan (LCS) akan mengundang negara-negara lain yang menggunakan jalur laut ini terlibat dalam konflik
7. Modernisasi persenjataan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk negara-negara yang mengklaim Laut Cina Selatan (LCS) akan berdampak pada tindakan-tindakan negara-negara tersebut untuk mempertegas klaimnya²⁸.

Beberapa kondisi di atas terdapat dalam sengketa di Laut Cina Selatan (LCS), oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk menghindari situasi krisis tersebut, diantaranya telah dilakukan sembilan kali lokakarya untuk menjajagi potensi kerjasama untuk melakukan pembangunan bersama (*joint development*) di samping meningkatkan rasa saling percaya.

Lokakarya pertama tentang Laut Cina Selatan (LCS) diadakan di Bali tanggal 22-24 Januari 1990 hanya diikuti peserta dari enam negara ASEAN dan para ahli dari Kanada sebagai narasumber, Lokakarya ini membahas isu tentang *enviromental, ecology and scientific research, shipping, navigation and communication, resources management, political and security issues, territorial and jurisdictional issues, and institutional mechanism for cooperation*, lokakarya ini menghasilkan kesepakatan bahwa dialog dalam forum lokakarya tersebut perlu diperluas baik masalah maupun substansinya juga negara-negara yang terlibat²⁹.

Lokakarya kedua tahun 1991 di Bandung tanggal 15-18 Juli 1991 telah disepakati untuk tidak digunakannya kekerasan dalam penyelesaian potensi

²⁸ Ralph A Cossa. *Security Implication of Conflict in The South China Sea: Exploring Potential of Conflict* Dalam www.csis.org. Diakses tanggal 24 Desember 2001

²⁹ Windratmo. *Penanganan Potensi Konflik Laut Cina Selatan ...Opcit.* hal. 19

sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) dan memberi komitmen untuk menyelesaikan melalui cara-cara damai dan negosiasi, juga disepakati untuk menjalin kerjasama di bidang *search and rescue* (SAR), penanggulangan masalah pembajakan (*piracy*), penanggulangan perompakan bersenjata di laut (*armed robbery*), rasionalisasi penggunaan sumber daya hayati laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan di laut, penelitian ilmiah kelautan dan pemberantasan lalu lintas penyelundupan narkoba³⁰. Lokakarya ini menekankan pada masalah-masalah khusus dalam menangani sengketa di Laut Cina Selatan (LCS), peningkatan substansi kerjasama sudah dimulai sejak lokakarya kedua.

Lokakarya ketiga diadakan di Yogyakarta tanggal 28 Juni-02 Juli 1992, berhasil untuk meningkatkan kerjasama, adanya persetujuan tentang topik-topik yang akan dilaksanakan oleh dua kelompok kerja yang terdiri dari para ahli dari masing-masing negara peserta. Dua topik tersebut adalah *resources assesment and ways of development* dan *marine scientific resources*.

Lokakarya keempat tanggal 23-25 Agustus 1993 di Surabaya telah menyepakati untuk membentuk kelompok-kelompok kerja, diantaranya *Technical Working Group on Resources Assessment and Ways of Developmant* (TWG-RAWD) atau kelompok kerja teknik mengenai *assessment* terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan cara pengembangan, *Technical Working Group on Marine Scientific Research* (TWG-MSR) atau kelompok kerja teknik mengenai penelitian ilmiah kelautan³¹.

Lokakarya kelima telah mulai melakukan perluasan substansi kerjasama dan mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok kerja yang telah dibentuk dengan melibatkan organisasi-organisasi internasional seperti WPFCC (*Western Pacific Fisheries Consultative Comitte*) dan PECC (*Pacific Economic Cooperation Council*), pada lokakarya keenam tahun 1995 di Balikpapan tetap melanjutkan pertemuan-pertemuan kelompok kerja dengan semakin banyaknya ahli yang terlibat dalam kelompok kerja tersebut, juga adanya delapan prinsip atau *code of conduct* yang telah disetujui antara RRC dan Filipina yang mendorong

³⁰ Windratmo. *Penanganan Potensi Konflik Laut Cina Selatan (LCS) ...Opcit.* hal. 19

³¹ Windratmo. *Penanganan Potensi Konflik Laut Cina Selatan (LCS) ...Opcit.* hal. 22

peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs* di Laut Cina Selatan (LCS), para peserta menganggap bahwa lokakarya upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya atau *confidence building measures/ CBMs*.

Lokakarya ketujuh pada 13-17 Desember di Batam mulai dibahas dan disepakati usulan-usulan proyek yang diajukan oleh kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk juga mulai didiskusikannya masalah *confidence building measures/ CBMs* yang sangat essential untuk meminimalkan ketegangan, menghindari konflik, mengajukan kerjasama dan memfasilitasi atmosfer yang kondusif bagi penyelesaian perselisihan secara damai, untuk itu telah dilakukan berbagai diskusi baik formal maupun informal untuk peningkatan *confidence building measures/CBMs*.

Lokakarya kedelapan tanggal 2-6 Desember di Pacet, Puncak melanjutkan kesepakatan dari lokakarya ketujuh yaitu implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang disetujui untuk kerjasama, juga meminta kepada masing-masing pemerintah untuk memberi dukungan secara nyata dalam peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs*.

Lokakarya kesembilan berlangsung di Jakarta tanggal 1-3 Desember 1998 yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari seluruh negara-negara pengklaim dan negara-negara lain juga Badan Lingkungan PBB (UNEP) sebagai penyandang dana. Lokakarya tentang Laut Cina Selatan (LCS) mengalami kemajuan pesat dengan diimplementasikannya secara nyata kerjasama-kerjasama yang diajukan, dimulai dengan kerjasama di bidang *marine environmental protection* dengan melibatkan *United Nation Environmental Program* (UNEP) dan di bidang *resources assessment and ways and development* berkoordinasi dengan *Coordinating Committee For Coastal and Offshore Geoscience Programmes in The East and Southeast Asia* (CCOP)³².

Penanganan potensi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) pertama kali merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN, meskipun pendekatan untuk diadakannya pertemuan untuk membahas sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) dilakukan oleh satu negara yaitu Indonesia pada tahun 1989, dengan mengadakan

pendekatan kepada negara-negara ASEAN untuk membicarakan diadakannya pertemuan dalam rangka penanganan potensi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) dan ternyata mendapatkan respon yang cukup positif dari negara-negara ASEAN, hingga sejak lokakarya kedua telah dihadiri oleh negara-negara yang mempersengkatakan beberapa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS).

Berbagai kesepakatan yang dihasilkan oleh lokakarya tersebut adalah bersifat informal, karena sejak awal pertemuan tersebut bersifat informal, dengan pertemuan yang bersifat informal diharapkan negara-negara bisa lebih terbuka dalam membicarakan sengketa tersebut, dengan adanya keterbukaan diharapkan muncul saling percaya diantara negara-negara yang bersengketa sehingga penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) menjadi kerjasama dan pembangunan bersama dapat diwujudkan.

Namun pertemuan yang bersifat informal mempunyai kelemahan, ketika muncul sebuah kesepakatan maka negara-negara yang terlibat dapat mengabaikannya³³. Di samping itu adanya kekhawatiran terhadap tindakan-tindakan Cina di Laut Cina Selatan (LCS) sulit diramalkan, di satu pihak Cina menyatakan sikapnya untuk mendukung usaha-usaha kerjasama dan perundingan dengan keikutsertaannya dalam lokakarya Laut Cina Selatan (LCS), namun di lain pihak Cina masih menunjukkan sikap yang berlawanan, negara ini menduduki beberapa pulau yang menimbulkan bentrokan militer dengan negara-negara yang bersengketa lainnya.

Oleh karena itu harus ada sebuah kesepakatan resmi dalam rangka penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga resmi yang menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian secara damai sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dan dilaksanakannya kerjasama dalam memanfaatkan potensi di Laut Cina Selatan (LCS) diantara negara-negara yang bersengketa dan negara-negara pengguna Laut Cina Selatan (LCS).

Maka dikeluarkan Deklarasi Manila tanggal 22 Juli 1992 tentang pernyataan resmi negara-negara ASEAN tentang sengketa Laut Cina Selatan

³² Analisis CSIS No.4. Jakarta. 1999. Hal. 423

³³ Rizal Sukma. *Konflik Laut Cina Selatan ...Opcit.* hal. 70

(LCS). Inti dari pernyataan sikap tersebut bahwa sengketa Laut Cina Selatan (LCS) memerlukan sebuah penyelesaian secara damai yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dan kekuatan militer, juga penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS) melalui sebuah bentuk kerjasama atau pembangunan bersama (*joint development*) dalam memanfaatkan dan mengeksplorasi sumberdaya di Laut Cina Selatan (LCS).

Sebagai organisasi yang tidak berangkat dari kepentingan politik dan keamanan seperti yang tercantum dalam deklarasi Bangkok 1967 yang menyatakan bahwa ASEAN hanya bekerjasama dibidang ekonomi dan sosial budaya maka deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan (LCS) mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya Cina bukan anggota ASEAN sehingga kekuatan deklarasi tersebut hanya bersifat tuntutan moral agar Cina tidak bersikap destruktif dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dan hubungan Cina dengan ASEAN tidak rusak.

Disamping itu ASEAN bukan sebuah forum resmi yang menangani masalah politik dan keamanan kawasan, meskipun pada dekade 1990-an ASEAN mulai membuka diri untuk membicarakan beberapa isu strategis masalah politik dan keamanan, namun tetap saja ASEAN bukanlah forum resmi yang membahas masalah politik dan keamanan kawasan, sehingga deklarasi Manila tentang Laut Cina Selatan (LCS) hanya memberi tekanan moral bagi negara-negara yang bersengketa. ASEAN tidak bisa bertindak lebih jauh selain menyerukan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka³⁴.

Oleh karena itu perlu dibentuk suatu forum yang mempunyai otoritas dalam menangani isu-isu strategis politik dan keamanan kawasan. Dibentuknya Asean Regional Forum (ARF) merupakan upaya ASEAN untuk meng-*cover* kelemahan-kelemahan yang ada dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Keterlibatan Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) merupakan bagian

³⁴ Rizal Sukma. *Konflik ...Opcit.* hal. 78

dari usaha ASEAN untuk melibatkan Cina dalam diskusi masalah keamanan di Asia Pasifik umumnya, dan Asia Tenggara khususnya³⁵.

Sejak Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) diharapkan Cina dapat dilibatkan untuk membangun rasa saling percaya sehingga masalah keamanan kawasan dapat dipelihara secara bersama-sama. Dukungan penuh Asean Regional Forum (ARF) terhadap diselenggarakannya forum-forum dialog dan perundingan tentang Laut Cina Selatan (LCS) akan memberikan tekanan bagi anggota-anggota Asean Regional Forum (ARF) yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) untuk mengambil sikap proaktif dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Strategi untuk melibatkan Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) membuahkan hasil yang cukup positif karena Cina mulai menunjukkan perubahan sikap, meskipun pada awalnya Cina menolak untuk membicarakan masalah Spratly dalam forum multilateral. Pada tanggal 30 Juli 1995, dalam pertemuannya dengan para pejabat tinggi ASEAN (ASEAN-SOM), Menlu Cina, Qian Qichen akan mendiskusikan perbedaan-perbedaan mengenai sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dengan tujuh negara ASEAN, tapi Cina tidak menginginkan keterlibatan negara lain, karena ada kekhawatiran adanya campur tangan Amerika Serikat, selain itu Cina bersedia menerima Hukum Laut Internasional termasuk Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai dasar mengatasi perbedaan-perbedaan dalam perundingan³⁶. Dalam pertemuan Asean Regional Forum (ARF) tanggal 1 Agustus 1995 di Bandar Sri Begawan, Cina mengulang kembali pernyataannya tersebut.

Adanya perubahan sikap Cina cukup melegakan negara-negara di Asia Pasifik namun, terus mengajak Cina dalam diskusi-diskusi masalah keamanan baik melalui forum formal yaitu Asean Regional Forum (ARF) maupun melalui forum informal seperti lokakarya dan CSCAP (*Conference on Security in Asia and The Pacific*) sangat diperlukan dalam rangka mengajak Cina berpartisipasi secara aktif dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.

³⁵ *Ibid.* hal. 76

³⁶ Rizal Sukma. *Konflik ... Opcit.* hal. 78

Hal ini juga berarti mengajak Cina untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) secara damai³⁷.

Sesuai dengan hasil pertemuan kedua Asean Regional Forum (ARF) bahwa Asean Regional Forum (ARF) akan melalui tiga tahapan, yaitu, *stage I: promotion of confidence building measures, stage II: development of preventive diplomacy mechanism, Stage III: development of conflict resolution mechanism*³⁸.

Tahap awal penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dimulai dari pembentukan rasa saling percaya diantara negara-negara yang bersengketa, karena dengan rasa saling percaya akan mudah untuk mengadakan dialog maupun pembicaraan untuk membahas sengketa tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah kerjasama untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya di Laut Cina Selatan (LCS). Sebelum penanganan sengketa ini menggunakan mekanisme diplomasi preventif maka harus dimulai dengan rasa saling percaya yang cukup tinggi.

*Building and reinforcing a foundation of mutual confidence is essential to the effective exercise of preventive diplomacy*³⁹

Pelaksanaan *confidence building measures/CBMs* diantaranya dengan adanya inisiatif untuk menyelenggarakan 'lolakarya tentang penanganan potensi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) , juga beberapa *workshop* yang dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk untuk membahas mengenai pembangunan bersama (*joint development*) di Laut Cina Selatan (LCS). Dalam mengembangkan rasa saling percaya (*confidence building measures/CBMs*) ada beberapa prinsip, *Pertama*, pendekatan yang menekankan keterbukaan dan transparansi yang akan mendorong rasa percaya di tingkat regional dan menurunkan kemungkinan konflik terbuka. *Kedua*, perlu adanya sebuah kesadaran bahwa sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) melibatkan banyak negara pengklaim, pendekatan multilateral diperlukan untuk membuat sebuah kemajuan dalam menangani sengketa tersebut.

³⁷ Rizal Sukma. Konflik...*Opcit.* hal. 79

³⁸ *Asean Regional Forum (ARF) Document Paper... Opcit.* hal.14

³⁹ Simon SC Tay. *Preventive Diplomacy and The Asean Regional Forum (ARF): Principles and Possibilities.* Dalam Desmond Ball and Amitav Acharya. *Preventive Diplomacy and The Security Cooperation in The Asia Pasific Region.* CSIS. Jakarta.1999. hal. 150

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong dialog dan pengertian bersama di Laut Cina Selatan (LCS), diantaranya, *Pertama*, semua negara pengklaim harus berhenti dalam pembangunan kapasitas militernya di arena sengketa tersebut, *Kedua*, adanya keinginan baik yang dilakukan oleh negara-negara pengklaim untuk bernegosiasi tentang *code of conduct* yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS) seperti keinginan ASEAN dan Cina untuk membuat *code of conduct* di Laut Cina Selatan (LCS) demikian juga yang telah dibuat oleh Filipina dan Cina. *Ketiga*, perlu adanya mekanisme atau institusi untuk saling berbagi informasi dan mengelola sengketa yang ada di Laut Cina Selatan (LCS), Asean Regional Forum (ARF) merupakan perwujudan dari mekanisme atau institusi tersebut.

Asean Regional Forum (ARF) sebagai institusi yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs* mempunyai rencana jangka pendek dan jangka panjang yaitu *annex A* dan *annex B* yang diarahkan pada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Pada jangka pendek mendorong transparansi diantara negara-negara yang bersengketa dengan cara, *Pertama*, memantapkan kerjasama militer di wilayah *search and rescue* (SAR) seperti penanggulangan pembajakan, perompakan di laut, lalu lintas perdagangan narkoba, *Kedua*, pemberitahuan pendahuluan jika ada latihan militer di wilayah yang dipersengketakan, *Ketiga*, mengadakan dialog-dialog baik secara informal maupun formal diantara pejabat-pejabat pemerintah dalam rangka standarisasi prosedur operasi.

Keempat, penyeragaman standar keselamatan bagi kapal-kapal komersial atau kapal-kapal pengangkap ikan yang beroperasi di Laut Cina Selatan (LCS), *Kelima*, kerjasama di patroli dan pengawasan dalam memerangi pencarian ikan secara ilegal dan pembajakan untuk menciptakan keamanan dan kebebasan navigasi, *Keenam*, dibentuknya satelit atau pusat data yang akan menunjukkan perkembangan yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS), *ketujuh*, pengembangan dialog secara informal yang akan melibatkan negara-negara pengklaim dan negara-negara pengguna Laut Cina Selatan (LCS). Langkah-langkah di atas

mempunyai banyak kesamaan dengan pembahasan dalam lokakarya Laut Cina Selatan (LCS).

Implementasi proposal baik proposal kerjasama maupun pembuatan *code of conduct* didukung sepenuhnya oleh Asean Regional Forum (ARF), karena dengan mendukung implementasi dari hasil-hasil lokakarya maka Asean Regional Forum (ARF) sebenarnya telah menolong dirinya sendiri⁴⁰. Kerjasama dan koordinasi harus terus dilakukan antara lokakarya tersebut sebagai mekanisme informal yang mempunyai kelemahan dalam mengikat peserta dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dengan Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme formal yang mempunyai tingkat keputusan yang mengikat, sehingga Asean Regional Forum (ARF) akan terus terlibat dengan memberikan dukungan terhadap hasil-hasil lokakarya penanganan potensi sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

Keterlibatan Asean Regional Forum (ARF) dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dengan melalui peningkatan *confidence building measures/CBMs* akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan diplomasi preventif dalam penanganan sengketa ini, meskipun *confidence building measures/CBMs* akan mengalami tumpang tindih dengan diplomasi preventif. Diplomasi preventif berperan penting dalam pencegahan konflik agar tidak meningkat menjadi krisis. Pada program jangka pendek (*annex A*) diplomasi preventif adalah mengembangkan seperangkat aturan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan piagam PBB dan taktat perdamaian Asia Tenggara/TAC, mendorong diterimanya tujuan dan prinsip TAC dan resolusi piagam PBB, mendorong adanya pengakuan terhadap Deklarasi Laut Cina Selatan (LCS) oleh negara-negara yang bersengketa dan negara-negara pengguna wilayah Laut Cina Selatan (LCS)⁴¹.

Sedangkan program jangka panjang (*annex B*) diplomasi preventif ditujukan mencari jalan untuk mencegah konflik, mencari ide-ide untuk menunjuk sebuah tim khusus yang akan berkonsultasi dengan anggota Asean Regional

⁴⁰ Hasjim Djalal. *Preventive Diplomacy... Op.cit.* hal. 193

⁴¹ *Asean Regional Forum Document Series... Op.cit.* hal. 21

Forum (ARF) untuk melakukan pencarian data dan fakta bila dianggap perlu. Ada pula gagasan untuk membangun pusat pengurangan resiko (*A Regional Risk Reduction Centre*) seperti yang diusulkan oleh Sekjen PBB, pusat pengurangan resiko ini akan berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi⁴².

Pada pertemuan Asean Regional Forum (ARF) yang keempat tanggal 27 Juli 1997 telah disepakati peningkatan substansi Asean Regional Forum (ARF) dari pembentukan rasa saling percaya (*confidence bulding measures/CBMs*) ke tahap diplomasi preventif akan secara otomatis membuat langkah-langkah yang diupayakan Asean Regional Forum (ARF) dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) juga akan beranjak dari peningkatan *confidence building measures/CBMs* ke diplomasi preventif tanpa meninggalkan upaya-upaya *confidence building measures/CBMs*.

Dalam kerangka diplomasi preventif maka penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) akan dilakukan dengan mendorong diadakannya dialog-dialog baik formal maupun informal, mendorong terus dilakukannya upaya-upaya pembentukan rasa saling percaya dan mendukung implementasi proyek-proyek kerjasama maupun pembangunan bersama (*joint development*). Dialog-dialog tentang pembahasan Laut Cina Selatan (LCS) telah beberapa kali dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) baik antar pejabat pemerintah atau *first track* juga melalui seminar-seminar dan pusat-pusat studi antar negara atau *second track*.

Semenjak pertemuan Asean Regional Forum (ARF) ketiga tanggal 23 Juli 1996, para pejabat negara-negara Asean Regional Forum (ARF) telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang diketuai oleh Menlu Indonesia, Ali Alatas, bahwa Asean Regional Forum (ARF) mendukung sepenuhnya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dengan cara-cara damai tanpa kekerasan dengan merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, pertemuan tersebut juga mencatat kontribusi positif dari pembicaraan secara informal melalui *workshop* penanganan potensi sengketa Laut Cina Selatan (LCS)⁴³.

⁴² *Asean Regional Forum Document Series...Opcit.* Hal. 22

⁴³ *Asean Regional Forum (ARF) Document Series...Opcit.* Hal. 29

Pernyataan ketua Asean Regional Forum (ARF) keempat tanggal 27 Juli 1997 tetap menyatakan dukungan terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Laut Cina Selatan (LCS) tanpa menggunakan kekuatan militer dan merekomendasikan untuk digunakannya Konvensi Hukum Laut Internasional PBB tahun 1982, juga mendukung untuk terus diadakannya pertemuan berupa *workshop* yang membahas penanganan potensi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Pada rentan waktu tersebut telah dihasilkan beberapa kesepakatan informal mengenai rencana pembangunan dan pemanfaatan bersama wilayah Laut Cina Selatan (LCS) juga pembuatan *code of conduct* dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan (LCS).

Dukungan Asean Regional Forum (ARF) secara resmi yang dituangkan dalam *Chairman's Statement* terhadap upaya-upaya penanganan sengketa terus dilakukan pada pertemuan-pertemuan Asean Regional Forum (ARF) selanjutnya, terutama digunakannya Konvensi Hukum Laut Internasional PBB tahun 1982, dimana konvensi tersebut telah diratifikasi lebih dari seratus negara, termasuk negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan (LCS) khususnya Spratly kecuali Taiwan, karena negara-negara di Asia masih menganut kebijakan satu Cina. Sampai dengan pertemuan Asean Regional Forum (ARF) ketujuh di Bangkok, Thailand tanggal 27 Juli 2000 masih mengeluarkan *statement* yang mendukung diadakannya dialog dan konsultasi terutama yang telah diadakan oleh ASEAN dan Cina untuk mengembangkan dan mengadopsi pedoman tata sikap regional di Laut Cina Selatan (LCS).

Selain diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan resmi para pejabat senior negara-negara anggota Asean Regional Forum (ARF) atau *first track*, upaya diplomasi preventif dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) juga telah dilakukan melalui seminar-seminar yang diadakan oleh Asean Regional Forum (ARF) yaitu di Seoul tahun 1995, Paris tahun 1996 dan di Singapura tahun 1997⁴⁴. Ketiga seminar diadakan dalam rangka pengembangan diplomasi

⁴⁴ Simon SC Tay. *Preventive Diplomacy...Opcit.* Hal. 129

preventif sebagai mekanisme untuk mengelola dan menyelesaikan konflik termasuk sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

Hasil dari seminar-seminar tersebut menyatakan bahwa perlu untuk dilanjutkannya dialog dan *workshop* yang telah memberikan kontribusi positif bagi penanganan sengketa ini, perlunya dialog-dialog secara bilateral adalah langkah awal untuk mempertemukan dua kepentingan yang bersengketa sehingga ditemukan adanya persamaan persepsi tentang penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Semakin sering dialog secara bilateral dilakukan maka ketika dialog secara multilateral dilakukan akan semakin mudah untuk melakukan kompromi-kompromi diantara negara-negara yang bersengketa. Perundingan baik bilateral maupun multilateral akan saling mendukung dalam penyelesaian seluruh konflik.

Langkah kedua dalam diplomasi preventif dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) adalah mendorong terus dilakukannya upaya peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs*, untuk itu Asean Regional Forum (ARF) sejak pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh tahun 2000 terus mengupayakan pelaksanaan *confidence building measures/CBMs* seperti yang tercantum dalam *annex A* dan *annex B*, selain itu juga dilakukan seminar-seminar melalui badan Asean Regional Forum (ARF) yaitu *Intersessional Support Group on Confidence Building Measures/ISG-CBMs* yang telah melakukan enam kali pertemuan untuk membahas implementasi dari *annex A* dan *annex B* hubungannya dengan peningkatan *confidence building measures/CBMs* di Laut Cina Selatan (LCS).

Diantaranya, dialog tentang persepsi keamanan, publikasi rencana pertahanan, mendorong pertemuan dan pelatihan-pelatihan pejabat-pejabat militer, dan pendaftaran senjata di komisi bidang persenjataan PBB⁴⁵. Setiap pertemuan tersebut akan mengevaluasi implementasi dari pelaksanaan *confidence building measures/CBMs* yang telah disepakati.

Dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) terus dipromosikan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai, dialog-dialog secara bilateral dan multilateral,

diantaranya *workshop* tentang penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS), mendukung pertemuan antara pejabat-pejabat senior ASEAN dengan Cina dalam rangka pembentukan *code of conduct* di Laut Cina Selatan (LCS) di Hua Hind, Thailand pada 15 Maret 2000. Selain dilakukan oleh ASEAN dan Cina pembentukan *code of conduct* juga dilakukan secara bilateral oleh beberapa negara seperti antara Vietnam dan Filipina, juga antara Filipina dan Cina (lihat lampiran), terlihat bahwa mereka setuju untuk mencari penyelesaian secara damai dengan membentuk berbagai kerjasama dan bersedia untuk mengakui atau menyelesaikan sengketa atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

Upaya lainnya adalah mendorong kerjasama bidang pertahanan keamanan maritim, pemberitahuan pendahuluan jika mengadakan latihan di wilayah atau di sekitar wilayah yang dipersengketakan, ratifikasi terhadap kesepakatan non proliferasi dan penurunan kapasitas militer (*disarmament*), sosialisasi dan ratifikasi terhadap Deklarasi Manila tentang Laut Cina Selatan (LCS) tahun 1992. Implementasi kesepakatan tentang pelaksanaan *confidence building measures/CBMs* diarahkan untuk mewujudkan kawasan navigasi yang aman juga pelaksanaan kerjasama dan pembangunan bersama (*joint development*) di kawasan Laut Cina Selatan (LCS).

Diplomasi preventif yang dilakukan terhadap sengketa Laut Cina Selatan (LCS) adalah sebuah upaya pra krisis untuk mencegah situasi krisis dalam hal ini konfrontasi militer secara terbuka. Salah satu metode pelaksanaan diplomasi preventif yaitu peningkatan rasa saling percaya atau *confidence building effort* yang terdiri atas transparansi dan pertukaran informasi di bidang militer, pembentukan institusi baik formal maupun informal, hal ini telah dilakukan dengan pembentukan pusat penelitian dan informasi atau pusat data tentang perkembangan sengketa yang terjadi juga pelaksanaan *workshop* tentang penanganan potensi sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

Pembentukan norma tata sikap regional atau *code of conduct* di Laut Cina Selatan (LCS), pembentukan pedoman sikap ini telah dilakukan dengan diterima

⁴⁵ *Asean Regional Forum Document Series...Opcit.* Hal. 37-42

dan diakuinya *Treaty and Amity Cooperation in The Southeast Asia/TAC* sebagai pedoman bersikap antar negara-negara juga pengakuan terhadap Deklarasi Manila tahun 1992 tentang Laut Cina Selatan (LCS) sebagai pedoman bagi negara-negara yang bersengketa untuk menahan diri agar tidak terjadi konfrontasi militer di wilayah Laut Cina Selatan (LCS).

Langkah ketiga dari diplomasi preventif adalah pembentukan kesepakatan kerjasama dan implementasi kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan metode diplomasi preventif yaitu monitoring dan pengembangan kerjasama yang dapat meningkatkan kedamaian dan stabilitas atau *early warning system*, dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) hal ini diwujudkan dengan pembentukan kelompok kerja teknis tentang berbagai kesepakatan pembangunan bersama (*joint development*) di wilayah Laut Cina Selatan (LCS).

Asean Regional Forum (ARF) belum pernah memfasilitasi secara nyata atau menjadi mediator adanya pertemuan untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dan pembangunan bersama (*joint development*), Asean Regional Forum (ARF) hanya memberikan dukungan moralnya dalam setiap pernyataan resminya di setiap pertemuan tahunannya terhadap upaya-upaya penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS), misalnya melalui *workshop* yang telah sembilan kali dilaksanakan.

Dukungan tersebut juga diberikan terhadap kesepakatan secara bilateral yang dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa untuk mengadakan kerjasama di Laut Cina Selatan (LCS), maupun proposal bentuk-bentuk kerjasama yang diusulkan oleh lembaga-lembaga studi non pemerintah antar negara. Pada lokakarya yang ketiga mulai dilaksanakannya topik-topik yang disepakati oleh dua kelompok kerja yang terdiri dari para ahli negara-negara peserta.

Pertama, penaksiran sumber daya dan cara pengembangannya (*Technical Working Group on Resources Assessment And Ways of Development/TWG-RAWD*), kedua tentang penelitian ilmiah kelautan (*Technical Working Group on Marine Scientific Research/TWG-MSR*). Sebagai tindak lanjut dari pembentukan dua kelompok kerja tersebut diadakan pertemuan TWG-MSR pada bulan Mei-Juni 1993 di Manila dan Surabaya yang mengusulkan tiga bidang kerjasama yaitu,

pusat data/*database*, pertukaran informasi dan jaringan atau *information exchange and networking*, dan studi keragaman hayati atau *biodiversity*.

TWG-RAWD juga telah mengadakan pertemuan pertama pada bulan Juli 1993 di Jakarta, dan telah dibicarakan kemungkinan kerjasama di bidang sumberdaya kelautan (*fishery*), sumberdaya non hayati dan nonhidrokarbon, sumber dayahidrokarbon, mineral, dan nonmineral, juga diusulkan adanya taman perlindungan sumber daya laut⁴⁶. Selanjutnya pertemuan TWG-MSR ketiga berlangsung di Singapura, telah menghasilkan beberapa usulan proyek dari ketiga program kerja yang diusulkan pada pertemuan TWG-MSR kedua.

Beberapa kemajuan telah dicapai dalam lokakarya keempat bulan Juni 1995 di Hanoi telah menyetujui usul untuk dilakukannya kerjasama di bidang penelitian dan pencarian data tentang kelautan dan jaringan informasi di Laut Cina Selatan (LCS)⁴⁷. Lokakarya juga telah menyetujui pembantuan kelompok kerja teknis bidang perlindungan kelautan atau *Technical Working Group on Marine Enviromental Protection/TWG-MEP* yang telah bersidang di Hangzhou tanggal 6-8 Oktober 1994 dan ditindaklanjuti dengan pertemuan *Group of Expert on Marine Enviromental Protection/GEM-MEP* yang telah bertemu pertama kali di Pnomh Penh tanggal 9-11 Juni 1997

Sedangkan pertemuan kedua TWG-MEP telah diusulkan melakukan pertukaran informasi dan komunikasi tentang observasi sumber daya laut, habitat, ekosistem. Pertemuan TWG-MEP kelima berlangsung di Haikou tanggal 14-15 Oktober 1997, dan disetujui bahwa TWG ini akan melakukan studi lebih jauh untuk melaksanakan hasil-hasil pertemuan. Selain masalah kelautan juga dibentuk kelompok kerja teknis yang merumuskan masalah hukum dan regulasi pencemaran laut di Laut Cina Selatan (LCS) yaitu *Technical Working Group on Legal Matters/TWG-LM*. Sidang TWG-LM pertama berlangsung di Phuket, Thailand pada 2-6 Juli 1995. TWG-LM diarahkan untuk mempelajari implikasi-implikasi legal dari berbagai kegiatan yang diusulkan, koleksi dan analisis berbagai usaha kerjasama di bidang maritim.

⁴⁶ Rizal Sukma. *Konflik...Opcit.* hal. 67

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 69

Kelompok kerja lainnya yang dibentuk adalah untuk melakukan kerjasama di bidang keamanan navigasi, pelayaran, dan komunikasi yaitu *Technical Working Group on Safety Navigation, Shipping, and Communication/TWG-SNSC*. Pertemuan pertama TWG-SNSC di Bandar Sri Begawan tanggal 29 Oktober 1996 dan pertemuan kedua yang menyepakati diselenggarakannya pertemuan kelompok ahli bidang pendidikan dan latihan kelautan atau *Group of Experts on Education and Training/GEM-ETM* yang telah bertemu di Singapura tanggal 7-10 Mei 1997, juga pertemuan kelompok ahli bidang hidrografi dan pemetaan atau *Group of Expert on Hydrography and Mapping/GEM-HDI* yang telah bertemu di Kuching, Malaysia tanggal 12-15 Juli 1997., sekaligus kursus tentang keanekaragaman hayati di Laut Cina Selatan (LCS)⁴⁸.

Selain itu mendukung saran Singapura mengenai pelaksanaan survey institusi palatihan untuk mengetahui lokasi dan nama-nama sekolah, standar atau ukuran yang sedang digunakan, pelajaran (*course*) yang diberikan⁴⁹. Diharapkan dua kelompok kerja teknis ini mampu untuk memberikan data-data mengenai hidrografi dan pemetaan di Laut Cina Selatan (LCS).

Proyek pengembangan Laut Cina Selatan (LCS) akan bekerjasama dengan badan lingkungan PBB yaitu *United Nation Enviromental Protection (UNEP)* juga berkoordinasi dengan lembaga yang menangani eksplorasi di daerah pantai dan geologi di Asia Tenggara atau *Coordinating Committee For Coastal and Offshore Geoscience (CCOP)*. Keikutsertaan UNEP adalah untuk membantu mengimplemetasikan beberapa komponen proyek-proyek *biodiversity* yang akan dimuat dalam *UNEP's Stategic Action*, sementara CCOP diharapkan akan mengumpulkan data-data sumber daya mineral non hidrokarbon sekaligus membuat pusat data⁵⁰.

Kesepakatan untuk melakukan kerjasama dan pembangunan bersama (*joint development*) juga dilakukan secara bilateral antara dua negara, seperti yang dilakukan oleh Filipina dan Vietnam yang telah memulai proyek penelitian kelautan sebagai langkah untuk membangun kepercayaan. Seorang pejabat senior

⁴⁸ Windratmo. *Penanganan Potensi...Opcit.* hal. 25

⁴⁹ Rizal Sukma. *Konflik...Opcit.* hal. 81

Filipina mengatakan, negara lain bebas untuk bergabung dalam riset ini dan bahwa Filipina telah membahas proyek serupa dengan Cina⁵¹.

Usulan pengembangan wilayah juga dilakukan oleh Thailand dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan mengurangi ketergantungan perdagangan dengan negara-negara industri, untuk itu Thailand mendesak Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk melakukan studi kelayakan atas usulannya tersebut⁵². Dimulainya kesepakatan untuk melakukan pembangunan bersama (*joint development*) ditandai partisipasi dari beberapa negara secara finansial dalam pelaksanaan proyek-proyek yang telah disepakati.

Misalnya Brunei Darussalam telah menyumbangkan sejumlah uang (*seed money*) sebesar US \$ 10.000 untuk proyek *biodiversity* (keragaman hayati) demikian halnya dengan Indonesia telah menyumbang sebesar US \$ 20.000, sedangkan Amerika Serikat telah menyerahkan data-data tentang *biodiversity* (keragaman hayati) di Laut Cina Selatan (LCS) juga Australia yang telah memberitahukan kesediannya untuk mengikutkan tenaga pakarnya dalam bidang ini dan menyumbangkan sebesar Aus \$ 25.000⁵³.

Sebagai forum formal yang membahas masalah politik dan keamanan kawasan, Asean Regional Forum (ARF) diharapkan mampu berperan secara optimal melalui tiga tahapan yang harus dilaluinya yaitu pembentukan rasa saling percaya atau *confidence building measures/CBMs*, diplomasi preventif, dan pendekatan penyelesaian konflik atau *conflict resolution* dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS), namun karena kelemahan-kelemahan yang ada baik internal Asean Regional Forum (ARF) ataupun kendala eksternal, Asean Regional Forum (ARF) belum bisa menjadi mediator atau fasilitator usaha-usaha proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS) secara langsung.

Dukungan Asean Regional Forum (ARF) merupakan dukungan moral terhadap upaya-upaya penanganan sengketa ini, dalam arti Asean Regional Forum (ARF) berupaya mensosialisasikan kesepakatan kerjasama untuk melakukan

⁵⁰ Windratmo. *Penanganan...Op.cit.* hal. 26

⁵¹ Kompas. 24 April 1996

⁵² Kompas. 31 Januari 1997

⁵³ Rizal Sukma. *Konflik ... Op. Cit.* hal 71

pembangunan bersama (*joint development*) dan mengusahakan pengakuan dari negara-negara yang bersengketa atau berkepentingan terhadap traktat tata sikap regional atau *code of conduct* di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), yaitu *code of conduct* yang telah disepakati secara bilateral maupun multilateral, seperti Deklarasi Manila 1992 tentang penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

3.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Langkah-langkah yang Diupayakan Asean Regional Forum (ARF) Sebagai Mekanisme Diplomasi Preventif Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan (LCS)

Pelaksanaan Diplomasi Preventif diarahkan untuk mencegah munculnya konflik, mencegah eskalasi konflik agar tidak menjadi konfrontasi militer dan mencegah perluasan konflik⁵⁴. Hal ini berlaku juga pada pelaksanaan diplomasi preventif dalam penanganan sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Penekanan diplomasi preventif yang dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) di Laut Cina Selatan (LCS) adalah mencegah terjadinya konfrontasi militer diantara negara-negara yang bersengketa.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) sebagai mekanisme diplomasi preventif dalam penanganan potensi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) belum bisa mencegah terjadinya konfrontasi militer secara optimal, hal ini dikarenakan kendala internal dan eksternal. Secara internal terdapat beberapa kelemahan secara organisasi di Asean Regional Forum (ARF), sedangkan kendala eksternal lebih pada lingkungan di sekitar Asean Regional Forum (ARF).

Ada beberapa kendala internal yang menyebabkan penanganan sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) yang dilakukan oleh Asean Regional Forum (ARF) tidak bisa berjalan secara optimal, *Pertama*, kendala yang berasal dari Asean Regional Forum (ARF) sebagai forum multilateral yang membahas masalah politik dan keamanan kawasan merupakan organisasi yang relatif masih baru yang memiliki

⁵⁴ *Seventh Asean Regional Forum (ARF) Ministerial Meeting 27 Juli 2000* Dalam www.aseansec.org. Diakses tanggal 5 November 2000

beberapa kelemahan, diantaranya pendekatan yang digunakan oleh Asean Regional Forum (ARF) yaitu gradual, evolusioner, dan informal.

Pendekatan semacam ini kadangkala tidak efektif terutama jika diterapkan pada jenis konflik yang menghendaki penyelesaian secara nyata dan tidak mengulur-ulur, sehingga terkesan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) mengambang, apalagi pendekatan yang dilakukan Asean Regional Forum (ARF) adalah pendekatan secara informal yaitu memanfaatkan hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan di luar Asean Regional Forum (ARF) seperti *workshop* tentang Laut Cina Selatan (LCS), dan hanya memberikan dukungan secara moral dalam setiap pernyataan resminya terhadap upaya-upaya tersebut.

Kondisi demikian justru membuka peluang bagi negara-negara yang bersengketa untuk mengabaikan hasil dari upaya-upaya secara informal yang dilakukan. *Kedua*, model Asean Regional Forum (ARF) didasarkan pada komunitas epistemis, dimana gagasan-gagasan muncul dari kelompok informal misalnya pusat studi dan seminar, gagasan seperti ini mungkin bisa diterapkan pada isu-isu yang dikategorikan *low politics* seperti, masalah lingkungan, pengangkutan obat bius, namun kurang efektif digunakan untuk mengantisipasi masalah politik yang sensitif⁵⁵.

Ketiga, secara teoritis kerjasama antar negara dapat dilakukan dengan *tacit agreement* (persetujuan diam-diam), negosiasi, atau pemaksaan oleh kekuatan hegemonik⁵⁶, negara-negara yang mempersengkatakan wilayah Laut Cina Selatan (LCS) telah melakukan negosiasi baik bilateral maupun multilateral untuk menjajagi kemungkinan kerjasama di wilayah ini, namun sebagai forum multilateral masalah politik dan keamanan kawasan, Asean Regional Forum (ARF) belum bisa menghasilkan suatu traktat atau keputusan yang mengikat atau diratifikasi oleh seluruh anggotanya.

Dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) Asean Regional Forum (ARF) tidak mengeluarkan sebuah traktat yang secara spesifik mengatur penanganan sengketa ini yang ditandatangani seluruh anggota Asean Regional Forum (ARF)

⁵⁵ *Contemporary Southeast Asia*. Volume 21. No.1. 1999. Hal. 75

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 75

termasuk negara-negara yang mempersengketakan Laut Cina Selatan (LCS). Asean Regional Forum (ARF) dalam setiap pernyataan resminya hanya menyatakan dukungannya terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh institusi-institusi di luar Asean Regional Forum (ARF) baik secara formal maupun informal.

Keempat, Asean Regional Forum (ARF) justru dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah keamanan kawasan setelah Amerika Serikat mengalami kemunduran relatif sejak kalah dalam perang Vietnam. Apabila dalam masa perang dingin konflik di kawasan ini dipaksakan oleh dua negara adikuasa yang bertikai yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kerangka persaingan ideologisnya, dengan demikian ancaman yang dihadapi jelas oleh masing-masing kelompok negara tersebut, di samping itu dua negara adikuasa yang bertikai mengendalikan perilaku negara-negara yang menjadi sekutunya, maka pada pasca perang dingin berbagai konflik tradisional muncul kembali dan mengguncang kawasan ini.

Konflik-konflik tersebut muncul tanpa dipaksakan oleh dua kekuatan besar tersebut baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, karena masing-masing negara mempunyai persepsi keamanan yang berbeda, sehingga karena perbedaan tersebut maka tindakan negara-negara menjadi sulit untuk dikontrol. *Kelima*, secara keanggotaan ada sebuah kendala yang cukup signifikan dalam penanganan sengketa ini, yaitu, tidak terlibatnya Taiwan sebagai anggota Asean Regional Forum (ARF), dikarenakan negara-negara Asia masih mengakui kebijakan satu Cina. Dalam konflik dengan Taiwan, Cina secara tegas menolak keterlibatan dan campur tangan negara lain. Hal ini dikarenakan Cina menganggap bahwa Taiwan adalah salah satu provinsinya yang membelot dan ini merupakan urusan dalam negeri Cina yang tidak dapat diintervensi.

Seperti ditegaskan oleh Menlu Cina tang Jiaxuan bahwa teritori dan kedaulatan Cina tidak terpisahkan dan tidak membiarkan adanya pelanggaran dan campur tangan, dan kalau ada tindakan mendukung kemerdekaan Taiwan dari

induknya, warga Cina dan pemerintah tidak akan tinggal diam⁵⁷. Secara implisit ada kekhawatiran dari Cina jika Amerika Serikat sebagai anggota Asean Regional Forum (ARF) menggunakan forum itu untuk mencampuri persoalan Cina dengan Taiwan, disamping itu, tindakan Amerika Serikat yang selama ini dipandang Cina sebagai dukungan terhadap Taiwan, dengan pembelian senjata yang dilakukan oleh Taiwan dari Amerika Serikat, juga kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng Hui ke Amerika Serikat baru-baru ini cukup mengundang kecurigaan Cina terhadap niat baik Amerika Serikat terhadap persoalan Cina-Taiwan tersebut.

Kekhawatiran itu tercermin dalam pernyataan Menlu Cina, Tang Jiaxuan bahwa Amerika Serikat pada saat ini harus berhati-hati agar tidak menyatakan sesuatu yang dapat menyulut semangat kemerdekaan Taiwan⁵⁸. Peringatan Cina tersebut membuat negara-negara anggota Asean Regional Forum (ARF) mempertimbangkan ulang untuk melakukan intervensi terhadap persoalan ini, terutama didasarkan pertimbangan strategis keberadaan Cina di Asean Regional Forum (ARF), oleh karena itu pada pertemuan Asean Regional Forum (ARF) keenam tahun 1999, negara-negara anggota Asean Regional Forum (ARF) masih mengakui kebijakan satu Cina, ditambah pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan intervensi masalah antara Cina dan Taiwan, bahkan mendesak Taiwan untuk menghindari provokasi lebih lanjut terhadap Cina.

Strategi ini dilakukan dalam rangka tetap mempertahankan keterlibatan Cina dalam Asean Regional Forum (ARF) terutama dalam membahas penanganan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) selain untuk menghindari provokasi militer Cina di Laut Cina Selatan (LCS) maupun Taiwan. Apabila ketegangan antara Cina dan Taiwan terus meruncing, Cina dan Taiwan tetap dalam kehendaknya masing-masing, ditambah dengan kondisi yang ada yaitu pengakuan terhadap kebijakan satu Cina, maka berarti membiarkan Taiwan bertindak sendiri, yang mungkin justru akan memperumit sengketa di Laut Cina Selatan (LCS).

⁵⁷ *Republika*. 27 Juli 1999

⁵⁸ *Republika*. . . *Op.cit*

Di samping negara-negara pengklaim lain yang telah menempatkan pasukan militernya di wilayah yang diklaim, Taiwan juga telah menempatkan pasukan militernya di tempat yang diklaimnya juga pembangunan benteng di salah satu pulau terbesar di Spratly yaitu di Itu Aba. Dengan demikian Taiwan juga mempunyai potensi cukup besar untuk melakukan provokasi militer yang akan memancing terjadinya konfrontasi militer, oleh karena itu harus ada usaha untuk melibatkan Taiwan dalam pembahasan penanganan sengketa, karena dalam upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya, mendorong kerjasama dan pembangunan bersama haruslah melibatkan semua negara atau pihak yang mempersengkatakan Laut Cina Selatan (LCS) termasuk kepulauan Spratly.

Keenam, selain tidak terlibatnya Taiwan dalam upaya penanganan sengketa, faktor lainnya adalah sikap Cina terhadap mekanisme multilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Keengganan Cina untuk membicarakan sengketa secara multilateral tercermin dalam pernyataan Menlu Cina Qian Qichen, bahwa Beijing tidak sependapat jika Asean Regional Forum (ARF) tergesa-gesa membahas soal-soal keamanan regional⁵⁹. Sikap Cina merupakan batu sandungan bagi Asean Regional Forum (ARF) dalam ikut serta menangani sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Ada kekhawatiran yang melatarbelakangi sikap Cina tersebut, yaitu pengaruh Amerika Serikat dalam Asean Regional Forum (ARF) yang akan mempunyai efek negatif bagi Cina ketika masalah-masalah keamanan regional yang melibatkan Cina dibahas dalam Asean Regional Forum (ARF).

Meskipun hal tersebut menghambat langkah-langkah yang diupayakan Asean Regional Forum (ARF) untuk ikut serta menangani sengketa Laut Cina Selatan (LCS), namun yang terpenting dalam upaya penanganan sengketa ini adalah terbentuknya suatu pedoman tata sikap regional atau *code of conduct* untuk menahan negara-negara pengklaim agar tidak menggunakan kekuatan militer dalam sengketa ini, sehingga tidak menjurus pada konfrontasi militer.

Cina yang mempunyai kekuatan militer cukup besar sangat meresahkan negara-negara pengklaim yang lain. Mendorong dan melibatkan Cina dalam pembuatan pedoman tata sikap regional atau *code of conduct* baik melalui

Gaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang diterapkan dalam Asean Regional Forum (ARF) menimbulkan kontroversi, di satu sisi kepemimpinan ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF) ini mendapatkan dukungan, karena adanya kekhawatiran bahwa forum ini akan menjadi arena dominasi bagi negara-negara besar, seperti Cina atau Amerika Serikat, namun di lain pihak pola seperti ini juga mendapatkan kritikan bahkan rasa pesimis terhadap gerak Asean Regional Forum (ARF) mendatang jika kepemimpinan ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF) tetap dipertahankan secara dominan. Seperti dinyatakan oleh Robyn Lim, “*The Asean Regional Forum (ARF) can do little to promote security because ASEAN insist on its primacy in it.*”⁶⁰

(Asean Regional Forum (ARF) tidak bisa berperan lebih banyak dalam persoalan-persoalan keamanan jika peran ASEAN masih cukup dominan).

Hal ini dapat diartikan bahwa peran ASEAN sebagai *primary driving forces* atau kekuatan pendorong utama menimbulkan problem serius bagi proses Asean Regional Forum (ARF) ke depan.

Beberapa kelemahan gaya ASEAN yang dapat menghambat aktifitas Asean Regional Forum (ARF) yaitu *Pertama*, prinsip-prinsip yang digunakan oleh ASEAN, penekanan ASEAN terhadap pendekatan gradual dan mengutamakan konsensus tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam Asean Regional Forum (ARF) karena sebagai forum dialog multilateral harus benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan konflik dengan langkah-langkah konkrit dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Pendekatan gradual dan mengutamakan konsensus justru memberikan kesan bahwa Asean Regional Forum (ARF) ragu-ragu dan lamban dalam menangani konflik politik dan keamanan kawasan.

⁶⁰ Rizal Sukma. *Asean and The Asean Regional Forum : Should the Driver Be Replaced*. Dalam

Membiarkan keengganan Cina untuk membahas sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dalam forum multilateral seperti Asean Regional Forum (ARF) di satu sisi menguntungkan, karena Cina tidak akan meninggalkan Asean Regional Forum (ARF) dan terus terlibat dalam pembahasan mengenai sengketa Laut Cina Selatan (LCS), namun di sisi lain hal ini merupakan penghambat bagi Asean Regional Forum (ARF) untuk menjadi mediator dalam mempertemukan negara-negara yang mempersengkatakan wilayah Laut Cina Selatan (LCS) secara multilateral dalam Asean Regional Forum (ARF) sesuai dengan fungsinya sebagai forum masalah politik dan keamanan kawasan, dalam hal ini persoalan yang berpotensi mengganggu kestabilan kawasan, terutama sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

Beberapa hal yang menghambat langkah-langkah yang diupayakan Asean Regional Forum (ARF) dalam prosese penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS) tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal, namun disebabkan juga oleh faktor eksternal yaitu lingkungan di sekitar Asean Regional Forum (ARF) yang mempengaruhi aktivitas Asean Regional Forum (ARF). Kendala-kendala eksternal tersebut adalah pendekatan gaya ASEAN yang diterapkan oleh Asean Regional Forum (ARF) dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan (LCS).

Pada pertemuan Asean Regional Forum (ARF) kedua tahun 1995, disepakati bahwa metode dan pendekatan yang digunakan adalah metode ASEAN, dengan menyatakan bahwa ASEAN akan menjadi *primary driving force* atau kekuatan pendorong utama dalam Asean Regional Forum (ARF). Sikap Asean Regional Forum (ARF) ini dipertahankan sampai dengan pertemuan Asean Regional Forum (ARF) ketujuh tahun 2000. Gaya ASEAN sangat mewarnai Asean Regional Forum (ARF), hal ini dikarenakan berdirinya Asean Regional Forum (ARF) diprakarsai oleh ASEAN dan forum ini yang pada hakikatnya merupakan perluasan substansi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, jadi pengaruh ASEAN sangat kentara terutama pendekatan yang digunakan dalam menangani dan menyelesaikan konflik.

dapat terus berada pada posisi sentral di Asean Regional Forum (ARF) karena kegagalannya dalam merumuskan mekanisme penyelesaian konflik intra ASEAN. Dengan demikian ASEAN tidak dapat menawarkan sebuah pedoman bagi Asean Regional Forum (ARF) dalam menyelesaikan konflik diantara anggota-anggotanya⁶².

Keempat, daya jangkauan ASEAN dalam menyelesaikan konflik. ASEAN merupakan organisasi regional yang mewakili sebuah *sub-region* yaitu Asia Tenggara, oleh karena itu lingkup kerjasama ASEAN adalah wilayah Asia Tenggara. Pembatasan seperti ini menimbulkan keraguan terhadap persepsi keamanan ASEAN terhadap *sub-region* yang lain, mengingat eksklusifitas negara-negara anggotanya yang demikian tinggi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara lain merasa diabaikan.

Ketika pola ASEAN ini ingin diterapkan dalam Asean Regional Forum (ARF) yang dibentuk dengan wilayah kerja Asia Pasifik, maka hal tersebut akan menimbulkan kendala yaitu penerimaan pola tersebut di luar negara-negara bukan anggota ASEAN. Di samping itu wilayah-wilayah dengan tensi konflik yang tinggi justru berada diluar Asia Tenggara, seperti Asia Timur atau Asia Selatan dengan adanya perlombaan dan uji coba senjata nuklir India dan Pakistan.

Pendekatan gaya ASEAN mungkin bisa diterapkan dalam Asean Regional Forum (ARF) namun hal tersebut tidak berarti dominasi dan posisi sentral ASEAN dalam Asean Regional Forum (ARF), perlu adanya reformasi terhadap pola-pola ASEAN agar Asean Regional Forum (ARF) dapat berfungsi secara tegas untuk mengartikulasi dan menyelesaikan konflik yang mengganggu kestabilan kawasan. Kendala eksternal lain adalah dasar klaim yang digunakan oleh negara-negara yang mempersengketakan Laut Cina Selatan (LCS) tidak dapat disahkan sesuai dengan konvensi hukum laut internasional 1982 (UNCLOS).

Keenam negara tersebut telah mengajukan tuntutan mereka atas kepulauan Spratly antara lain berdasarkan sejarah, penemuan, pendudukan sementara atau

⁶¹ Gaforano. *Flexibility or Irrelevance* Dalam *Contemporary Southeast Asia*. No. 1. 1999. hal. 75

⁶² Rizal Sukma. *Asean and The Asean Regional Forum (ARF)* ...*Op. Cit.* hal. 251

berulang, dan pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau berabad-abad lalu. Dari dasar klaim yang dikemukakan oleh negara-negara tersebut tidak terdapat dalam KHL 1982, namun masing-masing tetap bersikeras mempertahankan klaimnya di Laut Cina Selatan (LCS) termasuk Kepulauan Spratly karena masing-masing negara mempunyai kepentingan yang cukup strategis.

Cina sangat memerlukan cadangan minyak untuk menunjang program modernisasinya, Cina mengalami penurunan produksi minyak sehingga melakukan kebijakan untuk mengimpor minyak dari luar negeri sejak tahun 1993⁶³. Kebutuhan minyak Cina akan terus meningkat setiap tahun, oleh karena itu Cina makin mengukuhkan tuntutananya terhadap Kepulauan Spratly yang diperkirakan mengandung minyak yang melimpah⁶⁴. Kekalahan Vietnam dalam perang dengan Amerika Serikat telah membuat perekonomian negara ini hancur dan untuk membangun kembali diperlukan sumber daya minyak dan sumber daya mineral lain untuk menutup devisa neraca perdagangannya. Ketika di Laut Cina Selatan (LCS) disinyalir ada sumber daya minyak yang cukup besar, maka Vietnam dengan gigih mempertahankan klaimnya di kepulauan tersebut, bahkan pada pertengahan dasawarsa 1990-an Vietnam telah memberikan konsesi pengeboran sumur minyak kepada Mobil Oil Corporation di area Blue Dragon⁶⁵.

Filipina mempunyai kepentingan yang sangat strategis di Laut Cina Selatan (LCS) karena kehidupan ekonomi Filipina sangat tergantung pada sumber minyak. Impor minyak Filipina sampai sekitar 95 %⁶⁶. Di samping itu Laut Cina Selatan (LCS) adalah jalur perdagangan yang sangat penting bagi Filipina terutama kegiatan ekspor impor ke negara ASEAN dan di luar ASEAN. Sedangkan Brunei Darussalam dan Malaysia sangat berkepentingan terhadap jalur perdagangan Laut Cina Selatan (LCS), juga adanya kekhawatiran dibangunnya pangkalan-pangkalan militer di wilayah Laut Cina Selatan (LCS) yang membahayakan negara-negara di sekitarnya.

⁶³ Rizal Sukma. *Konflik...Op. Cit.* hal. 27.

⁶⁴ *Ibid.* hal. 27

⁶⁵ *Ibid.* hal 27

⁶⁶ *Ibid.* hal 27

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LITERATUR

Anwar, Dewi Fortuna, 1997, *Isu-Isu Strategis Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, PPW-LIPI,

Acharya, Amitav, dan Desmond Ball, (eds), 1999, *Next Stage: Preventive Diplomacy Security Cooperation in The Asia Pacific*, Singapore, Institute of Defence And Strategic Studies Nanyang Technological University

Ball, Desmond, 2000, *The Council fo Security Cooperation in The Asia Pacific:It's Record & It's Prospect*, Australia Strategic Defence Studies Centre ANU Canberra

Bandoro, Bantarto, 1996, *Agenda dan Penataan Keamanan Di Asia Pasifik* Jakarta, Centre For Strategic And International Studies

Budiarjo, Mirriam, 1972, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, 1984, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa Bangsa, *Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional*, Jakarta.

Litbang Departemen Luar Negeri, 1991, *Workshop On Managing Potential Conflict in The South China Sea*, Bandung

-----, 1992, *The Third Workshop On Managing Potential Conflict in The South China Sea*, Yogyakarta

Luhulima, C.P.F., 1997, *Asean Menuju Postur Baru*, Jakarta, Centre For Strategic And International Studies

Mas'ood, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES

Nasution, S., dan M. Thomas, 2001, *Buku Pedoman Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Jakarta, Bina Aksara

Roy, S.L., *Diplomasi*, Terjemahan Herwanto dan Mirsawati, 1981, Jakarta, Rajawali Press

Surahmad, Winarno, 1994, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung, Tarsito

Tim Peneliti/Tim penulis Pada Pusat Kajian Pasifik Universitas Hassanuddin, 1981, *Prospek Didirikannya SouthEast Asian Nuclear Weapon Free Zone*, Pusat Kajian Pasifik Universitas Hassanuddin,

The Liang Gie, 1980, *Ilmu Politik*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Gajah Mada

Usman, Asnani, dan Rizal, Sukma, 1997, *Konflik Laut Cina Selatan, Tantangan Bagi Asean*, Jakarta, Centre For Strategic And International Studies

Soesastro, Hadi, dan Anthony, Bergin, (eds), 1996, *The Role of Security And Economic Cooperation Structures in The Asia Pacific, Indonesian and Australian Views*, Jakarta, Centre For Strategic And International Studies,

Wanandi, Jusuf, (ed), 1996, *Regional Security Arrangement, Indonesian and Canadian Views*, Jakarta, Centre For Strategic And International Studies

LAPORAN

Asean Secretariat, *Asean Regional Forum Document Series 1994-1998*, Jakarta, 1999

JURNAL DAN TERBITAN BERKALA

Analisis CSIS, No.4 Tahun XXII 1993

-----, No. 6 Tahun XXV 1996

-----, No. 4 Tahun 1999

Contemporary Southeast Asia, Vol. XXI No.1 Tahun 1999

Jurnal Caraka, Vol.I No.1 1998

Jurnal Ilmu Politik, Vol. XXV No. 3 1997

Pacific Affairs, Vol.70 No.4 1998

The Indonesian Quarterly

SURAT KABAR

Media Indonesia, 1 Agustus 1999

-----, 8 Agustus 1997

-----, 26 Juli 1999

Merdeka, 13 April 1995

-----, 15 September 1995

Pikiran Rakyat, 11 Maret 1995

-----, 6 April 1995

Republika, 27 Juli 1999

Suara Karya, 20 Juli 1995

Suara Merdeka, 26 Juli 1995

-----, 7 September 1995

Suara Pembaruan, 17 Mei 1995

-----, 16 April 1997

Kompas, 24 April 1996

-----, 31 Januari 1997

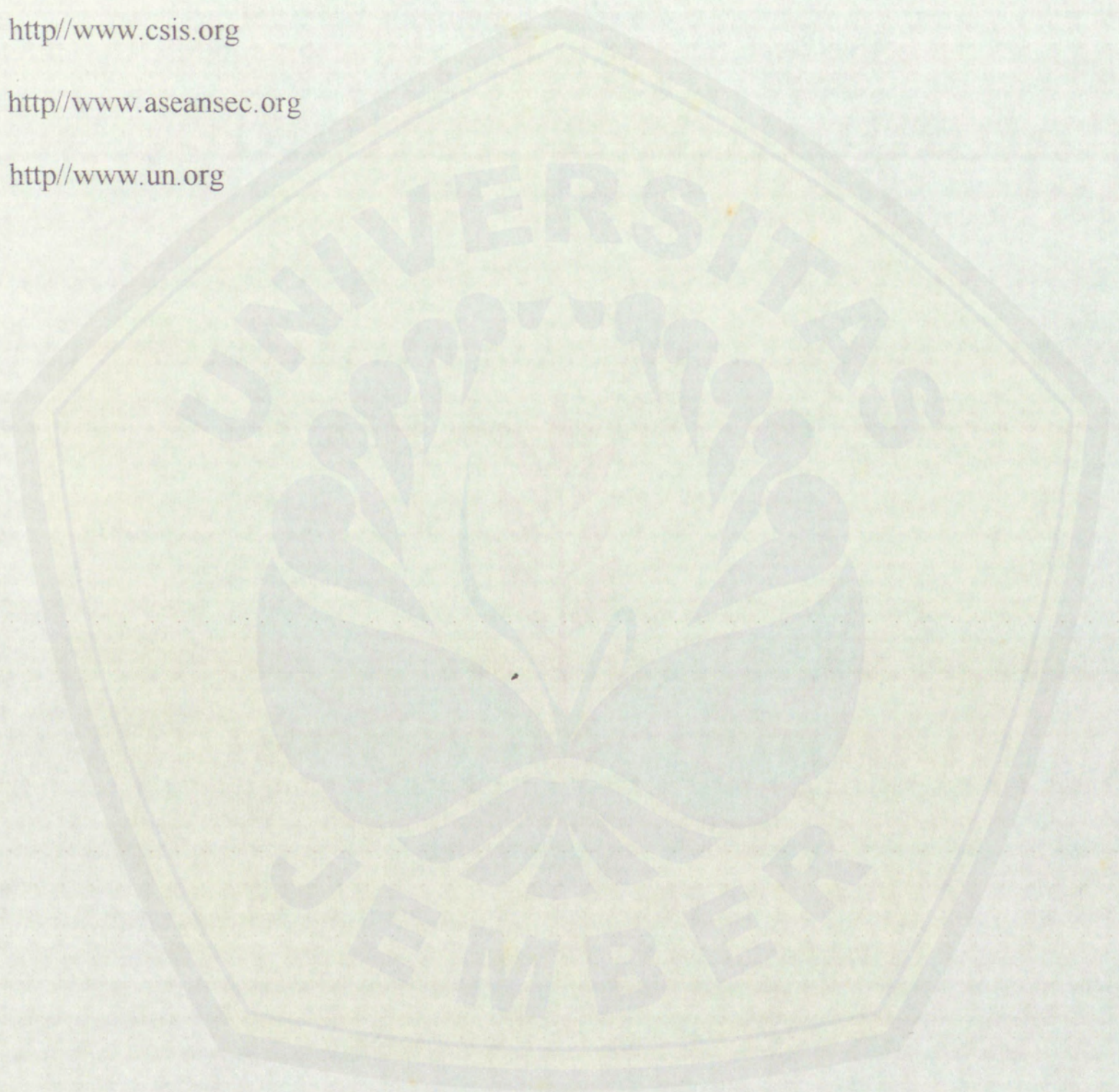
-----, 12 Desember 1997

HOME PAGE INTERNET

<http://www.csis.org>

<http://www.aseansec.org>

<http://www.un.org>



ASEAN REGIONAL FORUM : A CONCEPT PAPER

A Concept Paper

18 March 1995

Introduction

1 The Asia Pacific region is experiencing an unprecedented period of peace and prosperity. For the first time in a century or more, the guns are virtually silent. There is a growing trend among the states in the region to enhance dialogue on political and security cooperation. The Asia Pacific is also the most dynamic region of the world in terms of economic growth. The centre of the world's economic gravity is shifting into the region. The main challenge of the ASEAN Regional Forum (ARF) is to sustain and enhance this peace and prosperity.

2 This is not an easy challenge. The region has experienced some of the most disastrous wars of the twentieth century. It is also a remarkably diverse region where big and small countries co-exist. They differ significantly in levels of development. There are cultural, ethnic, religious and historical differences to overcome. Habits of cooperation are not deep-seated in some parts of the region.

3 ASEAN has a pivotal role to play in the ARF. It has a demonstrable record of enhancing regional cooperation in the most diverse sub-region of the Asia Pacific. It has also fostered habits of cooperation and provided the catalyst for encouraging regional cooperation in the wider Asia Pacific region. The annual ASEAN Ministerial Meetings have contributed significantly to the positive regional environment today. There would be great hope for the Asia Pacific if the whole region could emulate ASEAN's record of enhancing the peace and prosperity of its participants.

4 Although ASEAN has undertaken the obligation to be the primary driving force of the ARF, a successful ARF requires the active participation and cooperation of all participants. ASEAN must always be sensitive to and take into account the interests and concerns of all ARF participants.

The challenges

5 To successfully preserve and enhance the peace and prosperity of the region, the ARF must dispassionately analyse the key challenges facing the region. Firstly, it should acknowledge that periods of rapid economic growth are often accompanied by significant shifts in power relations. This can lead to conflict. The ARF will have to carefully manage these transitions to preserve the peace. Secondly, the region is remarkably diverse. The ARF should recognise and accept the different approaches to peace and security and try to forge a consensual approach to security issues. Thirdly, the region has a residue of unresolved territorial and other differences. Any one of these could spark a conflagration that could undermine the peace and prosperity of the region. Over time the ARF will have to gradually defuse these potential problems.

6 It would be unwise for a young and fragile process like the ARF to tackle all these challenges simultaneously. A gradual evolutionary approach is required. This evolution can take place in three stages:

Stage I: Promotion of Confidence Building Measures

Stage II: Development of Preventive Diplomacy Mechanisms

Stage III: Development of Conflict-Resolution Mechanisms

7 The participants of the first ARF Ministerial Meeting in Bangkok in July 1994 agreed on "the need to develop a more predictable and constructive pattern of relations for the Asia Pacific region". In its initial phase, the ARF should therefore concentrate on enhancing the trust and confidence amongst its participants and thereby foster a regional environment conducive to maintaining the peace and prosperity of the region.

Stage 1: Promotion of Confidence Building Measures

8 In promoting confidence building measures, the ARF may adopt two

complementary approaches. The first approach derives from ASEAN's experience, which provides a valuable and proven guide for the ARF. ASEAN has succeeded in reducing tensions among its member states, promoting regional cooperation and creating a regional climate conducive to peace and prosperity without the implementation of explicit confidence building measures, achieving conditions approximating those envisaged in the Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). The concepts of ZOPFAN and its essential component, the South East Asia Nuclear Weapons-Free Zone (SEANWFZ), are significantly contributing to regional peace and stability. ASEAN's well established practices of consultation and consensus (musyawarah and mufakat) have been significantly enhanced by the regular exchanges of high-level visits among ASEAN countries. This pattern of regular visits has effectively developed into a preventive diplomacy channel. In the Asian context, there is some merit to the ASEAN approach. It emphasises the need to develop trust and confidence among neighbouring states.

9 The principles of good neighbourliness, which are elaborated in the concept of ZOPFAN, are enshrined in the 1976 Treaty of Amity, and Cooperation in South East Asia (TAC). One simple concrete way of expanding the ASEAN experience is to encourage the ARF participants to associate themselves with the TAC. It is significant that the first ARF meeting in Bangkok agreed to "endorse the purposes and principles of the ASEAN Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia as a code of conduct governing relations between states and a unique diplomatic instrument for regional confidence building, preventive diplomacy, and political and security cooperation."

10 The second approach is the implementation of concrete confidence-building measures. The first ARF meeting in Bangkok entrusted the next Chairman of the ARF, Brunei Darussalam, to study all the ideas presented by ARF participants and to also study other relevant internationally recognised norms, principles and practices. After extensive consultations, the ASEAN countries have prepared two lists of confidence building measures. The first list (Annex A) spells out measures which can be explored and implemented by ARF participants in the immediate future. The second list (Annex B) is an indicative list of other proposals which can be explored over the medium and long-term by ARF participants and also considered in the immediate future by the Track Two process. These lists include possible preventive diplomacy and other measures.

11 Given the delicate nature of many of the subjects being considered by the ARF, there is merit in moving the ARF process along two tracks. Track One activities will be carried out by ARF governments. Track Two activities will be carried out by strategic institutes and non-government organisations in the region, such as ASEAN-ISIS and CSCAP. To be meaningful and relevant, the Track Two activities may focus, as much as possible, on the current concerns of the ARF. The synergy between the two tracks would contribute greatly to confidence building measures in the region. Over time, these Track Two activities should result in the creation of a sense of community among participants of those activities.

Moving Beyond Stage I

12 There remains a residue of unresolved territorial and other disputes that could be sources of tension or conflict. If the ARF is to become, over time, a meaningful vehicle to enhance the peace and prosperity of the region, it will have to demonstrate that it is a relevant instrument to be used in the event that a crisis or problem emerges. The ARF meeting in Bangkok demonstrated this by taking a stand on the Korean issue at the very first meeting. This was a signal that the ARF is ready to address any challenge to the peace and security of the region.

13 Over time, the ARF must develop its own mechanisms to carry out preventive diplomacy and conflict-resolution. In doing so, the ARF will face unique challenges. There are no established roads or procedures for it to follow. Without a high degree of confidence among ARF participants, it is unlikely that they will agree to the establishment of mechanisms which are perceived to be intrusive and autonomous. This is a political reality the ARF should recognise. However, it would be useful in the initial phase for the Track Two process to consider and investigate a variety of preventive diplomacy and conflict-resolution mechanisms. A good start was made with the three workshops organised by the Intentional Studies Centre (Thailand) and Institute of Policy Studies (Singapore) on ASEAN-UN Cooperation for Peace and Preventive Diplomacy, and the Indonesia-sponsored series of workshops on the South China Sea.

Stage II: Development of Preventive Diplomacy

14 Preventive diplomacy would be a natural follow-up to confidence-building measures. Some suggestions for preventive diplomacy measures are spelled out in Annex A and Annex B.

Stage III: Conflict Resolution

15 It is not envisaged that the ARF would establish mechanisms for conflict resolution in the immediate future. The establishment of such mechanisms is an eventual goal that ARF participants should pursue as they proceed to develop the ARF as a vehicle for promoting regional peace and stability.

Organisation of ARF activities

16 There shall be an annual ARF Ministerial Meeting in an ASEAN capital just after the ASEAN Ministerial Meeting. The host country will chair the meeting. The incoming Chairman of the ASEAN Standing Committee will chair all inter-sessional Track One activities of the ARF.

17 The ARF shall be apprised of all Track Two activities through the current Chairman of the Track One activities, who will be the main link between Track One and Track Two activities.

18 In the initial phase of the ARF, no institutionalisation is expected. Nor should a Secretariat be established in the near future. ASEAN shall be the repository of all ARF documents and information and provide the necessary support to sustain ARF activities.

19 The participants of the ARF comprise the ASEAN member states, the observers, and consultative and dialogue partners of ASEAN. Applications to participate in the ARF shall be submitted to the Chairman of the ARF who will then consult the other ARF participants.

20 The rules of procedure of ARF meetings shall be based on prevailing ASEAN norms and practices. Decisions should be made by consensus after careful and extensive consultations. No voting will take place. In accordance with prevailing ASEAN practices, the Chairman of the ASEAN Standing Committee shall provide the secretarial support and coordinate ARF activities.

21 The ARF should also progress at a pace comfortable to all participants. The ARF should not move "too fast for those who want to go slow and not too slow for those who want to go fast".

Conclusion

22 ARF participants should not assume that the success of the ARF can be taken for granted. ASEAN's experience shows that success is a result of hard work and careful adherence to the rule of consensus. ARF participants will have to work equally hard and be equally sensitive to ensure that the ARF process stays on track

23 The ARF must be accepted as a "sui generis" organisation. It has no established precedents to follow. A great deal of innovation and ingenuity will be required to keep the ARF moving forward while at the same time

ensure that it enjoys the support of its diverse participants. This is a major challenge both for the ASEAN countries and other ARF participants. The UN Secretary-General's "Agenda for Peace" has recognised that "just as no two regions or situations are the same, so the design of cooperative work and its division of labour must adjust to the realities of each case with flexibility and creativity".

18 March 1995

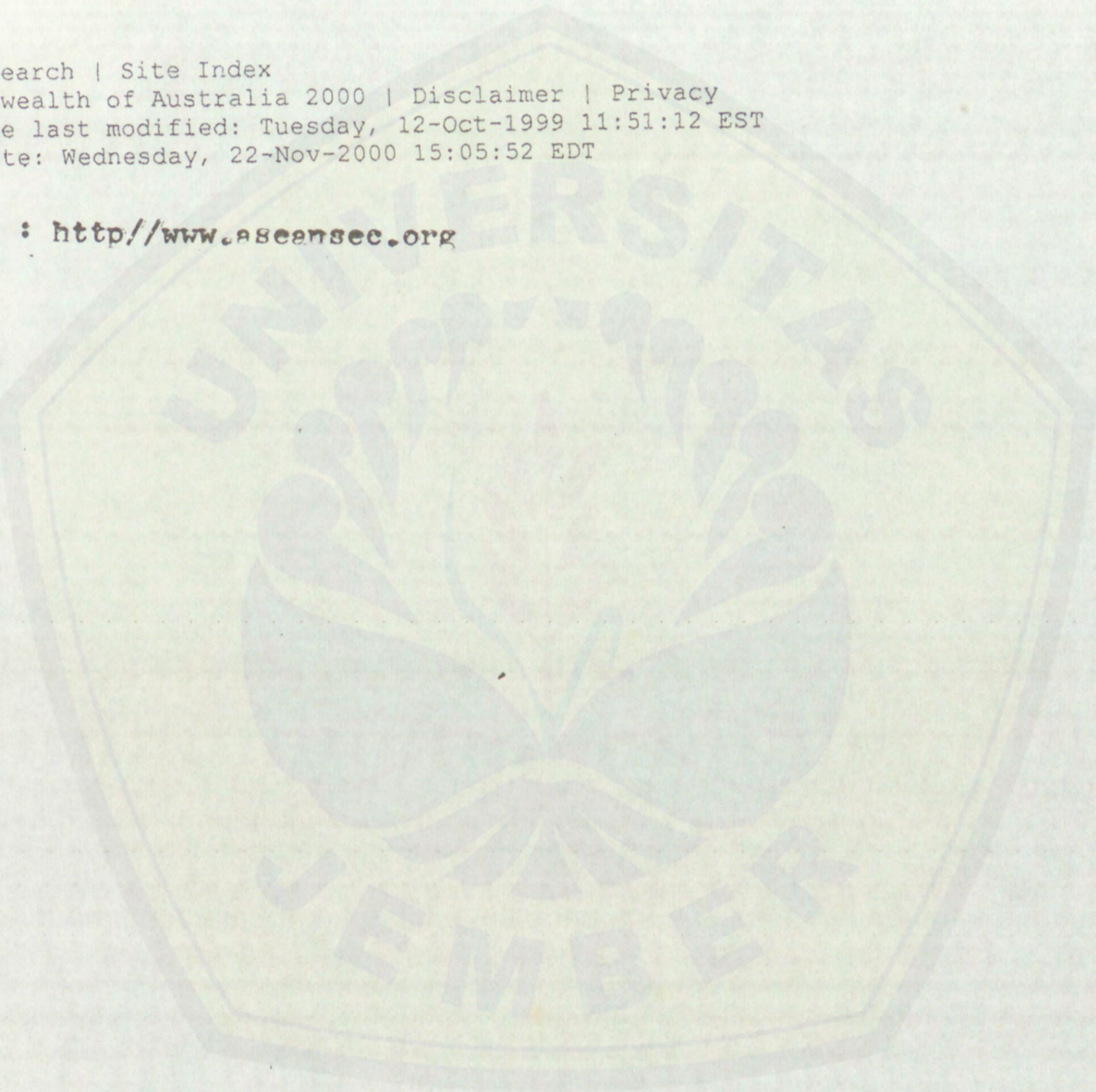
Home | Search | Site Index

© Commonwealth of Australia 2000 | Disclaimer | Privacy

This page last modified: Tuesday, 12-Oct-1999 11:51:12 EST

Local Date: Wednesday, 22-Nov-2000 15:05:52 EDT

Sumber : <http://www.aseansec.org>



SEVENTH ASEAN REGIONAL FORUM
MINISTERIAL MEETING
27 July 2000
Bangkok, Thailand

CONCEPT AND PRINCIPLES OF PREVENTIVE DIPLOMACY

Introduction

1. The ASEAN Regional Forum (ARF) was established by ASEAN in 1994 to maintain peace and stability in the region and to promote regional development and prosperity. It was recognised that rapid development in the regional and global environment had impacted on the security and strategic concerns of countries in the region. It was also acknowledged that the region was remarkably diverse, and that there remained challenges to regional peace and prosperity.
2. The ARF sought to meet these challenges by putting into place a three-stage process: Stage 1 on promotional Confidence Building Measures, Stage 2 on development of Preventive Diplomacy and Stage 3 on Elaboration of Approaches to Conflicts. It was generally recognised that the ARF would have to establish itself, over time, as a meaningful forum to enhance the peace and prosperity of the region. To do so, the ARF process would have to adopt a gradual evolutionary approach, decision-making by consensus and move at a pace comfortable to all its members in order to achieve its long-term objectives. Discussions should be aimed at enhancing mutual understanding and trust among the Asia-Pacific countries, furthering their dialogue and cooperation, and promoting peace, stability and prosperity in the region.
3. Much progress has been made over the past six years, a relative short time in the life of regional organisations. Constant interaction among Ministers and senior officials of the ARF members, and confidence building measures that have been initiated, have helped to build up comfort levels. This has allowed for discussions among ARF members to be candid and frank, thereby encouraging greater transparency, mutual trust and understanding of each other's concerns and positions. It was stressed that the confidence building would continue to be the main thrust of the whole ARF process, since it is impossible to move the ARF forward without a high degree of mutual understanding and trust among ARF participants.
4. Hence, at the 4th ARF, the Ministers instructed the ARF Intersessional Support Group on Confidence Building Measures (ISG on CBMs) to identify areas in the overlap between CBMs and Preventive Diplomacy, and ways and means of addressing them while maintaining the focus on CBMs). In addressing the issue of overlap, a common understanding on a working concept of Preventive Diplomacy (PD) and the principles governing its practice is necessary to provide a common basis on which to explore this

overlap and to enhance confidence in the process. Pursuant to this, the Ministers at the 6th ARF in Singapore instructed the ISG on CBMs to further explore the overlap between CBMs and PD, focusing *inter alia* on the development of the concepts and principles of PD.

Definition Concept and Principles of PD by the ARF

5. Agreement on the definition and, more importantly, a common understanding of the concept of PD and the principles governing the practice of PD, would be useful for further progress on the development of PD within the ARF. The definition of PD by ARF sets out very broad objectives, and the concept would serve as a guide as to the approach to take, while the principles would serve as a guide as to fundamental parameters for the practice of PD in the ARF.

6. The definition concept and principles of PD as agreed by ARF members are not legal obligations- They are shared perspectives that would apply only to the ARF and should be understood as representing the current status of an evolving consensus in the ARF as discussions continue. These discussions should be aimed at enhancing mutual understanding and trust among ARF members, take into account the actual conditions of the region and be consistent with basic principles, of international law and established APF processes.

Definition of PD

7. The definition of PD has proven to be controversial. However, there appears to be general consensus that PD is consensual diplomatic and political action taken by sovereign states with the consent of all directly involved parties:

- To help prevent disputes and conflicts from arising between States that could potentially pose a threat to regional peace and stability;
- To help prevent such disputes and conflicts from escalating into armed confrontation; and
- To help minimise the impact of such disputes and conflicts on the region

Concept of PD

8. Much academic work has been done within this broad definition of PD, and various concepts have been suggested. We can view PD along a time-line in keeping with the

and security cooperation within the region as a means of ensuring a lasting peace, stability, and prosperity
gion and its peoples.

Sumber : <http://www.aseansec.org>

Diakses pada tanggal 27 Desember 2001 & pada tanggal 5 November
2000



ASEAN DECLARATION ON THE SOUTH CHINA SEA
Manila, Philippines, 22 July 1992

WE, the foreign Minister of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations;

RECALLING the historic, cultural and social ties that bind our peoples as states adjacent to the South China Sea;

WISHING to promote the spirit of kinship, friendship and harmony among our peoples who share similar Asian traditions and heritage;

DESIROUS of further promoting conditions essential to greater economic cooperation and growth;

RECOGNIZING that we are bound by similar ideals of mutual respect, freedom, sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

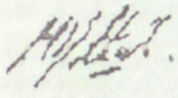
RECOGNIZING that South China Sea issues involve sensitive questions of sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

CONSCIOUS that any adverse developments in the South China Sea Directly affect peace and stability in the region.

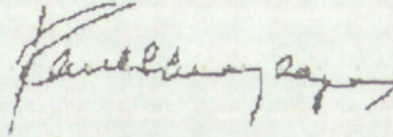
HEREBY

1. **EMPHASIZE** the necessity to resolve all sovereignty and jurisdictional issues pertaining to the South China Sea by peaceful means, without resort to force;
2. **URGE** all parties concerned to exercise restraint with view to creating a positive climate for the eventual resolution of all disputes;
3. **RESOLVE**, without prejudicing the sovereignty and jurisdiction of countries having direct interests in the area, to explore the possibility cooperation in the South China Sea relating to the safety of maritime navigation and communication, protection against pollution of the marine environment, coordination of search and rescue operations, efforts towards combatting piracy and armed robbery as well as collaboration in the campaign against illicit trafficking in drugs;
4. **COMMEND** all parties concerned to apply the principles contained in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as the basis for establishing a code of international conduct over the South China Sea;
5. **INVITE** all parties concerned to subscribe to this Declaration of principles.

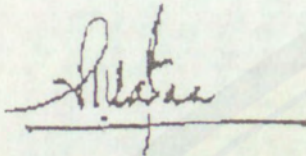
Signed in Manila, Philippines, this 22nd day of July, nineteen hundred and ninety-two.



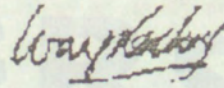
HRH Prince Mohamed Dolkiah
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
BRUNEI DARUSSALAM



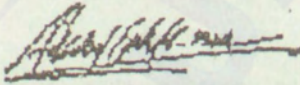
Raul S. Manglapus
SECRETARY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



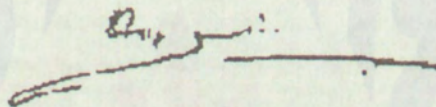
Ali Alatas
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA



Wong Kan Song
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF SINGAPORE



Datuk Abdulah Rin Haji Ahmad Radawi
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MALAYSIA



Arsa Sarasin
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
KINGDOM OF THAILAND

Sumber : <http://www.aseansec.org>

Diakses pada tanggal 4 Januari 2002

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

Indonesia, 24 February 1976

The High Contracting Parties :

CONSCIOUS of the existing ties of history, geography and culture, which have bound their peoples together;

ANXIOUS to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law and enhancing regional resilience in their relations;

DESIRING to enhance peace, friendship and mutual cooperation on matters affecting Southeast Asia consistent with the spirit and principles of the Charter of the United Nations, the Ten Principles adopted by the Asian-African Conference in Bandung on 25 April 1955, the Declaration of the Association of Southeast Asian Nations signed in Bangkok on 8 August 1967, and the Declaration signed in Kuala Lumpur on 27 November 1971;

CONVINCED that the settlement of differences or disputes between their countries should be regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding negative attitudes which might endanger or hinder cooperation;

BELIEVING in the need for cooperation with all peace-loving nations, both within and outside Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony;

SOLEMNLY AGREE to enter into a Treaty of Amity and Cooperation as follows:

CHAPTER I : PURPOSE AND PRINCIPLES**Article 1**

The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship;

Article 2

In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be guided by the following fundamental principles:

- a. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;
- b. The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;
- c. Non-interference in the internal affairs of one another;
- d. Settlement of differences or disputes by peaceful means;
- e. Renunciation of the threat or use of force;
- f. Effective cooperation among themselves;

CHAPTER II : AMITY**Article 3**

In pursuance of the purpose of this Treaty the High Contracting Parties shall endeavour to develop and strengthen the traditional, cultural and historical ties of friendship, good neighbourliness, and

cooperation which bind them together and shall fulfill in good faith the obligations assumed under this Treaty. In order to promote closer understanding among them, the High Contracting Parties shall encourage and facilitate contact and intercourse among their peoples.

CHAPTER III : COOPERATION

Article 4

The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common ideals and aspiration of international peace and stability in the region and all other matters of common interest.

Article 5

Pursuant to Article 4 the High Contracting Parties shall exert their maximum efforts multilaterally as well as bilaterally on the basis of equality, non-discrimination and mutual benefit.

Article 6

The High Contracting Parties shall collaborate for the acceleration of the economic growth in the region in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of nations in Southeast Asia. To this end, they shall promote the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade and the improvement of their economic infrastructure for the mutual benefit of their peoples. In this regard, they shall continue to explore all avenues for close and beneficial cooperation with other States as well as international and regional organisations outside the region.

Article 7

The High Contracting Parties, in order to achieve social justice and to raise the standards of living of the peoples of the region, shall intensify economic cooperation. For this purpose, they shall adopt appropriate regional strategies for economic development and mutual assistance.

Article 8

The High Contracting Parties shall strive to achieve the closest cooperation on the widest scale and shall seek to provide assistance to one another in the form of training and research facilities in the social, cultural, technical, scientific and administrative fields.

Article 9

The High Contracting Parties shall endeavour to foster cooperation in the furtherance of the cause of peace, harmony, and stability in the region. To this end, the High Contracting Parties shall maintain regular contacts and consultations with one another on international and regional matters with a view to coordinating their views actions and policies.

Article 10

Each High Contracting Parties shall not in any manner of form participate in any activity which shall constitute a treat to the political and economic stability, sovereignty, or territorial integrity of another High Contracting Party.

Article 11

The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective national resilience in their political, economic, socio-cultural as well as security fields in conformity with their respective ideals and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities in order to

preserve their respective national identities.

Article 12

The High Contracting Parties in their efforts to achieve regional prosperity and security, shall endeavour to cooperate in all fields for the promotion of regional resilience, based on the principles of self-confidence, self-reliance, mutual respect, cooperation, of solidarity which will constitute the foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia.

CHAPTER IV : PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 13

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.

Article 14

To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.

Article 15

In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation.

Article 16

The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.

Article 17

Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations.

CHAPTER V : General Provision

Article 18

This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand. It shall be ratified in accordance with the constitutional procedures of each signatory State. It shall be open for accession by other States in Southeast Asia.

Article 19

This Treaty shall enter into force on the date of the deposit of the fifth instrument of ratification with the Governments of the signatory States which are designated Depositories of this Treaty and the

instruments of ratification or accession.

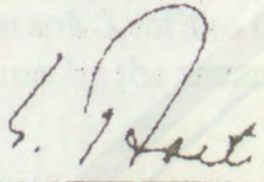
Article 20

This Treaty is drawn up in the official languages of the High Contracting Parties, all of which are equally authoritative. There shall be an agreed common translation of the texts in the English language. Any divergent interpretation of the common text shall be settled by negotiation.

IN FAITH THEREOF the High Contracting Parties have signed the Treaty and have hereto affixed their Seals.

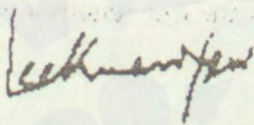
DONE at Denpasar, Bali, this twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

For the Republic of Indonesia:



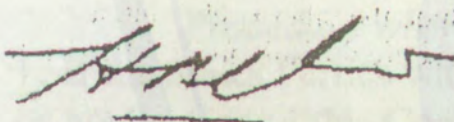
SOEHARTO
President

For the Republic of Singapore:



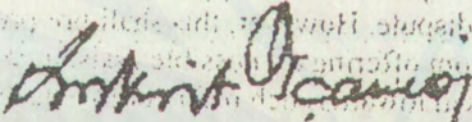
LEE KUAN YEW
Prime Minister

For Malaysia:



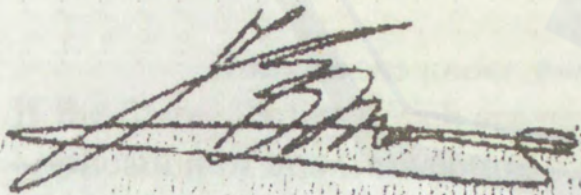
DATUK HUSEIN ONN
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:



KUKRIT PRAMOJ
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:



FERDINAND E. MARCOS

Sumber : <http://www.asaensec.org>

Diakses pada tanggal 4 Januari 2002

PART XV

SETTLEMENT OF DISPUTES

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 279

Obligation to settle disputes by peaceful means

States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter.

Article 280

Settlement of disputes by any peaceful means chosen by the parties

Nothing in this Part impairs the right of any States Parties to agree at any time to settle a dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by any peaceful means of their own choice.

Article 281

Procedure where no settlement has been reached by the parties

1. If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means and the agreement between the parties does not exclude any further procedure.
2. If the parties have also agreed on a time-limit, paragraph 1 applies only upon the expiration of that time-limit.

Article 282

Obligations under general, regional or bilateral agreements

If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed, through a general, regional or bilateral agreement or otherwise, that such dispute shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a binding decision, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this Part, unless the parties to the dispute otherwise agree.

Article 283

Obligation to exchange views

1. When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed

expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means.

2. The parties shall also proceed expeditiously to an exchange of views where a procedure for the settlement of such a dispute has been terminated without a settlement or where a settlement has been reached and the circumstances require consultation regarding the manner of implementing the settlement.

Article 284

Conciliation

1. A State Party which is a party to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention may invite the other party or parties to submit the dispute to conciliation in accordance with the procedure under Annex V, section 1, or another conciliation procedure.

2. If the invitation is accepted and if the parties agree upon the conciliation procedure to be applied, any party may submit the dispute to that procedure.

3. If the invitation is not accepted or the parties do not agree upon the procedure, the conciliation proceedings shall be deemed to be terminated.

4. Unless the parties otherwise agree, when a dispute has been submitted to conciliation, the proceedings may be terminated only in accordance with the agreed conciliation procedure.

Article 285

Application of this section to disputes submitted pursuant to Part XI

This section applies to any dispute which pursuant to Part XI, section 5, is to be settled in accordance with procedures provided for in this Part. If an entity other than a State Party is a party to such a dispute, this section applies *mutatis mutandis*.

SECTION 2. COMPULSORY PROCEDURES ENTAILING BINDING DECISIONS

Article 286

Application of procedures under this section

Subject to section 3, any dispute concerning the interpretation or application of this Convention shall, where no settlement has been reached by recourse to section 1, be submitted at the request of any party to the dispute to the court or tribunal having jurisdiction under this section.

Article 287

Choice of procedure

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

Article 289

Experts

In any dispute involving scientific or technical matters, a court or tribunal exercising jurisdiction under this section may, at the request of a party or *proprio motu*, select in consultation with the parties no fewer than two scientific or technical experts chosen preferably from the relevant list prepared in accordance with Annex VIII, article 2, to sit with the court or tribunal but without the right to vote.

Article 290

Provisional measures

1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers that *prima facie* it has jurisdiction under this Part or Part XI, section 5, the court or tribunal may prescribe any provisional measures which it considers appropriate under the circumstances to preserve the respective rights of the parties to the dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the final decision.
2. Provisional measures may be modified or revoked as soon as the circumstances justifying them have changed or ceased to exist.
3. Provisional measures may be prescribed, modified or revoked under this article only at the request of a party to the dispute and after the parties have been given an opportunity to be heard.
4. The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dispute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescription, modification or revocation of provisional measures.
5. Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with respect to activities in the Area, the Seabed Disputes Chamber, may prescribe, modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it considers that *prima facie* the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that the urgency of the situation so requires. Once constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm those provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4.
6. The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional measures prescribed under this article.

Article 291

Access

1. All the dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to States Parties.
2. The dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to entities other than States Parties only as specifically provided for in this Convention.

Lampiran 8

DAFTAR NAMA-NAMA PULAU DI GUGUSAN KEPULAUAN SPRATLY

I. Islands With Different Names (114)

English	Chinese	Vietnamese	Tagalog	Malay
Alexandra Bank	Renjun Tan			
Alicia Annie Reel	Xian'e Jiao			
Amboyna Cay	Anbo Shazhou	Dao An Bang		Pulau Amboyna Kecil
Alison Reefs				
Amy Douglas Bank	Antang Tan			
Ardasier Breakers	Xibo Jiao			
Ardasier Bank	Andu Tan			
Eaker Reef	Gongzhen Jiao			
Barque Canada Reef	Baijiao	Thu Yen Chai		
Pittern Reef	Bisheng Jiao			
Bombay Castle	Pengbobao			
Bombay Shoal	Pengbo Ansha			
Breakers	Suilang Ansha			
Brown Bank	Zong Tan			
Carnatic Shoal	Hongshi Ansha			
Cay Marino	Yunuo Jiao			
Central Reef	Zhong Jiao			
Commodore Reef	Siling Jiao		Rizal Reef	Terumbu Laksamana
Cornwallis Reef	Kangle Jiao			
Cuarteron Reef	Huayang Jiao			
Dallas Reef	Guangxingzai Jiao			
Dhaulle Shoal	Xiaoyao Ansha			Terumbu Umbi
Director Reef	Zhixiang Jiao			
Discovery Small Reef	Xiaoxian Jiao			
Collins reefs				
Chigua reefs				

English	Chinese	Vietnamese	Tagalog	Malay
Discovery Great Reef	Daxian Jiao			
East Reef	Dong Jiao			
Eldad Reef	Heng Jiao			
Fairie Queen Bank	Xianhou Tan			
Fancy Wreck Shoal	Fan'ai Ansha			
Fiery Cross Reff	Yongshu Jiao			
First Thomas Shoal	Xinyi Jiao			
Flat Island	Feixin Dao		Patag	
Friendship Shoal	Mengyi Ausha			
Gac Ma Reef	Chigua Jiao			
Ganges North Reef	Beiheng Jiao			
Ganges Reef	Fubo Jiao			
Gaven Reef	Nanxun Jiao			
Glasgow Shoal	Nanle Ansha			
Gloucester Breakers	Polang Jiao			
Grainger Bank	Lizhun Tan			
Hall Moon Shoal	Banyue Jiao			
Hayes Reef	Nanping Jiao			
Herald Reef	Haining Jiao			
Investigation Shoal	Yuya Ansha			
Investigator				
Northeast Shoal	Haikou Jiao			
Iroquois Reef	Houteng Jiao			
Irving Reef	Huo'ai Jiao			
itu Aba Island	Taiping Dao	Dao Ba Binh		
Jackson Atoll	Wulang Jiao			
James Shoal	Zhengmu Ansha			
Kingston Shoal	Jindun Ansha			
Ladd Reef	Riji Jiao			
Lankiam Cay	Yangxin Shazhou	Dao Long Kien	Pannata	
Lizzie Weber Reef	Danzhushi			
Loaita Bank & Reefs	Daoming Qunjiao			
Loaita Island	Nanyue Dao	Dao Loai Ta	Kota	
London Reef	Yinqing Qunjiao			
Lord Auckland Shoal	Elan Ansha			
Louisa Reef	Nantong Jiao			Terumbu Semarang
Lys Shoal	Lesi Ansha			
Mari Louise Bank	Xiongnan Jiao			
Mariveles Reef	Nanghai Jiao			
Menzies Reef	Mengzi Jiao			
Mischief Reef	Meiji Jiao			
Namyt Island	Hongxiu Dao	Dao Nam Yel		
Nanshand Island	Mahuan Dao		Lawak	
Nares Bank	Dayuan Tan			
North Danger Reefs	Shuangzi Qunjiao			
Northeast Cay	Beizi Dao	Son Tu Dong	Parola	
Northeast Shoal	Xiaowei Ansha			
North Luconia Shoal	Beikang Ansha			
North Reef	Liyue Nanjiao			
North Viper Shoal	Duhu Ansha			
Orleana Shoal	Aonan Ansha			
Owen Shoal	Aoyuan Ansha			
Johnson's Reefs				
Len Doo				
Rifleman Bank				

English	Chinese	Vietnamese	Tagalog	Malay
Pearson Reef	Liumen Jiao			
Pennsylvania Reef	Dongpo Jiao			
Pennsylvania South Reef	Kongming Jiao			
Petleg Reef	Bolan Jiao			
Prime Consort Bank	Xiwei Tan			
Prince of Wales Bank	Guangya Tan			
Reed Bank	Liyue Tan			
Royal Captain Shoal	Jianzhgnag Jiao			
Sabina Shoal	Xianbin Jiao			
Sand Cay	Dungian Shazhou	Dao Son Ca		
Seahorse Bank	Haima Tan			
Seahorse Breakers	Nan'an Jiao			
Second Thomas Shoal	Ren'ai Jiao			
Sin Cowe Island	Jinghong Dao	Dao Sinh Ton		
Southampton Reefs	Sanjiao Jiao			
Southern Bank	Bao Tan			
South Luconia Shoals	Nankang Ansha			
Southwest Shoal	Jinwu Ansha			
Spratly Island	Nanwei Dao	Dao Truong Sa		
Stay Shoal	Yindun Ansha			
Stera Blanca	Chengping Jiao			
Stigant Reef	Hai'an Jiao			
Subi Reef	Zhubi Jiao			
Swallow Reef	Danwan Jiao			Terumbu Layang-layang
Templer Bank	Zhongxiao Tan			
Third Thomas Shoal	Heping Ansha			
Thitu Island	Zhongye Dao	Dao Thi Tu	Pagasa	
Thitu Reefs	Zhongye Qunjiao			
Tizard Bank & Reefs	Zhenghe Qunjiao			
Trident Shoal	Yongdeng Ansha			
Union Bank & Reefs	Jinzhang Qunjiao			
Vanguard Bank	Wan'an Tan			
Viper Shoal	Baowei Ansha			
West Reef	Ximen Jiao			
Western Reef	Fulusi Jiao			
West York Island	Xiyue Dao	Dao Ben Lac	Likas	

II. Islands with Chinese Names Only (77)

Anda Jiao	Chang Tan
Anle Jiao	Changxian Jiao
Antang Jiao	Dongbei Ansha
Banlu Jiao	Donghua Jiao
Bei'an Jiao	Dongmen Jiao
Beiwai Jiao	Dongnan Ansha
Beizi Ansha	Brijiao Jiao
Bianshen Jiao	Faxian Ansha
Bin Jiao	Gongshi Jiao
Boji Jiao	Guihan Jiao
Changjun Ansha	Guangxing Jiao

Southwest Cay

South Reefs

Pigeon Reefs

Haikang Ansha
Hua Jiao
Huanle Ansha
Huoxing Jiao
Jiyang Jiao
Kangtai Tan
Kangxi Jiao
Kugui Jiao
Lankou Jiao
Lixin Jiao
Longxia Jiao
Lusha Jiao
Meiji: Jiao
Nailuo Jiao
Nanfang Qiantan
Nanhua Shuidao
Nanmen Jiao
Niaoyudingshi
Niuchelun Jiao
Niu'e Jiao
Pian Jiao
Puning Ansha
Qiong Jiao
Qingtai Jiao
Quyuan Jiao
Ranqing Dongjiao
Ranqing Shazhou
Shaung Jiao

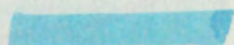






Shilongyan
Shipanzai
Shuanghuang Shazhou
Tanmen Jiao
Tiexian Jiao
Tiezhi Jiao
Tiezhi Shuidao
Wufangbei
Wufangnan
Wufanglou
Wufangwei
Wufangxi
Wumie Jiao
Xi Jiao
Xiaotou Jiao
Xunjiang Ansha
Yangming Jiao
Yijing Jiao
Yinbo Ansha
Yixingshi
Yongshi Tan
Zhangxi Jiao
Zhongshan Jiao
Zhong Shuidao
Zhuquan Jiao
Zhuying Tan
Zi Tan



Min. UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Sumber: Ji Guoxing, *The Spratlys Disputes and Prospects for Settlement*, 33-36.

Negara-negara yang bersengketa:

1. Vietnam & Filipina : 
2. Malaysia & Filipina : 
3. Brunei Darussalam & Malaysia : 
4. Cina & Filipina : 
5. Taiwan & Filipina : 
6. Vietnam, Malaysia & Filipina : 
7. Vietnam & Cina : 

Sumber : Asnani Usman & Rizal Sukma, "Konflik Laut Cina Selatan, Tantangan Bagi Asean", 4_20
Litbang Deplu, Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea", 211